

PENDUDUK DAN KEMISKINAN DI DAERAH PERBATASAN:

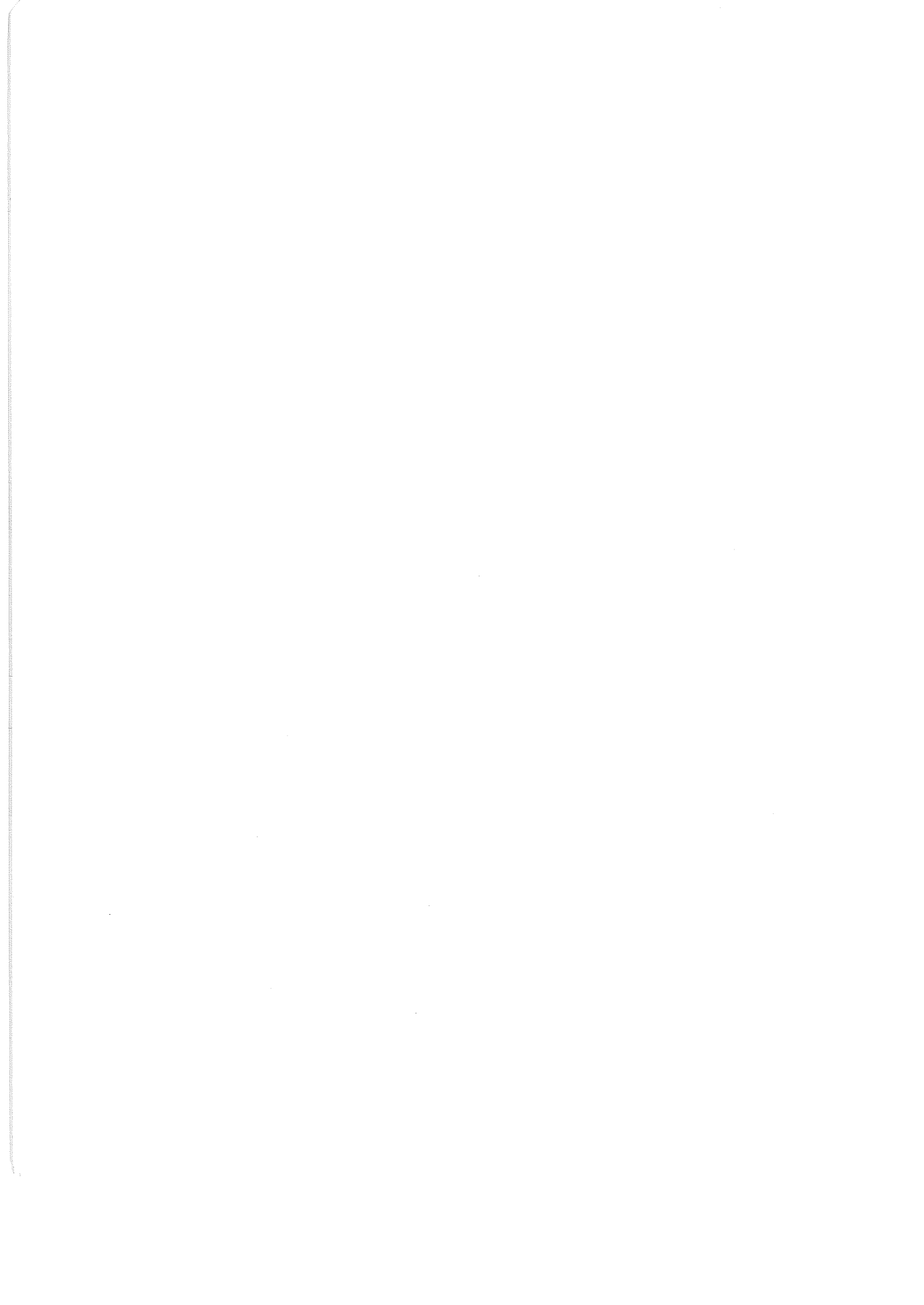
Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara

Tim Peneliti:

Ade Latifa
Aswatini
Suko Bandiyono
Haning Romdiati
Bayu Setiawan
Mita Noveria
Rusida Yulianti
Sri Rahayu



**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA 2007**



ABSTRAK

Berbicara mengenai persoalan kemiskinan tidak dapat terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Hampir semua pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan bersandar pada perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan/pengeluaran sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan. Padahal kemiskinan tidak hanya mencakup aspek kesejahteraan materi saja tetapi juga melibatkan berbagai dimensi diluar dimensi ekonomi. Pengukuran kemiskinan yang hanya mendasarkan pada dimensi ekonomi kurang dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kesejahteraan masyarakat suatu daerah, karena hanya melihat dari sisi input saja dan tidak melihat sisi output yang terefleksi dari variabel sosial-demografi, seperti kesehatan dan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengembangkan suatu pengukuran kemiskinan yang relatif mudah dalam perolehan datanya dan diperbandingkan antar rumah tangga maupun wilayah, yakni pengukuran kemiskinan dengan mengkombinasikan sejumlah faktor demografik dan sosial. Diharapkan dengan terwujudnya pengukuran dari perspektif sosial demografi ini dapat melengkapi beragam pengukuran kemiskinan yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian di tahun 2007 merupakan tahun kedua dari rangkaian penelitian di wilayah perbatasan yang direncanakan berlangsung selama 3 tahun (2006-2008). Penelitian dilangsungkan di dua wilayah perbatasan, yaitu di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pada tahun pertama, penelitian lebih difokuskan pada kegiatan pemetaan penduduk miskin ditinjau dari dimensi sosial-demografi. Sedangkan ditahun kedua ini, secara umum penelitian bertujuan untuk merumuskan indeks kemiskinan berdasarkan perspektif sosial-demografi. Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1). Mendapatkan pemahaman tentang kondisi kemiskinan dari perspektif sosial demografi di wilayah perbatasan; 2). Merumuskan konsep dan

pengukuran indeks kemiskinan rumahtangga dari perspektif sosial demografi di wilayah perbatasan; 3). Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara kemiskinan sosial demografi dengan kemiskinan pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) di tingkat rumah tangga, di wilayah perbatasan.

Data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui teknik penelitian survei. Responden dipilih secara *systematic random sampling*. Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti wawancara mendalam, *focus group discussion*, observasi dan *desk review*. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain hasil-hasil penelitian yang terkait dengan isu kemiskinan dan kondisi sosial demografi.

Nilai indeks yang merupakan garis kemiskinan sosial-demografi dapat dipakai untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin/tidak miskin, sehingga diketahui pula angka kemiskinan rumah tangga di dua lokasi penelitian. Namun demikian, tidak seperti angka kemiskinan versi BPS, angka kemiskinan sosial-demografi yang dikembangkan dalam penelitian di dua daerah perbatasan ini tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Hal ini karena indikator-indikator sosial-demografi yang digunakan untuk menghitung indeks tidak sama, karena indikator yang dipilih hanya indikator yang mempunyai hubungan signifikan dengan variable tergantung (jumlah anggota rumah tangga). Dengan demikian, angka kemiskinan sosial-demografi hanya dapat dipakai untuk kondisi kemiskinan di masing-masing daerah penelitian.

Kata kunci: Pengukuran kemiskinan; Nilai indeks sosial-demografi; Daerah perbatasan.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan masih membelit sebagian penduduk Indonesia. Data yang dikeluarkan BPS pada bulan Februari 2005 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin 35,1 juta jiwa. Pada Maret 2006 meningkat menjadi 39,05 juta jiwa. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah digulirkan, namun sebagian daerah tampaknya belum dapat mengatasi kemiskinan secara tuntas. Pencapaian pembangunan di beberapa wilayah, khususnya di daerah perbatasan masih jauh dari yang dicita-citakan. Daerah perbatasan seringkali diidentikkan sebagai daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Adanya persoalan geografis (terisolir dan terpencil) dan non-geografis (a.l. minimnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial-ekonomi) yang umumnya ditemukan di wilayah perbatasan, mengakibatkan pendapatan (input) yang diperoleh masyarakat tidak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan hal ini membawa implikasi pada rendahnya kondisi sosial-demografi penduduk (output). Dengan dasar pertimbangan tersebut, wilayah perbatasan ditetapkan sebagai daerah penelitian karena memiliki relevansi yang kuat dengan topik penelitian ini yang berfokus pada isu kemiskinan dari sudut pandang sosial demografi.

Kajian mengenai masalah kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar mendasarkan analisisnya pada perhitungan ekonomi. Hasil pengukuran ekonomi kurang dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai situasi kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan memiliki beragam dimensi yang tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba merumuskan indeks kemiskinan sosial-demografi sebagai pelengkap dari beragam pengukuran kemiskinan yang sudah ada. Penelitian di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur yang diselenggarakan tahun 2007 ini, merupakan tahun kedua dari rangkaian penelitian di wilayah perbatasan selama kurun waktu 3

tahun, sepenuhnya dibiayai oleh dana DIPA. Dengan berhasilnya penelitian ini merumuskan indeks kemiskinan dari perspektif sosial-demografi, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Penelitian ini terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan sehingga tersusunnya laporan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya masyarakat di daerah penelitian, yang telah meluangkan waktu memberikan informasi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada instansi pemerintah dan segenap jajarannya, yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Kepada staf peneliti yang telah menyelesaikan penelitian dengan baik, juga diucapkan selamat. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan penelitian ini walaupun peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin menghasilkan karya terbaik mereka. Untuk itu, kritik dan saran membangun demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas laporan penelitian ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2007
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PPK-LIPI)

Dr. Ir. Aswatini, APU
NIP: 320003450

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
DAFTAR PETA.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup.....	5
1.3. Kerangka Pikir	10
1.4. Sumber Data dan Metode Penelitian.....	15
1.5. Organisasi Penulisan	15
BAB II KONSEP DAN PENGUKURAN KEMISKINAN SOSIAL DEMOGRAFI.....	17
2.1. Konsep Kemiskinan Sosial Demografi	17
2.2. Pengukuran Kemiskinan Sosial Demografi ..	40
BAB III WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	51
3.1. Kondisi Fisik Daerah	51
3.2. Kondisi Kependudukan.....	76
BAB IV WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA	85
4.1. Kondisi Fisik Daerah	85
4.2. Kondisi Kependudukan.....	106
	vii

4.3. Kondisi Sosial Demografi di Tingkat Rumah Tangga.....	114
BAB V INDEKS KEMISKINAN SOSIAL DEMOGRAFI	125
5.1. Indeks kemiskinan Sosial Demografi: Kasus Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.....	126
5.2. Indeks Kemiskinan Sosial Demografi: Kasus Tiga Desa (Nanedakele,Nusa, dan Bukide) di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara	140
BAB VI PENUTUP	157
LAMPIRAN.....	163
DAFTAR PUSTAKA	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Coefficients(a) untuk Kabupaten Nunukan.....	43
Tabel 2.2.	Coefficients(a) untuk Kabupaten Sangihe	44
Tabel 2.3.	Nilai cutting point dan pembakuan variabel sosial demografi	46
Tabel 3.1.	Sarana Ekonomi Desa di Kecamatan Sebatik, 2005	56
Tabel 3.2.	Sarana Jalan di Kecamatan Sebatik (m)	60
Tabel 3.3.	Sarana Sekolah Dasar dan Menengah di Kecamatan Sebatik, 2005.....	63
Tabel 3.4.	Jumlah Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2005.....	66
Tabel 3.5.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2005.....	67
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nunukan Tahun 2004.....	78
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Sebatik Tahun 2004.....	79
Tabel 3.8.	Data Jumlah Siswa TK, SD, SMP, SMU, SMK Di Kecamatan Sebatik Tahun 2005	84
Tabel 4.1.	Jumlah Prasarana Pendidikan dan Rasio Murid Guru, Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 2004.....	90

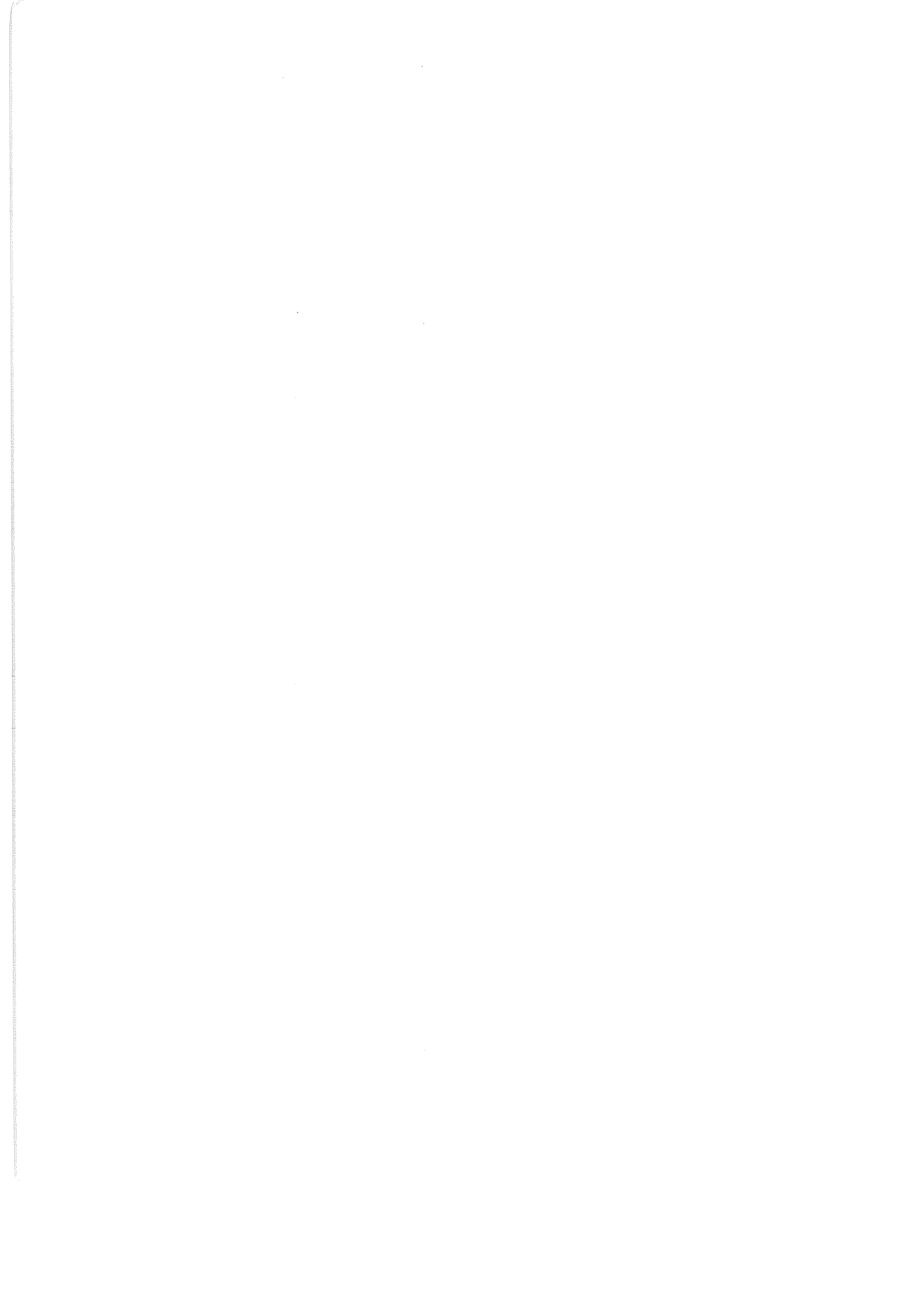
Tabel 4.2.	Jumlah Prasarana Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2004.....	93
Tabel 4.3.	Prasarana Industri, Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi, Kabupaten Sangihe, Tahun 2004	95
Tabel 4.4.	Distribusi Luas Hutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004.....	102
Tabel 4.5.	Distribusi Luas Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004.....	103
Tabel 4.6.	Jumlah, Distribusi, dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 1990, 2000 dan 2005	107
Tabel 4.7.	Pola Migrasi Seumur Hidup Sangihe-Talud Dari dan Ke Kota/Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara.....	109
Tabel 4.8.	Tingkat Migrasi Seumur Hidup di Kabupaten Sangihe-Talud Menurut Jenis Kelamin	110
Tabel 4.9.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 2004.....	111
Tabel 4.10.	Ijazah Terakhir Yang Dimiliki Penduduk Usia 10 Tahun Keatas.....	112
Tabel 4.11.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Desa Nandedakele, Nusa dan Bukide, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2007.....	115
Tabel 4.12.	Distribusi RT berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Bentuk Keluarga, Desa Nandedakele, Nusa dan Bukide, Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	116

Tabel 4.13.	Distribusi RT berdasarkan Tipe Keluarga dan Jumlah ART	117
Tabel 4.14.	Distribusi Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin.....	121
Tabel 4.15.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Umur 7 Tahun Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin	122
Tabel 5.1.	Distribusi persentase rumah tangga berdasarkan jumlah anggota rumah tangga, kalimantan Timur, 2007	127
Tabel 5.2.	Hasil regresi linier antara variabel jumlah anggota rumah tangga (variabel terikat) dengan beberapa variabel sosial demografi (variabel bebas)	129
Tabel 5.3.	Nilai pembakuan untuk <i>cutting point</i> tiap indikator	132
Tabel 5.4.	Distribusi Rumah Tangga sampel di daerah penelitian di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur berdasarkan kondisi kemiskinan sosial demografi.	134
Tabel 5.5.	Kelompok Rumah Tangga Menurut Kemiskinan Sosial Demografi dan Pengeluaran, Desa Sungai Pancang dan Sungai Nyamuk, Nunukan, Kalimantan Timur (%).....	138
Tabel 5.6.	Hasil Regresi Linier Antara <i>Dependent Variable</i> (Jumlah ART) Dengan <i>Independent Variables</i>	142
Tabel 5.7.	Nilai cut-off-point/indikator yang akan dibakukan, Minimum&Maksimum Indikator Sosial-Demografi, Batas Bawah&Batas Atas	

	Daftar Konversi, dan Nilai Pembakuan, Sulawesi Utara	145
Tabel 5.8.	Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kemiskinan Sosial-Demografi dan Kemiskinan Pengeluaran, Kecamatan Nusa Tabukan-Sangihe, Sulawesi Utara, 2007 (%), N= 341	153

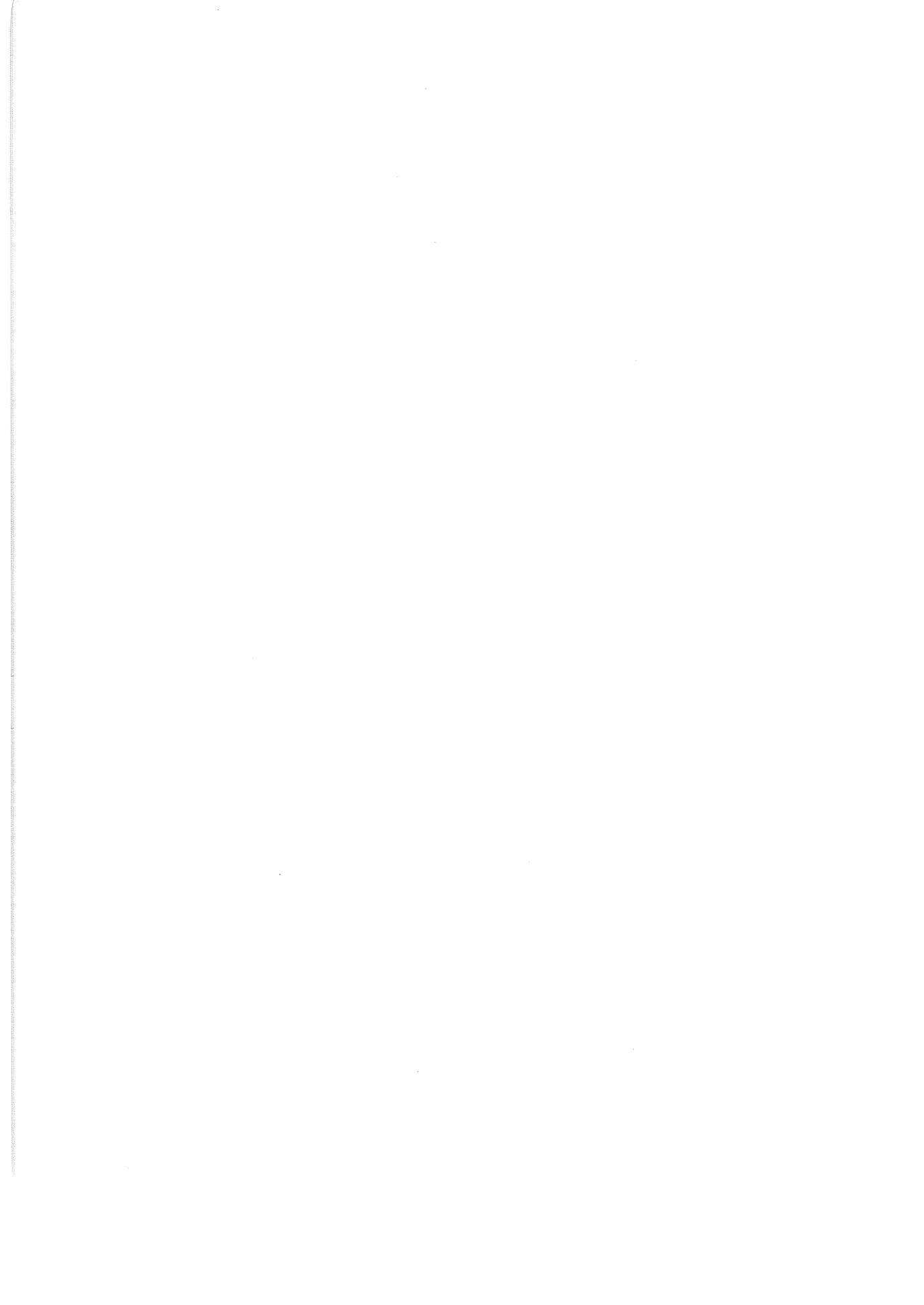
DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1. Distribusi Rumah Tangga Sampel menurut Status Kemiskinan Sosial Demografi, Desa Nandedakele-Nusa-Bukide, Sangihe.....	147
Diagram 5.2. Distribusi Rumah Tangga Sampel menurut Status Kemiskinan Sosial Demografi, Kecamatan Nusa Tabukan-Sangihe, Sulawesi Utara, 2007	150



DAFTAR PETA

Peta 1.	Peta Perbatasan Kalimantan Timur – Negara Bagian Sabah.....	53
Peta 2.	Perbatasan Sulawesi Utara – Filipina	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks. Memahami persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah kependudukan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat secara tidak langsung telah memicu terjadinya kemiskinan terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing. Di beberapa daerah/wilayah perbatasan, persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks, antara lain karena persebaran penduduk yang tidak merata, diperparah lagi dengan potensi sumberdaya manusia maupun alam yang belum dikelola secara optimal. Fenomena ini menuntut perhatian lebih serius karena fakta menunjukkan pembangunan belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yang memadai. Penduduk miskin bahkan memperlihatkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Berbicara mengenai persoalan kemiskinan tidak dapat terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Hampir semua pendekatan untuk mengkaji kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kemiskinan. Sejak saat itu pendekatan tersebut senantiasa dirujuk apabila berbicara masalah kemiskinan. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan/pengeluaran sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan (Suryawati, 2005). Padahal isu kemiskinan tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan beragam dimensi non-ekonomi lainnya.

Apabila merujuk pada konsep kemiskinan yang tercantum dalam The Platform for Action dan Deklarasi Beijing¹, maka dapat dipahami bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lainnya seperti dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Suryawati, 2005; Tokalau, 2007). Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai faktor penyebab timbulnya berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Demikian pula dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) mencantumkan target-target untuk melihat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan di luar dimensi pendapatan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pengukuran kemiskinan yang bersifat multidimensional, yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks, baik dari segi sosial, budaya, demografik, geografik yang sangat bervariasi di Indonesia.

Pengukuran kemiskinan yang hanya mendasarkan pada dimensi ekonomi (seperti pengeluaran sebagai proksi variabel pendapatan) kurang dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kesejahteraan masyarakat suatu daerah, karena hanya melihat dari sisi input saja dan tidak melihat sisi output yang terefleksi dari variabel sosial-demografi, seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kriteria kemiskinan yang mendasarkan pada variabel ekonomi (pengeluaran) yang merujuk pada konsumsi makanan dan bukan makanan, sangat sensitif terhadap fluktuasi harga-harga komoditi dasar yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah, dengan demikian pengukuran kemiskinan

¹ Definisi kemiskinan berdasarkan yang tercantum dalam The Platform for Action dan Deklarasi Beijing adalah sebagai berikut: "*Poverty has various manifestation, including lack of income and productive resources sufficient to ensure a sustainable livelihood; hunger and malnutrition, ill health; limited or lack of access to education and other basic services; increasing morbidity and mortality from illness; and social discrimination and exclusion*".

berdasarkan variabel pengeluaran tidak mudah diamati dan diukur (Irawan dan Romdiati, 2000:196).

Penelitian yang dilakukan oleh tim Perbatasan PPK-LIPI sejak tahun 2006 telah mencoba mengembangkan suatu pengukuran kemiskinan yang relatif mudah untuk memperoleh datanya dan diperbandingkan antar rumah tangga maupun wilayah, yakni pengukuran kemiskinan yang mengkombinasikan sejumlah faktor demografik dan sosial. Diharapkan dengan terwujudnya pengukuran dari perspektif sosial demografi ini dapat melengkapi beragam pengukuran kemiskinan yang sudah ada sebelumnya dari berbagai dimensi lainnya. Melalui pengukuran kemiskinan dengan menggunakan variabel non ekonomi ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena kemiskinan secara nyata/riil. Karena tingkat pendapatan yang tinggi tidak senantiasa mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Pengalaman empiris menunjukkan rumahtangga yang dari ukuran ekonomi tergolong mampu, namun dari ukuran sosial demografinya tidak menunjukkan kondisi sejahtera. Hasil penelitian Penduduk dan Kemiskinan tahun 2006 di Desa Sungai Pancang, Kabupaten Nunukan dan di Desa Nandedekele, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menunjukkan sebagian besar rumahtangga memiliki ART dengan tingkat pendidikan rendah, padahal bila mendasarkan pada ukuran ekonomi (dihitung dari pengeluaran sebagai proksi pendapatan), hampir separuh rumahtangga tersebut tergolong mampu/tidak miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPK-LIPI melalui penelitian di dua wilayah perbatasan, berupaya merumuskan suatu indeks kemiskinan berdasarkan variabel sosial demografi untuk memperkaya/melengkapi gambaran dan pemahaman kemiskinan secara lebih komprehensif. Daerah penelitian difokuskan di wilayah perbatasan dengan alasan wilayah perbatasan cenderung memiliki persoalan kemiskinan lebih serius dibandingkan dengan wilayah non-perbatasan. Hal ini antara lain karena penduduk di wilayah perbatasan pada umumnya belum mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal karena keterisolasian fisik yang menyebabkan keterbatasan 'pasar' dan kegiatan ekonomi. Selain itu, keterisolasian

daerah juga mempengaruhi keterbatasan dan akses terhadap sarana-prasarana sosial-ekonomi.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa berbagai aspek pembangunan tidak dapat diselenggarakan secara optimal serta sulitnya memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera. Rendahnya daya jangkau terhadap fasilitas kesehatan akan berdampak pada status kesehatan dan gizi penduduk, wanita dan anak-anak dari keluarga miskin. Demikian pula dengan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana dibidang tersebut menyebabkan kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah (Bappenas, 2004:22)². Sebagai daerah transit yang berbatasan dengan negara lain dan sarat dengan beragam persoalan sosial, ekonomi dan politik, akan membawa pengaruh yang besar terhadap kondisi sosial demografi penduduk.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian yang menginjak tahun kedua ini dari rangkaian tiga tahun penelitian secara umum bertujuan untuk menentukan indikator serta merumuskan indeks kemiskinan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang mengacu pada kondisi sosial demografi rumah tangga. Dalam kurun waktu 3 tahun penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

² Berdasarkan hasil survey (2006) pada tingkat individu di Desa Sungai Pancang, Kabupaten Nunukan, juga menunjukkan fenomena rendahnya kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah sebagai berikut: persentase penduduk yang belum tamat SD adalah 41,0 persen, persentase penduduk yang masih duduk di bangku SD sebesar 38,1 persen, sementara jumlah penduduk yang duduk di bangku SMP dan SMA adalah sebesar 20,4 persen. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di kalangan masyarakat Desa Sungai Pancang masih tergolong rendah, karena untuk lulusan diploma atau strata masih jarang ditemui. Dapat diasumsikan bahwa kebutuhan akan pendidikan tidak terlalu diprioritaskan. Selain itu ada keterkaitan juga dengan budaya bekerja pada usia anak sekolah yang banyak ditemui di lokasi penelitian. Fenomena yang sama juga ditemukan di Desa Nandedakele, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memperlihatkan sebagian besar penduduknya hanya lulusan SD saja (laporan penelitian PKK-LIPI, 2006, belum diterbitkan).

1. Mengidentifikasi indikator kemiskinan dari perspektif sosial-demografi di wilayah perbatasan.
2. Mengkaji faktor penyebab dan proses terjadinya kemiskinan di daerah perbatasan.
3. Merumuskan konsep dan pengukuran indeks kemiskinan rumahtangga dari perspektif sosial demografi di wilayah perbatasan.
4. Mereview kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan.

Secara khusus tujuan penelitian di tahun 2007 ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman tentang kondisi kemiskinan dari perspektif sosial demografi di wilayah perbatasan.
2. Merumuskan konsep dan pengukuran indeks kemiskinan rumahtangga dari perspektif sosial demografi di wilayah perbatasan.
3. Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara kemiskinan sosial demografi dengan kemiskinan pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) di tingkat rumah tangga, di wilayah perbatasan.

1.2. Ruang Lingkup

1.2.1. *Substansi*

Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan terdapat beragam pengukuran³ untuk mengidentifikasi kedalaman dan

³ Pengukuran kemiskinan seringkali dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan. Standar hidup adalah suatu konsep dasar yang umumnya digunakan untuk menentukan garis kemiskinan, yang mencakup kebutuhan dasar baik yang dikonsumsi individu (dimensi pangan) maupun semua kegiatan yang dilakukannya (dimensi non pangan). Dengan menetapkan tingkat pemenuhan minimum untuk semua kebutuhan dasar yang berbeda-beda tersebut ditentukanlah garis kemiskinan. Apabila seseorang tidak dapat mencapai tingkatan yang cukup untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar, dikelompokkan sebagai orang miskin. BPS

keparahan tingkat kemiskinan. Kemiskinan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bersifat multidimensional karena tidak hanya terbatas pada persoalan materi (antara lain diukur dari pengeluaran sebagai proksi pendapatan), namun kemiskinan seperti yang diidentifikasi oleh Sen (dalam Bernstein, 2002:32) dapat diartikan sebagai kondisi tercabutnya/ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), gizi, pekerjaan, termasuk untuk berpartisipasi dalam hal politik.

Dalam konteks penelitian ini, pengukuran kemiskinan menggunakan dimensi sosial demografi, dimana variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tidak saja terdiri dari komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi tetapi juga melibatkan komponen non-demografi lainnya, seperti faktor sosial dan budaya. Beberapa penelitian lainnya menyertakan faktor ekonomi ke dalam komponen non-demografi tersebut, namun dalam konteks penelitian ini faktor ekonomi tidak disertakan ke dalam komponen non-demografi atau sosial tersebut.

Beberapa studi sebelumnya sudah pernah mencoba mengembangkan pengukuran kemiskinan dari dimensi sosial-demografi, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Anderson dkk. (2006). Menurut hasil studi empiris yang dilakukan oleh Anderson dkk. tersebut, garis kemiskinan yang banyak digunakan sebagai ukuran kemiskinan memiliki keterbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Anderson dkk. mengembangkan *socio demographic risk index* dengan indikator pendapatan keluarga, struktur keluarga, pendidikan orang tua, besaran rumah tangga dan kepemilikan rumah, yang mana ditengarai memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi kesejahteraan anak (sumber: <http://cat.insist.fr/?aModel=afficheN&cpsidt=17462033>).

menggunakan pendekatan *basic needs* untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan PPK-LIPI di Provinsi NTT dan Lampung (2003-2006) melihat hubungan antara ketahanan pangan dengan kemiskinan untuk masuk pada pengukuran tingkat kemiskinan rumah tangga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rumahtangga miskin cenderung tidak tahan pangan.

Penelitian ini juga berupaya membuat suatu indeks kemiskinan berbasis sosial-demografi seperti halnya yang pernah dikembangkan dalam studi Anderson dkk. tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka komponen utama demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) dan juga variabel turunan dari komponen utama seperti: jumlah ART, usia perkawinan pertama KRT perempuan, kepala rumah tangga perempuan, lama sekolah, pekerja anak dan jenis pekerjaan, menjadi variabel-variabel yang menentukan dalam pengukuran kemiskinan.

1.2.2. Konsep dan definisi kerja

Wilayah perbatasan: mengacu pada batas administrasi wilayah kabupaten, termasuk pulau-pulau kecil terluar, yang berbatasan dan berhadapan langsung secara geografis dengan negara lain di wilayah darat, laut atau udara. Indonesia mempunyai kawasan yang berbatasan dengan sepuluh (10) negara, baik wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste.

Kemiskinan sosial-demografis: merujuk pada suatu kondisi dimana rumah tangga memiliki keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan secara kuantitas dapat ditinjau dari angka kelahiran dan migrasi sedangkan rasio ketergantungan, kematian bayi dan balita, usia perkawinan pertama ART perempuan, kepala rumah tangga perempuan, lama sekolah dan pekerja anak, merupakan cerminan dari aspek kualitas.

Indeks kemiskinan sosial demografis: satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yang dihitung berdasarkan indikator komposit sosial demografis seperti fertilitas, mortalitas bayi dan balita, migrasi keluar ART dewasa, rasio ketergantungan, umur

perkawinan pertama ART perempuan, kepala rumahtangga perempuan, pendidikan, pekerja anak.

1.2.3. Pemilihan lokasi penelitian

Penelitian ini berlangsung di dua daerah perbatasan, salah satunya terletak di Kabupaten Nunukan yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang wilayah utara Indonesia yang berbatasan dengan negara Malaysia dan negara Filipina. Posisi kabupaten ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sabah Malaysia, yaitu Tawau di bagian utara. Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Sebatik. Daerah perbatasan lainnya yang menjadi lokasi penelitian termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu di Kecamatan Nusa Tabukan. Kabupaten tersebut merupakan salah satu wilayah perbatasan di bagian utara Indonesia dan termasuk satu dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.

Pemilihan daerah penelitian dilandasi beberapa alasan, sebagai berikut:

- Dilihat dari tipologi wilayah, kawasan perbatasan di Kalimantan Timur terbagi kedalam dua tipe yaitu wilayah daratan dan perairan, dengan demikian memiliki batas darat dan laut dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan Kalimantan Timur tersebut terletak di sepanjang wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia Bagian Timur (Sabah dan Serawak). Sementara wilayah perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara menurut tipologinya termasuk wilayah kepulauan (memiliki batas laut dengan negara Filipina). Wilayah Kepulauan Sangihe mempunyai luas daratan 1.013 km² dan luas lautan 19.250 km². Dengan kata lain wilayah tersebut merupakan wilayah maritim karena 95 persen luas wilayah adalah lautan (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005). Perbedaan karakteristik wilayah antar kedua

kawasan perbatasan tersebut kemungkinan akan memunculkan persoalan kependudukan dan kemiskinan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

- Proporsi penduduk miskin di kedua kabupaten ini juga relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi. Di Kabupaten Nunukan tercatat 40,14 persen penduduk miskin, sementara di tingkat provinsi proporsinya 19,7 persen pada tahun 2000 (SMERU 2004). Meskipun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Malinau (46,72 persen; SMERU 2004) yang juga merupakan kabupaten perbatasan di Kalimantan Timur, tetapi Kabupaten Malinau hanya mempunyai wilayah perbatasan darat. Sementara Nunukan mempunyai wilayah perbatasan darat dan laut. Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 36,07 persen (SMERU, 2004)⁴, sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara adalah 15,8 persen pada tahun 2000 (BPS, 2004).
- Selanjutnya menurut hasil survey tahun 2006 memperlihatkan bahwa kondisi sosial demografi penduduk di kedua daerah perbatasan tersebut relatif memprihatinkan. Dari tingkat pendidikan misalnya, hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar KRT di Desa Sungai Pancang, Nunukan, berpendidikan rendah (SD ke bawah). Hanya sekitar 10 persen yang menamatkan pendidikan setingkat SLTA ke atas. Kualitas pendidikan di Desa Nandedakele, Sangihe, lebih memprihatinkan lagi karena 90 persen KRT berpendidikan SD ke bawah.

⁴ Menurut hasil pendataan BKKBN, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tahun 2004, dari total KK 54.186, keluarga prasejahtera tercatat sebanyak 15.918 keluarga dengan perincian keluarga prasejahtera alasan ekonomi sebanyak 13.890 keluarga (25,63 %) dan keluarga prasejahtera bukan alasan ekonomi sebanyak 2.028 keluarga (3,74 %). Sementara untuk KS tahap I, total sebanyak 12.169 orang dengan perincian KS tahap I alasan ekonomi sebanyak 8.091 keluarga (14,93 %) dan bukan alasan ekonomi sebanyak 4.78 keluarga (7,53 %). Untuk KS tahap II sampai dengan KS tahap III Plus tercatat sebanyak 26.099 (48,17 %). Dibandingkan dengan tahun 2003, penduduk miskin meningkat sebesar 4,77 % pada tahun 2004.

Selanjutnya dari segi kesehatan, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan angka kematian anak balita (CMR) mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 0,34 per 1000 balita pada tahun 2001 menjadi 0,56 per 1000 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 naik menjadi 0,95 per 1000. Adapun angka kematian ibu saat melahirkan (MMR), juga menunjukkan fluktuasi. Dalam kurun waktu tahun 2000-2005 angka kematian ibu waktu melahirkan telah mengalami peningkatan.

Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah di Desa Nanedakele, Desa Nusa dan Desa Bukide, Kecamatan Nusa Tabukan. Sedangkan di Kabupaten Nunukan, daerah penelitian berada di Desa Sungai Pancang dan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik.

1.3. Kerangka Pikir

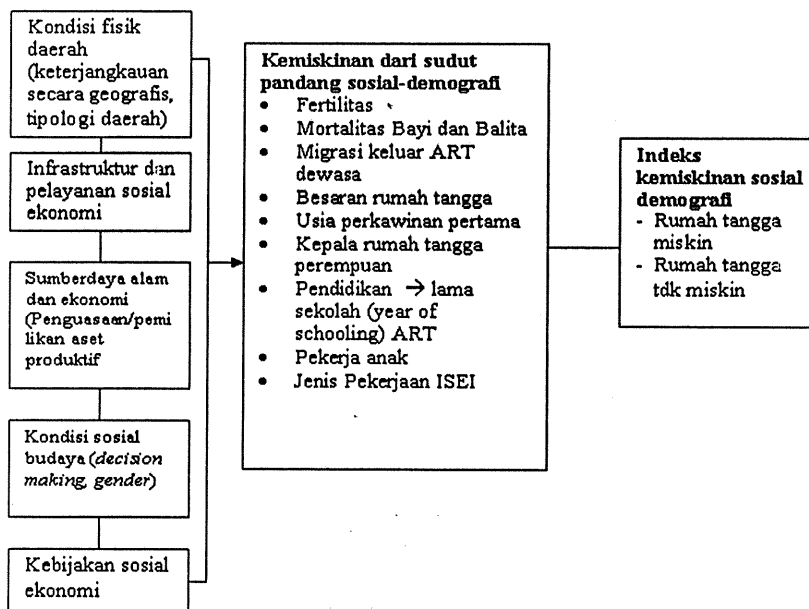
Penelitian ini berupaya mengembangkan suatu indeks kemiskinan berbasis sosial-demografi. Oleh karena itu yang menjadi variabel tergantung (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah variabel-variabel sosial demografi, yang tidak saja mencakup komponen utama demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) tetapi juga variabel turunan dari komponen utama seperti: jumlah anggota rumah tangga (ART), usia perkawinan pertama, kepala rumah tangga perempuan, lama sekolah, pekerja anak dan jenis pekerjaan. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa variabel-variabel tersebut mengandung sejumlah faktor demografik dan sosial sehingga dengan menggunakan kombinasi keduanya diharapkan dapat secara lebih komprehensif memberikan gambaran tentang fenomena kemiskinan yang bersifat multidimensional tersebut. Selain itu hasil pengukuran kemiskinan sosial demografi relatif lebih stabil dibandingkan dengan hasil pengukuran kemiskinan secara ekonomi yang sangat fluktuatif tergantung dari harga komoditi pasar.

Ditengarai variabel tergantung mendapat pengaruh dari berbagai faktor eksternal yaitu kondisi fisik daerah, infrastruktur dan pelayanan sosial ekonomi, sumberdaya alam dan ekonomi, sosial budaya dan kebijakan sosial ekonomi, yang dalam konteks penelitian ini ditetapkan sebagai variabel bebas (*independent variabel*). Penelitian ini disamping bertujuan merumuskan indeks kemiskinan sosial demografi juga berupaya mengkaji faktor-faktor eksternal yang diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi kemiskinan sosial demografi di tingkat rumah tangga.

Faktor penyebab yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga yang terukur dari variabel sosial demografi, dapat dikatakan multikompleks⁵. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun disebabkan oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling berhubungan/mempengaruhi, misalnya, tinggi atau rendahnya tingkat fertilitas, erat kaitannya dengan faktor sosial, budaya maupun ekonomi. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena peningkatan/penurunan fertilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *sex preference*, pendapatan, usia perkawinan perempuan yang pertama kali dan relasi gender dalam rumah tangga (<http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2906903.html>). Sebagai kelanjutan dari meningkatnya fertilitas, dapat mengakibatkan bertambahnya kemiskinan absolut karena melambatnya pertumbuhan ekonomi (Bernstein, 2002:31-48). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka analisis di bawah ini:

⁵ Dawam Rahardjo (Jamasy, 2004:37) menyebutkan ada tujuh faktor penyebab kemiskinan yang saling berkaitan: 1) Tidak mempunyai pekerjaan; 2). Upah gaji di bawah standar minimum; 3). Produktivitas kerja rendah; 4). Ketiadaan aset; 5). Diskriminasi; 6). Tekanan harga; 7). Penjualan tanah. Sedangkan Smeru (2004) mengelompokkan faktor penyebab kemiskinan ke dalam 6 kategori, yaitu ketidakberdayaan, keterisolasian, kemiskinan materi, kelemahan fisik, kerentanan dan sikap/perilaku.

Skema 1. Kerangka Analisis: Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan



Untuk kepentingan penyusunan indeks kemiskinan sosial demografi, dilakukan pengukuran kemiskinan berdasarkan sejumlah variabel sosial demografi yang mana dalam pengukurannya mendasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

Fertilitas : mengacu pada jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga

Mortalitas bayi dan balita: jumlah bayi dan balita yang meninggal dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Migrasi keluar : jumlah anggota rumah tangga usia dewasa usia 15 tahun ke atas yang pernah/sedang bepergian ke luar Kabupaten Nunukan/Sangihe dalam waktu satu tahun terakhir.

Besaran rumah tangga: dilihat dari jumlah anggota rumah tangga yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga dan masih terdaftar di dalam kartu keluarga serta makan dari satu dapur.

Usia perkawinan pertama : merujuk pada usia pada saat kawin yang pertama kali, terutama untuk perempuan.

Kepala rumah tangga perempuan: Konsep kepala rumah tangga perempuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan/istri oleh karena tidak ada suami atau laki-laki dewasa dalam rumah tangga tersebut sebab meninggal atau pergi untuk jangka waktu lama (misalnya bermigrasi untuk bekerja/mencari kerja).

Pendidikan/ lama sekolah : mengacu pada perbandingan antara lama sekolah untuk seluruh ART dengan jumlah ART usia 7 tahun ke atas.

Pekerja anak : mengacu pada ada/tidaknya anak yang bekerja. Dalam konteks penelitian ini, batasan yang digunakan untuk mengelompokkan pekerja anak adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun yang bekerja (sesuai dengan konvensi ILO tentang batasan umur pekerja anak). Termasuk pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja meskipun berstatus sekolah.

Jenis pekerjaan ISEI: nilai yang diperoleh dari perbandingan antara total nilai jenis pekerjaan (yang telah diberi bobot/nilai berdasarkan standar perhitungan ISEI) dari semua ART yang bekerja dengan jumlah ART yang bekerja.

Dari beberapa variabel tergantung sosial demografi tersebut, kemudian ditetapkan satu variabel yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mencari nilai dari masing-masing variabel sosial demografi yang signifikan dengan menggunakan metode interpolasi. Variabel jumlah anggota rumah tangga menjadi tolok ukur dalam penentuan

cutting point dengan alasan variabel tersebut merupakan/termasuk komponen utama dari demografi, relatif mudah untuk mendapatkan datanya dan memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Berdasarkan konsep kemiskinan jumlah anggota rumah tangga maka rumah tangga dikelompokkan miskin apabila jumlah atau besaran anggota rumah tangga > 4 orang atau lebih. Selanjutnya, rumah tangga dikategorikan tidak miskin bila jumlah anggota rumah tangganya sebesar 4 atau kurang.

Eratnya keterkaitan antara jumlah anggota rumah tangga dengan kemiskinan diindikasikan dari berbagai macam studi empiris yang menunjukkan bahwa di banyak negara sedang berkembang, semakin besar jumlah anggota rumah tangga semakin tinggi angka insiden kemiskinannya. Lebih lanjut penjelasan mengenai dasar penetapan jumlah anggota rumah tangga sebagai tolok ukur dalam penentuan *cutting point* kemiskinan sosial demografi, terdapat pada Bab II.

Indeks kemiskinan sosial demografi yang menjadi salah satu tujuan untuk dirumuskan dalam penelitian ini merupakan satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yang dihitung berdasarkan indikator komposit sosial demografi. Untuk mendapatkan indeks kemiskinan tersebut melalui serangkaian tahapan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab II. Dengan ditetapkannya nilai indeks kemiskinan sosial demografi tersebut dapat diketahui persentase rumah tangga yang tergolong miskin maupun tidak miskin. Nilai indeks kemiskinan sosial demografi yang diperoleh tidak dapat diperbandingkan antara ke dua daerah penelitian karena variabel-variabel yang memiliki nilai signifikan dengan kemiskinan, berbeda untuk tiap-tiap daerah tersebut. Dengan demikian nilai indeks kemiskinan tersebut hanya dapat digunakan untuk mengindikasikan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah penelitian saja, tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wilayah.

1.4. Sumber Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik penelitian survei. Survei dilakukan dengan melakukan interview terhadap 400 rumah tangga (target responden) yang dipilih secara *stratified systematic random sampling*. Responden dalam survei ini adalah kepala keluarga atau anggota rumah tangga dewasa yang mengetahui kondisi rumah tangga. Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif melalui beberapa teknik seperti wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara), observasi dan *desk review*. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci atau nara sumber yang terpilih. Penjelasan analisis kuantitatif dikombinasikan dengan analisis yang berdasarkan pada data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai faktor yang berhubungan erat dengan kondisi kemiskinan ditinjau dari perspektif sosial-demografi.

Untuk menunjang hasil-hasil penelitian di lapangan, dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya, salah satunya, merupakan sumber informasi yang bermanfaat untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, berbagai data statistik dan literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan sosial kependudukan dan kemiskinan sangat menunjang penelitian ini serta keperluan analisis hasil penelitian.

1.5. Organisasi Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab II menguraikan tentang konsep dan pengukuran kemiskinan yang ditinjau dari perspektif sosial-demografi. Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep kemiskinan sosial demografi yang digunakan dalam

penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang keterkaitan/hubungan antara indikator sosial demografi yang signifikan dengan kemiskinan. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan mengenai serangkaian tahapan perhitungan statistik untuk menentukan variabel sosial demografi yang memiliki signifikansi dengan variabel tergantung, kemudian menentukan *cutting point* untuk merumuskan indeks kemiskinan. Bab III menguraikan tentang wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Kajian dibedakan ke dalam tiga bagian yaitu bagian pertama menguraikan mengenai kondisi fisik daerah (dibedakan menurut tingkat kabupaten – tingkat kecamatan/desa), kemudian bagian kedua berisi uraian tentang kondisi kependudukan dan bagian terakhir membahas tentang kondisi sosial demografi di tingkat rumah tangga berdasarkan hasil survey, dimana dalam analisa didudukkan dalam konteks makro (tingkat kecamatan/desa). Bab IV, topik pembahasan sama dengan Bab III, namun untuk wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Bab V memfokuskan pada pembahasan tentang indeks kemiskinan dari perspektif sosial-demografi. Dalam sub bab pertama dijelaskan mengenai arti dan pemahaman dari nilai indeks kemiskinan sosial demografi diperkuat dengan informasi kualitatif. Sementara sub bab kedua menguraikan hasil pengukuran kemiskinan menurut perspektif ekonomi dengan menggunakan standar BPS. Untuk memperkaya pemahaman mengenai indeks kemiskinan dari dimensi sosial demografi maka dalam kajian dilakukan perbandingan antara pengukuran kemiskinan sosial demografi dengan pengukuran kemiskinan berdasarkan ekonomi/pengeluaran. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui hubungan antara kedua pengukuran yang berbeda perspektif tersebut. Bab VI yang merupakan bab Penutup mengulas dan menyimpulkan beberapa temuan spesifik dari masing-masing daerah yang kemungkinan memperlihatkan fenomena yang sama sehingga dapat ditarik benang merahnya. Dalam bab ini juga dipaparkan rekomendasi untuk penyempurnaan perumusan indeks kemiskinan sosial demografi.

BAB II

KONSEP DAN PENGUKURAN KEMISKINAN SOSIAL DEMOGRAFI

2.1. Konsep Kemiskinan Sosial Demografi

Kemiskinan dapat dikaji dari berbagai dimensi. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi lainnya seperti pendidikan, kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), tingkat pemenuhan kebutuhan gizi, air dan sanitasi, lapangan kerja dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Sen, 1999 dalam Bernstein, 2002: 32). Hidup dalam kemiskinan seringkali dipahami sebagai kekurangan finansial untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan dipahami dalam konsep yang lebih luas yaitu hidup dalam kemiskinan karena adanya penurunan kemampuan dan ketidakberdayaan dalam memanfaatkan/mengakses beragam aspek diluar dimensi pendapatan/ekonomi⁶. Aspek sosial demografi yang antara lain mencakup pendidikan dan pekerjaan, besaran rumah tangga, kelahiran, kematian bayi – balita, migrasi dan status perempuan dalam rumah tangga merupakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan kondisi kemiskinan rumah tangga diluar dimensi pendapatan karena mengindikasikan kurang terpenuhinya hak-hak dasar individu untuk dapat hidup layak. Dalam bab ini fokus pembahasan pertama, pada keterkaitan indikator-indikator tersebut dengan kemiskinan dan kedua, pada pemaparan

⁶ Chambers (seperti yang dikutip oleh Nasikun dalam Suryawati, 2005) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu 1). Kemiskinan, 2). Ketidakberdayaan, 3). Kerentanan menghadapi situasi darurat, 4). Ketergantungan dan 5). Keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

tentang tahapan statistik pembuatan indeks kemiskinan sosial demografi.

a. *Fertilitas*

Dalam pengertian demografi fertilitas adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan. Terdapat berbagai faktor yang menentukan tinggi rendahnya fertilitas, yaitu umur pada perkawinan, banyaknya perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, pengguguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi (LD-FEUI, 1980). Sebagian menyebutkan bahwa tempat tinggal juga memiliki keterkaitan erat dengan perilaku fertilitas, di samping pendidikan wanita (Schoumaker 2004). Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan angka fertilitas dan dalam konteks penelitian ini angka fertilitas didapatkan dari jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh istri/KRT perempuan.

Sudah banyak studi yang dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara fertilitas dengan kemiskinan. Kecenderungannya dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Asia, fertilitas cenderung lebih tinggi pada penduduk miskin⁷. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Schoumaker (2004) di 25 negara di Afrika, menunjukkan kecenderungan yang sama bahwa pada umumnya wanita yang miskin memiliki anak banyak, menikah di usia muda dan relatif sedikit yang menggunakan metode kontrasepsi. Tingginya tingkat fertilitas dikalangan penduduk miskin menurut pendekatan ekonomi (antara lain digunakan dalam teori Caldwell dan Birdsall) merupakan suatu respon yang rasional dalam menyikapi kondisi kemiskinan. Keuntungan memiliki anak melebihi investasi yang harus dikeluarkan untuk membiayai kehidupan (pendidikan, kesehatan) mereka, sehingga ada permintaan yang tinggi untuk memiliki jumlah anak yang besar. Disamping itu adanya perasaan aman dimasa tua dengan memiliki banyak anak juga

⁷ Diambil dari <http://situs.kesrepro.info/kia/kia03.htm>

menjelaskan tingginya jumlah anak dikalangan orang miskin. Sebagai konsekuensinya fertilitas tidak akan turun diantara orang miskin kecuali ada perbaikan dalam kondisi kesejahteraan mereka.

Namun, menurut pendekatan yang berbasis pada adanya 'difusi inovasi', tingginya fertilitas dikalangan orang-orang miskin tidak mencerminkan rasional ekonomi mereka. Namun hal ini lebih disebabkan karena ide/pemahaman mengenai pembatasan/kontrol akan fertilitas, informasi tentang metode kontrasepsi belum sampai kepada orang-orang miskin tersebut. Dengan demikian menurut paham ini, penurunan fertilitas akan terjadi dikalangan orang miskin dengan adanya penyebaran ide-ide, nilai dan teknologi di kalangan masyarakat, sedangkan perbaikan status ekonomi bukan merupakan prasyarat utama untuk terjadinya penurunan fertilitas. Bukti adanya perubahan dalam fertilitas di negara-negara miskin seperti Banglades, Nepal dan Amerika Latin, mendukung pendapat yang berbasis pada difusi inovasi tersebut. Hasil penelitian dari Schoumaker (2004) tersebut di negara Afrika juga sejalan pendapat 'difusi' inovasi, bahwa disebagian negara Afrika yang sebagian besar kondisinya masih berada dalam kemiskinan, mengalami proses transisi fertilitas yang mengarah pada penurunan tingkat fertilitas dan ditengarai hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh difusi inovasi.

Hasil studi Schoumaker tersebut juga menunjukkan bahwa ada beragam hubungan antara status ekonomi dengan kemiskinan. Misalnya di Bostwana pada tahun 1970 an tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut, sebaliknya hubungan yang positif ditemukan di Sierra Leone pada tahun yang sama dan hubungan yang negatif ditemukan di Burkina Faso pada tahun 1990, dsb. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa di kebanyakan negara di Afrika, fertilitas mengalami penurunan sejalan dengan terjadinya peningkatan status ekonomi. Hasil studi dari Talnan dan Vimard (2003) seperti yang dikutip oleh Schoumaker, juga memperlihatkan adanya hubungan yang negatif antara status ekonomi dengan fertilitas, meskipun dikontrol dengan beragam variabel sosial-ekonomi. Artinya meskipun ada beragam hubungan antara kedua variabel tersebut, namun kebanyakan menunjukkan hasil yang

negatif, yaitu fertilitas pada umumnya tinggi dikalangan penduduk miskin.

Berbagai variabel (kematian anak, pendidikan wanita dan tempat tinggal) memiliki pengaruh dalam hubungan antara kemiskinan dengan tingginya fertilitas. Seperti tingginya mortalitas dikalangan orang miskin cenderung meningkatkan fertilitas melalui berbagai mekanisme, seperti atas dasar pengganti yang meninggal dan karena alasan asuransi. Tingkat pendidikan yang rendah dari wanita dikalangan orang miskin juga memiliki pengaruh pada tingginya fertilitas mereka serta terkonsentrasinya kemiskinan di daerah perdesaan juga memiliki pengaruh pada hubungan antara kemiskinan dengan fertilitas. Antara kemiskinan dengan tingginya fertilitas dapat dijelaskan dengan berbagai mekanisme yang menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Dalam konteks penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji mekanisme sebab-akibat antara kemiskinan dengan fertilitas. Namun, berdasarkan hasil review yang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara fertilitas dengan kemiskinan, maka fertilitas dapat digunakan sebagai salah satu variabel sosial demografi untuk merumuskan indeks kemiskinan berdasarkan perspektif sosial demografi.

b. *Mortalitas*

Variabel mortalitas yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kematian bayi dan balita, sepertihalnya dengan fertilitas, ditengarai memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Sudah banyak penelitian yang melihat hubungan diantara keduanya, antara lainnya penelitian dari Pena dkk (2000) berdasarkan data dari kohor kelahiran selama periode 1988 – 1993 di Leon, Nikaragua menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan absolut rumah tangga di negara-negara yang tergolong berpendapatan rendah seperti Nikaragua, memiliki keterkaitan dengan kematian bayi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 1988 – 1993, telah

terjadi 342 kematian bayi dari sejumlah 6394 bayi sehingga diperkirakan IMR mencapai 50 dari 1000 lahir hidup. Umur ibu baik muda maupun tua, paritas yang tinggi, memiliki keterkaitan dengan resiko kematian bayi. Hasil studi ini juga memperlihatkan bahwa anak laki-laki memiliki tingkat mortalitas yang tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Bayi dari seorang ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki resiko yang rendah untuk mati, akan tetapi posisi ibu dalam rumah tangga, jarak ke pelayanan kesehatan, tempat tinggal di perkotaan maupun perdesaan, secara signifikan menunjukkan tidak ada hubungannya dengan resiko kematian bayi.

Meskipun Nikaragua dalam kurun waktu tertentu memiliki IMR relatif tinggi namun sempat mengalami penurunan kasus kematian bayi secara cepat dari 120 per 1000 lahir hidup pada tahun 1966 menjadi 64 per 1000 lahir hidup di tahun 1986. Hal yang menyebabkan turunnya IMR adalah karena adanya perbaikan pada ketersediaan pelayanan kesehatan, penyebarluasan pendidikan dasar terutama untuk perempuan. Upaya ini ditujukan terutama pada kelompok masyarakat yang paling miskin. Temuan saat ini memperlihatkan bahwa penurunan IMR yang terus berlanjut sepanjang tahun 80'an meskipun terjadi perang dan kesulitan ekonomi, terutama terjadi pada anak bayi dari ibu yang tidak memiliki pendidikan formal. Faktor tingkat pendidikan ibu ditengarai memiliki pengaruh kuat terhadap kematian bayi. Pendidikan perempuan ditengarai dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari bayi dan balita, terlepas dari kondisi sosial ekonomi mereka. Tingkat pendidikan ibu sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangganya dan juga faktor lainnya seperti harga diri, kemampuan untuk mengatasi persoalan dan kompetensi untuk memobilisasi sumberdaya untuk dirinya maupun keturunannya.

Hal penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bayi dalam suatu rumah tangga yang miskin memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin. Hal yang sama juga berlaku untuk bayi yang tinggal dalam lingkungan permukiman yang buruk, memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa resiko kematian

bayi tertinggi ditemukan dalam rumah tangga miskin di lingkungan yang tergolong tidak miskin daripada dalam rumah tangga miskin di lingkungan yang tergolong miskin. Dalam rumah tangga yang tidak miskin, tanpa memperhatikan status kemiskinan lingkungan tempat tinggal, memiliki resiko kematian bayi yang rendah.

Resiko mortalitas bayi ditemukan rendah pada ibu yang berpendidikan, yaitu menunjukkan penurunan IMR yang bertahap dari 65 per 1000 kelahiran baru dalam kelompok yang tidak memiliki pendidikan formal ke 30 per 1000 bayi dari ibu yang memiliki pendidikan sekunder atau lebih. Namun ketika analisis ini distratifikasi dengan status social ekonomi, dampak positif/perindungan dari pendidikan ibu terhadap kematian bayi hanya ditemukan dalam rumah tangga miskin. Sebaliknya, tingkat pendidikan ibu rendah (pendidikan dasar atau di bawahnya) dalam rumah tangga yang tergolong tidak miskin, menunjukkan sekitar 4 persen kasus kematian bayi, sementara tingkat pendidikan rendah ibu dalam rumah tangga yang miskin menunjukkan tingkat kematian bayi sebesar 35 persen. IMR yang tertinggi, yaitu 130 dari 1000 kelahiran baru terjadi pada bayi dari ibu yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggal dalam rumah tangga miskin di lingkungan tempat tinggal yang tergolong tidak miskin. Sedangkan bayi dari ibu yang tidak memiliki pendidikan formal dalam rumah tangga miskin di lingkungan tempat tinggal yang tergolong miskin, memiliki IMR sebesar 65 per 1000.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya memiliki resiko tinggi kematian bayi. Demikian pula halnya dengan adanya ketidasetaraan social dapat meningkatkan resiko mortalitas bayi, yaitu mereka yang miskin dilingkungan yang tidak miskin, memiliki resiko tinggi akan kematian bayi. Temuan ini sejalan dengan hasil dari Negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, dimana kemiskinan relative ekonomi menjadi determinan penting untuk seluruh resiko mortalitas. Pendidikan ibu juga sudah banyak dianalisa dalam kaitannya dengan mortalitas anak dan kebanyakan studi menunjukkan adanya hubungan yang berbalik antara tingkat pendidikan ibu dengan mortalitas anak,

temuan yang juga dihasilkan dari studi ini. Kelangsungan hidup bayi bergantung pada beberapa factor yang berkaitan dengan ibu dan kemungkinan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu, misalnya kesehatan ibu, kualitas dari asupan makanan bayi, perawatan pada umumnya, sanitasi rumah tangga dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Ibu yang berpendidikan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan tersebut, termasuk pemanfaatan yang optimal akan pelayanan kesehatan preventif dan kuratif.

Pendidikan ibu memainkan peranan protektif menghadapi kematian bayi dalam rumah tangga yang miskin, hal ini diindikasikan dari rata-rata IMR 58 per 1000 lahir hidup, dibandingkan dengan rata-rata IMR 35 per 1000 lahir hidup dalam rumah tangga yang tidak miskin. Adanya hubungan antara pendidikan ibu dan mortalitas bayi, maka dengan adanya pengentasan buta huruf dan tidak berpendidikan dasar diantara para gadis dalam rumah tangga miskin akan mengurangi kematian bayi sekitar seperempat. Hal ini mengindikasikan bahwa peran protektif dari pendidikan ibu terhadap kematian bayi hanya efektif dalam situasi dimana tingkat IMR masih relative tinggi. Ibu yang berpendidikan kemungkinan memiliki keahlian untuk beradaptasi dengan lebih baik ketika menghadapi situasi sulit dimana bayinya dalam kondisi rentan menghadapi kematian dan ia lebih siap untuk meminta pertolongan/bantuan dari masyarakat manakala dibutuhkan. Sebaliknya dalam rumah tangga yang tergolong tidak miskin, pendidikan dari ibu hanya memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi anak, karena semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi.

Kesimpulan dari studi Pane dkk ini adalah ketidakadilan sosial dan juga tingkat kemiskinan absolut, meningkatkan resiko mortalitas bayi di Nikaragua dari tahun 1988 – 1993. Meskipun kebanyakan kematian bayi berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga dalam lingkungan yang miskin, namun resiko yang tertinggi dari kematian ditemukan dalam rumah tangga miskin dalam lingkungan yang tidak miskin di Nikaragua, terutama di daerah perkotaan. Dampak protektif dari tingkat pendidikan ibu hanya dapat

diamati dalam rumah tangga miskin, bukan dalam segmen masyarakat yang kaya.

Berdasarkan hasil review ini maka untuk kepentingan pengukuran kemiskinan maka variabel mortalitas bayi dan balita ini dapat digunakan untuk merumuskan indeks kemiskinan dari perseptif sosial demografi.

c. *Migrasi*

Hubungan antara migrasi dengan kemiskinan dalam beberapa tulisan dikatakan ambivalen (memiliki sifat yang bertentangan). Di satu pihak dikatakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab mendasar/akar terjadinya migrasi atau kemiskinan yang mendorong terjadinya migrasi sebagai upaya minimal untuk mempertahankan hidup. Namun di lain pihak dijelaskan bahwa migrasi justru akan memperpanjang atau yang menyebabkan kemiskinan (Skeldon, 2002⁸; Oucho, tanpa tahun). Menurut Skeldon, bagaimana mengukur dampak migrasi terhadap kemiskinan maupun kemiskinan terhadap migrasi, sangat bergantung kepada kondisi daerah dan keadaan dari proses migrasi itu sendiri. Di beberapa daerah, perpindahan penduduk merupakan faktor yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan⁹, namun di lain tempat dengan kondisi yang berbeda, migrasi justru menjadi pendorong timbulnya kemiskinan.

⁸ Ronald Skeldon, Migration and Poverty, dalam Asia-Pacific Population Journal, vol.17, no.4, December 2002.

⁹ Beberapa studi membuktikan bahwa remittance yang dikirimkan migran kepada keluarganya di pedesaan, dalam kenyataannya mampu meningkatkan taraf hidup rumah tangga migrant tersebut. Hasil studi di Thailand membuktikan sekalipun remittance yang dikirimkan relative kecil untuk keluarga yang tergolong miskin, namun dampak yang dihasilkan secara signifikan sangat luas dan membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Secara tidak langsung remittance juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Menurut pendapat Snel dan Staring migrasi merupakan suatu bentuk *coping strategi*¹⁰ sedangkan Skeldon menyebutnya sebagai suatu bentuk survival strategy untuk keluar dari kemiskinan, karena terbatasnya kesempatan kerja atau sumberdaya yang tersedia di daerah lokal/asal. Dalam hal tersebut migrasi merupakan jalan keluar untuk mempertahankan hidup¹¹. Salah satu contoh klasik hubungan antara kemiskinan dengan migrasi adalah bermigrasinya penduduk karena kelaparan. Namun, kasus semacam ini terutama ditemukan di negara bagian termiskin di dunia seperti di Afrika. Sementara di Asia, meskipun masih ditemukan di beberapa daerah 'kantong-kantong kemiskinan', tidak lagi lazim terjadi karena pesatnya pembangunan ekonomi dipertengahan abad ke-20¹². Meskipun tidak separah pengalaman di Afrika, studi di Thailand juga memperlihatkan

¹⁰ Snel dan Staring (2001) membedakan antara coping strategi dengan survival strategy dan dalam kaitannya dengan isu migrasi, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh orang/penduduk untuk mempertahankan hidup dengan cara bermigrasi. Dalam hal ini, penggunaan istilah coping strategy dianggap lebih sesuai.

¹¹ Dalam tulisannya Skeldon menguraikan (2002:72) bahwa antara kemiskinan sebagai akar penyebab dari migrasi dan migrasi sebagai akibat dari kemiskinan nampaknya memberikan pengertian yang sama namun sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan. Migrasi sebagai akibat dari kemiskinan lebih memfokuskan perasaan miskin yang sifatnya relatif dibandingkan yang lain. Dengan kata lain migrasi menciptakan suatu kondisi yang dapat mengakibatkan orang-orang merasa dirinya miskin sehingga kemudian mereka memutuskan untuk melakukan migrasi dalam upaya memuaskan aspirasinya yang baru. Proses ini kemungkinan merupakan akar dari migrasi, yang kemudian memberikan pemahaman bahwa kemiskinan merupakan kekuatan yang mendorong orang melakukan migrasi, namun dalam kenyataannya hal tersebut merupakan pengejawantahan dari keinginan untuk memperbaiki kehidupan sesuai dengan standar baru daripada akibat dari kemiskinan absolut (absolute deprivation). Migrasi dengan demikian merupakan pencipta dan produk dari kemiskinan.

¹² Kejadian di Cina pada tahun 1959-1960 dapat memberikan gambaran mengenai bermigrasinya penduduk dalam jumlah yang jutaan karena pada saat itu terjadi bencana kelaparan sehingga penduduk harus berpindah tempat untuk menemukan makanan. Hal yang sama juga terjadi di Orissa, India pada tahun 2001 (Skeldon, 2002:71).

terjadinya peningkatan mobilitas penduduk dalam jangka waktu pendek (migrasi sirkuler) karena dampak dari krisis ekonomi tahun 1997. Adanya krisis tersebut menjadi pendorong penduduk untuk melakukan migrasi karena semakin terbatasnya pasar kerja di daerah pedesaan maupun karena kehilangan pekerjaan di perkotaan. Menurut pendapat Ravenstein, seorang 'pionir' dalam hal kajian migrasi internasional, bahwa terjadinya migrasi penduduk sangat berkaitan erat dengan adanya kondisi ekonomi yang serba kurang/miskin dan juga adanya keinginan dari orang-orang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Seperti halnya dengan pengalaman di Thailand, hasil penelitian dan pengalaman di India (Nanavati, 2004) menunjukkan bahwa migrasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara desa dengan kota, dimana pembangunan sangat bias pada pusat perkotaan yang padat modal, sementara 80 % penduduk India bermukim di daerah pedesaan. Hasil dari sektor pertanian yang diharapkan dapat mencapai target sebesar 8 % untuk jangka waktu lima tahun ternyata pertumbuhannya tidak lebih dari 2 %. Sehingga seperti yang diperkirakan oleh Mukherji (dalam Nanavati 2004) arus migrasi yang pesat dari desa ke kota menjadi tidak terbendung dan hal ini berdampak pada terjadinya pemekaran penduduk diperkotaan dan munculnya permukiman-permukiman kumuh¹³.

Lebih jauh menurut Snel dan Staring¹⁴, migrasi internasional dapat dipandang sebagai salah satu bentuk '*coping strategi*' individu

¹³ Apabila di negara maju migrasi berkaitan erat dengan adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri perkotaan, maka dalam negara berkembang, seperti di India, migrasi ditandai dengan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian pedesaan ke sektor informal perkotaan. Mukherji (dalam Nanavati, 2004) mengatakan bahwa proses ini merupakan manifestasi dari pembangunan yang terbelakang, kemiskinan dan pengelolaan ekonomi spasial yang tidak terorganisasi dengan baik.

¹⁴ Snel, Erik and Richard Staring. 2001. "Poverty, migration and coping strategies: an introduction", *Focaal – European Journal of Anthropology*, no.38.

maupun rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakpastian. Bahkan diantara orang-orang nomaden dan pastoralis mobilitas sudah lama dijalankan sebagai salah satu bentuk adaptasi penduduk terhadap kondisi lingkungan. Suku Fulbe di Mali, misalnya, yang tinggal di daerah gersang harus secara konstan melakukan pergerakan/perpindahan untuk meningkatkan/memperbaiki kehidupan individu dan rumah tangga mereka.

Perilaku migrasi merupakan respons rasional yang dikembangkan penduduk atas keterbatasan yang ada di daerah asal. Tingginya arus migrasi keluar dari suatu daerah mengindikasikan adanya keterbatasan dalam hal produksi (seperti pertanian) sehingga menyebabkan penduduk harus mencari penghidupan di luar daerah. Hasil studi dari Faturochman dkk (2002:56) di Gunung Kidul menunjukkan bahwa untuk keluar dari kemiskinan, sebagian masyarakat Gunung Kidul migrasi ke luar wilayah ini, khususnya ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Pelaku migrasi pada umumnya merupakan orang-orang yang lebih miskin dibanding dengan mereka yang tidak melakukan migrasi. Mereka yang bermigrasi juga berpendidikan rendah sehingga kebanyakan dari mereka hanya mampu merebut pasar kerja pada lapisan berupah rendah. Bagi migran laki-laki kebanyakan menjadi buruh sedangkan bagi migran perempuan menjadi pembantu rumah tangga.

Berdasarkan hasil kajian/studi di berbagai negara maka migrasi dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan dari aspek sosial-demografi. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa orang/penduduk bermigrasi keluar dari daerahnya untuk mencari kerja sebagai salah satu bentuk *coping strategi* dalam mengatasi kemiskinan yang dihadapi keluarga/rumah tangganya. Keadaan kondisi daerah yang tidak kondusif juga menjadi faktor pendorong orang untuk pindah dari daerah menuju lokasi/daerah yang dianggap dapat memberikan penghasilan untuk hidup. Seperti halnya di daerah perbatasan yang umumnya merupakan daerah terpencil dan sulit dicapai bila dibandingkan dengan daerah lainnya masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan demikian, untuk

mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, maka penduduk melakukan migrasi keluar dari daerah.

d. *Besaran rumah tangga*

Beberapa studi empiris memberikan konfirmasi adanya hubungan positif antara besaran rumah tangga dan kemiskinan. Rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga (ART) banyak cenderung dicirikan sebagai rumah tangga miskin yang umumnya mempunyai anak banyak (Lusting dkk, 1988¹⁵; Uddi, 2004). Kondisi seperti ini juga ditemukan di Indonesia, seperti ditunjukkan oleh data Susenas Tahun 1999, yaitu rumah tangga miskin mempunyai rata-rata jumlah ART sebanyak 4,9 orang, atau lebih besar daripada angka untuk rumah tangga tidak miskin yang hanya 3,9 orang (Wiranto, 2006:7). Dengan demikian, besaran atau jumlah anggota rumah tangga dapat menjadi salah satu ukuran atau indikator kemiskinan rumah tangga.

Semakin banyak anggota rumah tangga, semakin berat beban rumah tangga tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga miskin tersebut, seperti halnya masalah pendidikan, kesehatan, serta keadaan kesehatan ibu terkait dengan masalah kehamilan dan kelahiran. Namun demikian, terkadang dari sudut pandang ekonomi hal ini akan berbeda. Anak yang banyak merupakan modal/aset untuk mendapatkan pendapatan bagi suatu rumah tangga kelak kalau sudah bekerja, sehingga anak yang banyak akan sangat berarti bagi kelangsungan hari tua orang tua.

Besaran/jumlah anggota rumah tangga sangat berbeda antar negara, khususnya antara negara maju dengan negara sedang

¹⁵ Nora Lusting, Nancy Birdsall, dan Monica Das Gupta, 1998. Extract from a Report from Exploratory Mission on Population and Poverty. International Union for the Scientific Study of Population. <http://www.iussp.org/Activities/scc-pov/pov-outline.php>

berkembang. Di negara berkembang jumlah rata-rata besaran rumah tangga sebesar 4.7, sementara itu di negara maju jauh lebih kecil yaitu 2.8. Akan tetapi, pengukuran untuk besaran rumah tangga miskin agak berbeda, hal ini dikarenakan kemiskinan selalu terdapat dalam jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar. Oleh karena itu, di negara berkembang diasumsikan jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin sebesar 5.2 sedangkan jumlah anggota rumah tangga miskin di negara maju sebesar 2.8. Sementara itu, secara umum rata-rata jumlah besaran rumah tangga yang dikategorikan miskin untuk di tingkat dunia sebesar 4.9 (Marcoux, 1997)¹⁶.

Hasil survei yang dilakukan di beberapa negara seperti di Nepal¹⁷, Di Thailand bagian utara¹⁸ dan di negara berkembang lainnya secara jelas memperlihatkan bahwa rumah tangga yang dikategorikan miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang besar antara 5 sampai 6 orang. Sedangkan keluarga yang dikelompokkan tidak miskin memiliki rata-rata besaran keluarga sebesar 4.6. Untuk ukuran besaran rumah tangga di Indonesia, berdasarkan hasil pendataan BPS pada tahun 1999 menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin mempunyai 4.9 anggota rumah tangga. Adapun rumah tangga tidak miskin jumlah anggota rumah tangganya lebih kecil yaitu 3.9 (Wiranto, 2006)¹⁹.

¹⁶ Alain Marcoux, 1997. *The Feminization of Poverty: Facts, Hypotheses and the Art of Advocacy*. <http://www.fao.org/sd/wpdirect/WPan0015.htm> (25/9/2006)

¹⁷ Nepal Living Standard Survey pada tahun 2003/2004 mengidentifikasi rumah tangga miskin, yang antara lain dicirikan dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari 6 atau memiliki anak lebih dari 3, penghasilan utama dari sektor pertanian, kepala rumah tangga tidak dapat membaca menulis, dan tidak memiliki tanah (Bishwa Nath Tiwari, *Myth and reality on poverty*. <http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=43239> (17/06/2005).

¹⁸ Thitiwan Scriharoen dan Gertrud Buchenrieder, 2005. *Principal Component Analysis of Poverty in Northern Thailand*. Conference on International Agricultural Research for Development, Stuttgart-Hohenheim, 11-13 Oktober 2005. <http://www.tropentag.de/2005/abstracts/full/228.pdf>. (11/10/2006)

¹⁹ Tatang Wiranto, *Profil Kemiskinan di Perdesaan*. Info URDI Vol.14. <http://www.urdi.org/urdi/> (9/10/2006)

Hasil survei ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga, suatu rumah tangga semakin rentan kondisinya terhadap kemiskinan. Demikian pula dengan meningkatnya insiden kemiskinan akan diiringi dengan meningkatnya besaran rumah tangga. Bertambahnya anak atau anggota keluarga dalam suatu rumah tangga dapat menyebabkan rumah tangga itu menjadi semakin miskin, karena akan mengurangi pendapatan orang tua, menyebabkan anak tidak dapat bersekolah terutama pada sekolah lanjutan dan berkurangnya tabungan rumah tangga (Orbeta, 2005).²⁰ Anak-anak dalam suatu keluarga yang besar akan kurang mendapatkan pendidikan dan sangat lemah dalam kemampuan intelegensia dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih kecil. Anak-anak dalam keluarga yang lebih besar ini cenderung lebih rendah daya tahan hidupnya. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan fisik anak, karena kemungkinan kurangnya kualitas pengasuhan anak sejak bayi dan kurangnya nutrisi yang baik (Merrick, 2002)²¹

Dapat dijelaskan dalam hal ini bahwa rumah tangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Sebuah keluarga dengan jumlah anak atau pengikut lainnya yang semakin besar akan lebih membutuhkan suatu tempat tinggal yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang cukup memadai semakin dirasakan sulit, karena beberapa rumah hanya menyediakan 1 dan 2 kamar tidur, sementara itu untuk menyewa tempat yang lebih besar biayanya lebih tinggi. Rata-rata besaran rumah tangga untuk orang kulit putih 2.11 orang, sementara

²⁰ Aniceto C.Orbeta Jr., 2005. Poverty, Vulnerability and Family Size: Evidence from the Philippines. ADB Institute Discussion Paper No.29, June 2005

Aniceto C.Orbeta Jr., 2006. The more the poorer: why large family size causes poverty. PIDS No.2006-06 (May 2006)

²¹ Thomas W.Merrick, 2002. Population and Poverty: New Views on an Old Controversy. International Family Planning Perspectives Volume 28, Number 1, March 2002. <http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2804102.html> (2/10/2004)

itu untuk orang kulit hitam 2.76 orang per rumah tangga, dan untuk orang-orang Asia lebih tinggi lagi sekitar 4.37 orang per rumah tangga. Jumlah keluarga yang besar pada umumnya ditemui di daerah dengan warna kulit yang sama dan dengan penghasilan yang terendah.²²

Dari berbagai kajian tentang besaran rumah tangga dan kemiskinan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa besaran rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Rumah tangga dikelompokkan miskin apabila jumlah anggota rumah tangganya terdiri dari 5 orang atau lebih. Sebaliknya rumah tangga dikategorikan tidak miskin bila jumlah anggota rumah tangganya sebesar 4 atau kurang. Semakin banyak jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga menjadi semakin miskin. Rumah tangga yang besar khususnya dengan rasio ketergantungan yang tinggi tampaknya akan semakin rentan untuk menjadi miskin (Baulch dan McCulloch, 1998)²³.

Dalam konteks penelitian ini, jumlah anggota rumah tangga digunakan untuk penetapan *cutting point* dari variabel-variabel sosial demografi yang signifikan dengan *dependent variable*. Alasan yang mendasari penetapan jumlah anggota rumah tangga sebagai tolok ukur dalam penetapan *cutting point* adalah variabel ini memiliki keterkaitan dengan kemiskinan (seperti yang diungkapkan dalam berbagai review) dan variabel ini juga dipergunakan oleh Sayogyo

²² Preparing for Investments Along the University Corridor. Income, Race & Family Structure in the University Corridor (University of Minnesota, Institute on race & poverty)
http://www.irpumn.org/website/projects/index.php?strWebAction=project_folder&intDoc... (27/6/2006)

²³ Bob Baulch dan Neil McCulloch, 1998. Being Poor and Becoming Poor: Poverty Status and Poverty Transition in Rural Pakistan. IDS Working Paper 79, Desember 1998.
http://66.102.9.104/search?q=cache:4W9BaKBOs_4J:www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp... (27/6/2006)

untuk mengelompokkan rumah tangga ke dalam kategori miskin atau tidak miskin.

e. Usia perkawinan pertama perempuan

Salah satu kesimpulan yang dikemukakan dari berbagai studi tentang perkawinan menunjukkan hubungan antara peningkatan usia perkawinan pertama dengan meningkatnya pendidikan wanita. Adanya keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menyebabkan wanita akan menunda perkawinannya. Selain pendidikan, keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi di luar rumah juga berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama. Wanita yang bekerja di rumah rumah cenderung untuk kawin pada usia yang lebih tua. Migrasi juga mempunyai keterkaitan dengan usia perkawinan wanita. Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Aceh dan Bali), yang menunjukkan bahwa wanita yang pernah melakukan migrasi menikah pada usia yang lebih tua.

Selain faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan ciri-ciri wanita, kondisi sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap usia perkawinan mereka, seperti pendidikan dan pekerjaan orang tua. Makin tinggi pendidikan dan makin baik pekerjaan orang tua cenderung akan berpengaruh pada meningkatnya usia perkawinan pertama anak perempuan dalam keluarga.

Hubungan-hubungan yang terjadi antara beberapa ciri-ciri sosial demografi dan ciri-ciri keluarga terhadap usia perkawinan pertama untuk perempuan secara tidak langsung juga menunjukkan adanya hubungan antara usia perkawinan wanita dengan kondisi kemiskinan rumah tangga. Dapat diasumsikan bahwa rumah tangga yang mampu menyekolahkan anak perempuannya adalah rumah tangga yang kondisi ekonominya relatif lebih baik. Rumah tangga ini dapat dicirikan dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga (orang tua) maupun status pekerjaannya. Wanita yang berpendidikan tinggi juga cenderung akan mempunyai aspirasi terhadap pekerjaan (di luar rumah) yang lebih tinggi, yang akan berpengaruh pula terhadap

kondisi kemiskinannya. Demikian pula dengan makin tingginya aspirasi terhadap pekerjaan yang lebih baik, dapat mempengaruhi wanita untuk menunda perkawinannya dan dengan demikian usia perkawinan meningkat.

Dari beberapa temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1). Kondisi kemiskinan rumah tangga dapat dicirikan dengan usia perkawinan pertama anggota rumah tangga wanita dan 2). Makin tinggi usia perkawinan wanita dalam satu rumah tangga menunjukkan makin baik kondisi ekonomi rumah tangga tersebut. Untuk kepentingan penelitian ini, maka usia perkawinan pertama perempuan dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan dari perspektif sosial-demografi dengan *cutting point* berdasarkan batas minimum usia perkawinan untuk wanita menurut undang-undang perkawinan yang berlaku (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974), yaitu usia 16 tahun untuk wanita (sedangkan laki-laki 19 tahun).

f. Kepala rumah tangga perempuan

Perempuan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan. Sejak beberapa dekade terakhir muncul banyak pendapat bahwa perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Ditengarai tujuh puluh persen dari penduduk dunia yang tergolong miskin adalah penduduk perempuan (Marcoux, 1997:1; Quisumbing, Agnes R, et al., 2001:1). Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara global di muka bumi ini, terdapat sekitar 900 juta penduduk perempuan yang miskin dan kurang lebih 400 juta laki-laki miskin dengan rasio perempuan/laki-laki 2.33 (UNDP 1995; United Nations 1996). Ditengarai di muka bumi ini masih banyak perempuan yang tidak memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan dasar atau pekerjaan. Tingginya jumlah perempuan yang kurang beruntung dan miskin ini, ditengarai juga memiliki keterkaitan dengan adanya peningkatan kepala rumah tangga perempuan²⁴ (Chant, 2004:3).

²⁴ Menurut Chant (2004:3) adanya keterkaitan antara kepala rumah tangga dengan *feminization of poverty* tidak hanya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah

Berbagai literatur (Mason and Lee, 2004:5) memaparkan tentang kehidupan rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, relatif lebih berat dibandingkan dengan kehidupan rumah tangga dengan laki-laki sebagai kepala keluarganya²⁵. Studi di perdesaan di Asia Selatan yang dilakukan oleh Agarwal (1994) juga menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pemilikan sumberdaya seperti tanah dan modal dihambat oleh sistem/tatanan aturan yang sarat dengan bias gender. Program *reforma agraria* yang dilaksanakan di wilayah itu cenderung memfokuskan perhatian kepada kepala rumah tangga laki-laki daripada perempuan. Adanya

perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan miskin, namun hal ini juga dipengaruhi oleh kuatnya anggapan bahwa perempuan mewakili kelompok '*the poorest of the poor*'. Dalam sejumlah kasus, seseorang menjadi miskin karena terkait dengan persoalan gendernya dan yang proporsi terbesar kelompok yang tergolong miskin tersebut adalah perempuan.

²⁵ Beberapa hasil studi menemukan bahwa ada perbedaan insiden kemiskinan pada rumah tangga yang secara de-facto dan de-jure dikepalai oleh perempuan. Hasil survey yang dilakukan Kennedy dan Haddad (1994) di Kenya menunjukkan bahwa secara de-facto rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan relatif lebih miskin dibandingkan dengan tipe rumah tangga lainnya. Namun secara de-jure rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga hanya sedikit lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian DeGraff and Bilsborrow (1992), yaitu di Ecuador, rumah tangga yang memiliki kepala keluarga perempuan, pendapatan per kapita rumah tangganya 10 persen lebih rendah dibandingkan rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki. Apabila rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga dipilah berdasarkan status perkawinan, maka hasilnya kelompok janda atau yang sudah bercerai memiliki penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rumah tangga dengan laki-laki sebagai kepala keluarga (Quisumbing, Agnes R, et al., 2001:9). Kajian dari Suryahadi dan Sumarto juga menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi, tingkat kemiskinan pada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki justru lebih tinggi daripada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Lebih spesifik lagi pada kelompok rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin kronis, proporsinya lebih tinggi untuk rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki daripada rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarganya. Dengan demikian kajian dari Suryahadi dan Sumarto ini mengindikasikan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tidak menunjukkan kelompok '*the poorest of the poor*' (http://www.gdnet.org/pdf/Fourth_Annual_Conference/).

perlakuan yang bias gender ini membuat kehidupan sebagian besar perempuan yang menjadi kepala rumah tangga cenderung berada dalam kondisi sangat miskin²⁶ Dalam wacana gender dan kemiskinan, kepala rumah tangga perempuan seringkali digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan kemiskinan perempuan.

Pada awalnya pandangan ini mengundang perdebatan, karena kajian-kajian yang difokuskan kepada kepala rumah tangga perempuan tidak didukung oleh data-data kemiskinan yang valid. Studi di Republic of Guinea misalnya, justru menunjukkan bahwa insiden kemiskinan berdasarkan konsumsi di keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan justru lebih kecil dibandingkan insiden kemiskinan di keluarga dengan kepala rumah tangga laki-laki. Hasil pendataan kemiskinan berdasarkan konsumsi di Indonesia juga memperlihatkan fenomena yang sama bahwa persentase rumah tangga miskin dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki (SMERU, 2005:3). Demikian pula studi dari Visaria (1980) yang dilakukan di beberapa negara bagian India menunjukkan temuan yang serupa bahwa berdasarkan standar hidup yang dihitung dari pendapatan per kapita, insiden kemiskinan pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan tidak lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan insiden kemiskinan pada rumah tangga dengan laki-laki sebagai kepala keluarganya.

Meskipun demikian, pandangan tentang kepala rumah tangga perempuan lebih miskin daripada laki-laki semakin menguat sejalan dengan perkembangan konseptualisasi kemiskinan yang tidak hanya memfokuskan pada dimensi kemiskinan fisik atau *'money-metric'*, tetapi kemiskinan lebih dilihat sebagai bentuk keterbatasan terhadap akses dan kontrol²⁷. Menurut pendapat Lipton dan Ravallion (1995)

²⁶ Diambil dari (http://www.binadesa.or.id/jender_1.htm, dikutip tanggal 10 Agustus 2006).

²⁷ Adanya paradigma baru dalam mengkaji kemiskinan dari perspektif gender melahirkan paham yang relatif berbeda dengan paham yang selama ini diyakini, yaitu perempuan dalam keluarga dengan kepala rumah tangga laki-laki, tidak lebih

meskipun perempuan, baik sebagai individu maupun kepala rumah tangga, tidak selalu mewakili gambaran masyarakat miskin, namun perempuan seringkali menjadi korban dalam berbagai aspek. Perempuan harus bekerja lebih berat, istirahat lebih sedikit karena harus melaksanakan 'pekerjaan ganda' yang dibebankan di rumah maupun tempat kerja²⁸ dan karena tingkat pendidikan yang umumnya lebih rendah daripada laki-laki, kehidupan perempuan jauh lebih menderita atau mengalami kemiskinan yang tergolong kronis.

Hasil studi yang dilakukan Haddad di Ghana (1991) semakin memperkuat fenomena ini. Haddad mengkaji kemiskinan di tingkat individu berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan yang berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan kemiskinan yang lebih besar pada individu yang berasal dari rumah tangga yang lebih banyak anggota

baik bahkan seringkali lebih buruk/miskin dibandingkan dengan kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga. Asumsi ini didasarkan pada pendekatan tentang siapa yang menjadi pemimpin dan memiliki peran untuk mengontrol sumberdaya yang dimiliki rumah tangga. Kebanyakan penelitian gender dan kemiskinan, seperti yang dikemukakan Chant (2005:4), menggunakan pendekatan yang berfokus pada 'money-metric' dan memprioritaskan pertanyaan pada hal-hal yang berkaitan dengan kerugian fisik daripada kerugian secara sosial yang antara lainnya mencakup ketiadaan/hilangnya harga diri dan kontrol/kewenangan. Menurut Chant (2004:5) paradigma mengenai *feminization of poverty* dalam kaitannya dengan peningkatan kepala rumah tangga perempuan dapat mengaburkan persoalan gender yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki, anggota keluarga perempuan (baik sebagai anak maupun istri) sangat rentan terhadap perlakuan yang abusif dari laki-laki. Perempuan dalam rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki justru mengalami '*secondary poverty*' karena terbatasnya akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa perempuan tidak merasa keberatan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit apabila mereka dapat memiliki kebebasan/otonomi dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri

²⁸ Hasil beberapa studi yang mendasarkan pada analisa alokasi waktu (antara lain Juster and Stafford 1991; Brown and Haddad 1995) mengkonfirmasi bahwa pada umumnya perempuan-perempuan di negara berkembang terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah, harus bekerja lebih lama dibandingkan laki-laki.

perempuannya dibandingkan rumah tangga dengan sedikit perempuan. Demikian pula hasil kajian Buvinic dan Gupta (1997) memperlihatkan bahwa diantara masyarakat miskin, jumlah perempuan sebagai kepala rumah tangga relatif lebih besar dibandingkan dengan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Louat, van der Gaag and Grosh's (1997) juga melakukan kajian tentang hubungan antara kepemimpinan perempuan dengan kemiskinan di Jamaica dengan mendasarkan analisa tingkat kesejahteraan pada perhitungan total pembelanjaan per kapita. Temuannya menunjukkan 9 persen penduduk yang tinggal dalam rumah tangga dengan laki-laki sebagai kepala keluarga, posisinya berada di persentil ke-10 bawah garis kemiskinan, sementara tercatat 11 persen untuk mereka yang tinggal di dalam rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga (Quisumbing, Agnes R, et al., 2001:3-4). Dengan demikian, variabel rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga karena ketiadaan suami/laki-laki dewasa sebab meninggal ataupun bepergian untuk jangka waktu yang lama, dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan dari perspektif sosial-demografi.

g. Pendidikan

Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan (Ennals, 2006). Hubungan keduanya dapat bersifat timbal balik. Pendidikan yang rendah membatasi seseorang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang 'layak' untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Di lain pihak, kondisi kemiskinan memaksa rumah tangga untuk tidak memberikan pendidikan pada anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tursilningsih & Tuhirman (2004) mengemukakan bahwa keluarga dengan kepala keluarga yang mempunyai tingkat pendidikan dan penghasilan rendah tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Dalam studinya di dua desa di Bangladesh dengan 5.180 responden yang berstatus kepala rumah tangga, Uddi (2004) menemukan bahwa responden berpendidikan rendah ditemukan

diantara mereka yang miskin. Hampir separuh respondennya bahkan buta huruf sama sekali. Kenyataan di atas tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, akan tetapi juga di negara maju. Di Australia, umpamanya, keluarga yang tidak beruntung, dalam arti hidup dengan kondisi miskin mempunyai anak-anak dengan tingkat pendidikan yang rendah (Cross dan Lewis, 1998). Selanjutnya, Ennals (2006) mengemukakan bahwa di Inggris anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin lebih cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kondisi kemiskinan tidak hanya berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, melainkan juga terhadap prestasi serta kemampuan anak menguasai materi pelajaran. Anak-anak yang berasal dari keluarga tidak miskin cenderung mempunyai prestasi yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka dari keluarga miskin (TIMSS, 2003; Ennals, 2006). Kemampuan keluarga (baca: orang tua) untuk menyediakan sarana penunjang seperti permainan yang bersifat edukatif dan perangkat komputer memungkinkan anak-anak dari keluarga tidak miskin untuk mengasah kemampuan intelektual mereka serta mendapatkan berbagai informasi yang tidak didapatkan dari guru di kelas melalui jaringan internet. Selain itu, orang tua dari keluarga tidak miskin yang pada umumnya berpendidikan tinggi juga dapat membantu anak-anak mereka untuk belajar di rumah.

Kaitan antara pendidikan dengan kemiskinan seringkali dihubungkan dengan kondisi kemiskinan dari sudut ekonomi, yang pada umumnya diukur menggunakan tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Hal ini karena selama ini kemiskinan cenderung ditinjau berdasarkan sudut pandang ekonomi. Terkait dengan penelitian ini, yang mengkaji kemiskinan dari sisi demografi, maka salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan rumah tangga adalah dengan menggunakan variabel pendidikan.

h. Pekerja Anak

Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang sangat pesat dalam perkembangannya termasuk salah satu kawasan yang dihuni oleh masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah standar garis kemiskinan internasional sebesar US\$ 1 per hari (<http://www.worldbank.org/sar>). Masih dari sumber situs yang sama disebutkan pula bahwa kemiskinan sangat mempengaruhi kondisi suatu keluarga untuk “membuat” anak-anak bekerja daripada pergi ke sekolah, dan hal ini dipengaruhi pula oleh permintaan tenaga kerja yang murah.

Bellamy (1997) dalam Hardius Usman (2004) menyebutkan bahwa anak-anak yang bekerja di usia dini, biasanya berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan. Hal ini sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak terlatih dan dengan upah yang sangat buruk²⁹. Thapa, Chhetry dan Aryal (1996) dalam Hardius Usman (2004) juga mengemukakan bahwa membiarkan anak-anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat membuat “*vicious circle*” yaitu awalnya bekerja menimbulkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan berlanjutnya pekerja anak. Seperti halnya di Kabupaten Pasir Provinsi Kaltim, banyak anak putus sekolah pada usia dini dan akhirnya bekerja di sektor tambang emas tradisional yang memiliki resiko besar terhadap keselamatan mereka.

Menurut Nachrowi (2004) untuk memahami fenomena munculnya pekerja anak perlu melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Sekalipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, jika tidak ada perusahaan yang memperkerjakannya, maka pekerja anak tidak akan muncul.

²⁹ Anak yang bekerja pada usia sekolah pada dasarnya tidak memiliki ketrampilan khusus untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi. Sehingga yang terjadi pekerja anak akan lebih banyak yang bekerja pada sektor-sektor informal.

Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak pun tidak akan muncul. Dari sisi penawaran berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama pendorong terjunnya anak-anak ke dunia kerja. Karena dorongan tersebut, maka anak-anak cenderung memilih bekerja membantu orang tua mereka atau untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Beberapa penelitian (Asra, 1993; Bellany, 1997; Imawan, 1999) mengungkapkan bahwa mereka yang termiskin dan terbelakang cenderung memasok sebagian besar pekerja anak. Kuatnya hubungan antara fenomena pekerja anak dengan kemiskinan, menjadikan pekerja anak sebagai salah satu variabel yang dapat disertakan dalam pengukuran kemiskinan dari sudut pandang sosial demografi.

i. Jenis pekerjaan

Variabel jenis pekerjaan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indeks ISEI (Standart International Socio Economic Index of Occupational Status) yang dikembangkan oleh Harry B.G. Ganzeboom dan Treiman. Jenis pekerjaan dengan model SEI tersebut diberi bobot/nilai yang dihitung berdasarkan perbandingan antara pekerjaan, pendapatan dan pendidikan. Menurut standar perhitungan Ganzeboom tersebut, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula status sosial ekonomi seseorang, sebaliknya semakin rendah nilai indeks semakin rendah pula status sosial ekonomi seseorang. Bobot/nilai indeks berjenjang dari nilai 16, yaitu untuk jenis pekerjaan buruh sampai dengan yang tertinggi adalah 90, yaitu untuk jenis pekerjaan hakim.

2.2. Pengukuran Kemiskinan Sosial Demografi

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini berupaya mengembangkan suatu pengukuran kemiskinan dengan menggunakan perspektif sosial demografi. Berikut adalah berbagai

tahapan statistik yang dilakukan untuk merumuskan indeks kemiskinan sosial demografi, sebagai berikut:

1. Menentukan variabel-variabel sosial demografi selain variabel jumlah ART (*household size*) yang dari hasil kajian sebelumnya (berdasarkan kerangka pikir) mempunyai hubungan (berkorelasi) dengan variabel jumlah ART, dimana variabel tersebut digunakan sebagai *independent variable*. Variabel-variabel sosial demografi tersebut adalah sebagai berikut :

X_1 = rata-rata lama sekolah suatu RT (YOS/jumlah ART usia 7 tahun ke atas)

X_2 = proporsi jenis pekerjaan 'ganzeboom' (nilai jenis pekerjaan/jumlah ART yang bekerja)

X_3 = jumlah anak yang lahir hidup dalam suatu RT

X_4 = jumlah balita yang meninggal dalam suatu RT

X_5 = jumlah ART usia 15 tahun ke atas yang bermigrasi ke luar kabupaten Sangihe/Nunukan

X_6 = umur perempuan pada saat perkawinan pertama (tahun)

2. Menganalisa apakah antar *independent variable* saling berkorelasi atau tidak, karena kalau saling berkorelasi maka hasil dari regresi linier antara *independent variable* dengan *dependent variable* tidak valid. Dalam menganalisa hal tersebut perlu dihitung nilai VIF masing-masing *independent variable*, jika ada nilai VIF yang ≥ 10 maka antara *independent variable* saling berkorelasi (terjadi multikolinieritas). Dari hasil analisa diperoleh tiap *independent variable* mempunyai nilai VIF < 10 baik untuk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur maupun Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, sehingga antar *independent variable* tidak saling berkorelasi untuk data kedua kabupaten tersebut.
3. Melakukan regresi linier antara variabel sosial demografi (*independent variable*) dengan variabel jumlah ART ($Y = \text{dependent variable}$) guna mengetahui *independent variable* yang memiliki signifikansi dengan *dependent variable* pada

taraf nyata (α) sebesar 5%. Bila nilai signifikansi suatu *independent variable* < 5% maka *independent variable* tersebut nyata mempunyai signifikansi (berhubungan linier) dengan *dependent variable*. Model regresi linier yang digunakan yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

dimana : Y adalah jumlah ART suatu RT (*dependent variable*), $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_6$ adalah parameter regresi linier, ε adalah komponen sisaan dari model regresi linier yang bersifat acak.

Berdasarkan hasil regresi linier, variabel sosial demografi (*independent variable*) yang nyata mempunyai signifikansi dengan variabel jumlah ART (*dependent variable*) untuk data masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :

✓ Kabupaten Nunukan : variabel X_1, X_3, X_4 , dan X_5 (lihat tabel 1 di bawah ini).

Tabel 2.1. Coefficients(a) untuk Kabupaten Nunukan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	2,301	,396		5,808	,000		
	X1:YOS /Jml ART 7th +	,065	,027	,092	2,422	,016	,897	1,115
	X2 : jenis pekerjaan / ART yg bekerja	-,006	,005	-,052	-1,400	,162	,946	1,057
	X3 : Jumlah Anak yang Lahir Hidup	,693	,037	,791	18,736	,000	,724	1,382
	X4 : Jumlah Balita yang meninggal	-,587	,117	-,200	-5,013	,000	,814	1,228
	X5 : Jumlah ART 15 th + yang migrasi	,228	,089	,095	2,547	,011	,932	1,073
	X6 : Umur perempuan pada saat perkawinan pertama (tahun)	,014	,016	,032	,850	,396	,914	1,094

a Dependent Variable: Jumlah Anggota Rumah Tangga

✓ Kabupaten Sangihe : variabel X₂, X₃, X₄, dan X₅ (lihat tabel 2 di bawah ini).

Tabel 2.2 Coefficients(a) untuk Kabupaten Sangihe

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,088	,474	6,518	,000		
	X1 : YOS / Jml ART 7th +	-,028	,060	-,475	,635	,723	1,383
	X2 : jenis pekerjaan / ART yg bekerja	,032	,013	2,435	,016	,738	1,356
	X3 : Jumlah anak yang lahir hidup	,263	,058	4,550	,000	,851	1,176
	X4 : Jumlah anak balita yang meninggal	-,497	,183	-,187	-,2,709	,007	,896
	X5 : Jumlah ART 15th + yang migrasi keluar	,803	,181	,299	4,443	,000	,937
	X6 : Umur perempuan pada saat pertama kawin	-,015	,016	-,065	-,964	,336	,935

a. Dependent Variable: Jumlah Anggota Rumah Tangga

4. Perumusan indeks kemiskinan sosial demografi menggunakan variabel jumlah ART dan *independent variable* yang signifikan (yang selanjutnya disebut sebagai indikator) serta memakai metode rataan dari nilai *cutting point* masing-masing indikator yang dibakukan terlebih dahulu, dimana tahapan statistik yang dilakukan adalah :

- Menentukan *cutting point* variabel sosial demografi yang signifikan terhadap variabel 'jumlah ART' berdasarkan *cutting point* variabel 'jumlah ART' (sudah ditentukan menurut review yaitu 'jumlah ART' = 4, dimana batas nilai persentase kumulatif Kabupaten Nunukan sebesar 44,8% dan 60,9% untuk Kabupaten Sangihe, lihat lampiran) yaitu mencari nilai masing-masing variabel sosial demografi yang signifikan yang nilai persentase kumulatif sebesar 44,8% untuk data Kabupaten Nunukan dan 60,9% untuk data Kabupaten Sangihe dengan memakai metode interpolasi. Nilai *cutting point* variabel sosial demografi yang signifikan terhadap variabel 'jumlah ART' untuk data tiap kabupaten tercantum pada Tabel 3. Nilai *cutting point* dan pembakuan variabel sosial demografi.
- Karena ukuran atau satuan dari variabel yang digunakan berbeda-beda maka perlu dilakukan pembakuan nilai masing-masing indikator (*dependent* dan *independent variable*) di tiap unit rumah tangga, dimana nilai pembakuan berkisar antara 1 sampai dengan 10. Rumus yang digunakan sebagai berikut :
 - a. Rumus pembakuan searah yang digunakan untuk indikator yang nilainya berbanding lurus dengan nilai pembakuan yaitu untuk indikator 'YOS/jumlah ART 7th +' dan 'jenis pekerjaan/ ART yg bekerja' adalah :

$$Z = \frac{(X_i - X_{\min}) * BA + (X_{\max} - X_i) * BB}{(X_{\max} - X_{\min})}$$

- b. Rumus pembakuan tidak searah yang digunakan untuk indikator yang nilainya berbanding terbalik dengan nilai pembakuan yaitu untuk indikator ‘jumlah ART’, ‘jumlah anak lahir hidup’, ‘jumlah balita yg meninggal’ dan ‘jumlah ART usia 15 th + yg migrasi keluar’ yaitu :

$$Z = \frac{(X_{\max} - X_i) * BA + (X_i - X_{\min}) * BB}{(X_{\max} - X_{\min})}$$

dimana :

Z	=	nilai indikator hasil pembakuan
X _i	=	nilai indikator yang akan dibakukan
X _{min}	=	nilai minimum indikator
X _{max}	=	nilai maksimum indikator
BB	=	batas bawah daftar konversi = 1
BA	=	batas atas daftar konversi = 10

Nilai pembakuan dari *cutting point dependent* dan *independent variable* yang signifikan untuk data tiap kabupaten tercantum pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Nilai cutting point dan pembakuan variabel sosial demografi

Variabel/indikator	Nunukan (KALTIM)		Sangihe (SULUT)	
	Cutting point	Nilai pembakuan	Cutting point	Nilai pembakuan
Jumlah ART (Y)	4,00	7,30	4,00	7,30
YOS/jml ART 7th + (X ₁)	5,74	4,44	-	-
Jenis pekerjaan/ ART yg bekerja (X ₂)	-	-	15,72	2,56
Jumlah anak lahir hidup (X ₃)	3,00	8,20	3,00	8,36
Jumlah balita yg meninggal (X ₄)	0,00	10,00	0,00	10,00
Jumlah ART 15th + yg migrasi keluar (X ₅)	0,00	10,00	0,00	10,00

5. Menentukan garis kemiskinan dengan cara menghitung rata-rata nilai pembakuan dari nilai *cutting point* semua indikator (Z_{ratcut}), yaitu sebagai berikut :

- Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur :

$$Z_{ratcut} = \frac{(Z_{cut-Y} + Z_{cut-X1} + Z_{cut-X3} + Z_{cut-X4} + Z_{cut-X5})}{5} = \frac{(7.3 + 4.44 + 8.2 + 10 + 10)}{5} = 7.99$$

- Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara :

$$Z_{ratcut} = \frac{(Z_{cut-Y} + Z_{cut-X2} + Z_{cut-X3} + Z_{cut-X4} + Z_{cut-X5})}{5} = \frac{(7.3 + 2.56 + 8.36 + 10 + 10)}{5} = 7.64$$

dimana :

$$\begin{aligned} Z_{cut-i} &= \text{pembakuan nilai } cutting \text{ point dari indikator ke-}i \\ i &= \text{indikator Y, X}_1, \text{ X}_2, \text{ X}_3, \text{ X}_4, \text{ dan X}_5 \end{aligned}$$

6. Menghitung rata-rata nilai pembakuan dari semua indikator untuk setiap RT (Z_{rataan}), yang merupakan indeks kemiskinan rumah tangga, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur :

$$Z_{rataan} = \frac{(Z_Y + Z_{X1} + Z_{X3} + Z_{X4} + Z_{X5})}{5}$$

- Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara :

$$Z_{rataan} = \frac{(Z_Y + Z_{X2} + Z_{X3} + Z_{X4} + Z_{X5})}{5} ;$$

dimana :

$$\begin{aligned} Z_i &= \text{nilai pembakuan indikator ke-}i \\ i &= \text{indikator Y, X}_1, \text{ X}_2, \text{ X}_3, \text{ X}_4, \text{ dan X}_5 \end{aligned}$$

7. Menentukan kategori miskin atau tidak miskin untuk setiap rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur :
 - ✓ Suatu rumah tangga dikategorikan **miskin**, jika nilai Z-rataan dari rumah tangga tersebut lebih kecil dari garis kemiskinan atau < 7.99 .
 - ✓ Suatu rumah tangga dikategorikan **tidak miskin**, jika nilai Z_rataan dari rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan garis kemiskinan (≥ 7.99)
 - Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara :
 - ✓ Suatu rumah tangga dikategorikan **miskin**, jika nilai Z-rataan dari rumah tangga tersebut lebih kecil dari garis kemiskinan atau < 7.64 .
 - ✓ Suatu rumah tangga dikategorikan **tidak miskin**, jika nilai Z_rataan dari rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan garis kemiskinan (≥ 7.64).
8. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk melengkapi kajian dan mempertajam pemahaman mengenai kemiskinan, adalah dengan melakukan tabulasi silang antara kemiskinan sosial demografi dengan kemiskinan ditinjau dari dimensi ekonomi. Perbandingan hasil kedua pengukuran ini untuk mengetahui apakah rumah tangga yang tergolong miskin menurut pengukuran sosial demografi juga miskin menurut pengukuran ekonomi, atau miskin sosial-demografi tetapi tidak miskin ekonomi, tidak miskin sosial-demografi tetapi miskin ekonomi, dan tidak miskin sosial-demografi dan juga tidak miskin ekonomi. Pemahaman terhadap masing-masing kelompok tersebut diperlukan karena intervensi program pembangunan juga berbeda-beda menurut kelompok kemiskinan.

Kemiskinan dari dimensi ekonomi didasarkan pada data pengeluaran (sebagai proksi dari pendapatan) sebagai indikator kemiskinan di tingkat rumah tangga yang dibandingkan dengan garis kemiskinan standar BPS tahun 2004. Menurut standar BPS garis kemiskinan untuk Kabupaten Nunukan batasnya adalah Rp.

171.122,- per kapita per bulan, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Rp.136.044,- per kapita per bulan. Suatu rumah tangga dikatakan miskin menurut BPS apabila mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

BAB III

WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1. Kondisi fisik daerah

Provinsi Kalimantan Timur, khususnya wilayah Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan wilayah Negara Malaysia. Letak Provinsi Kalimantan Timur di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia dipandang sangat strategis karena berbagai keuntungan akan didapatkan namun seperti juga halnya di wilayah perbatasan pada umumnya sangat rawan baik dari keamanan, politik, ilegal entry, ilegal trading, illegal fishing, illegal logging dan lain-lain (Nainggolan, 2004). Kondisi wilayah yang sedemikian rupa merupakan salah satu ciri daerah perbatasan, selain wilayahnya yang terisolir dan tertinggal karena kurangnya sentuhan pembangunan serta terbatasnya berbagai akses yang dapat dinikmati oleh penduduknya. Pada bagian ini akan menjelaskan secara umum gambaran wilayah perbatasan khususnya di wilayah Kecamatan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur

3.1.1. Letak Aksesibilitas dan tipologi wilayah

Kabupaten Nunukan diresmikan menjadi kabupaten pada tahun 1999, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini menjadi salah satu kawasan perbatasan yang sangat strategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia yang merupakan perbatasan wilayah perairan dengan Tawau, dan sebagian perbatasan darat dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.

Wilayah ini berada pada ketinggian 1.500 m hingga 3.000 m di atas permukaan laut, memiliki topografi yang berbukit-bukit dan dikelilingi oleh lautan dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Topografi tersebut juga dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur memanjang hingga ke pantai sebelah Timur. (Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2000) Dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk perkebunan kakao dan kelapa sawit yang merupakan komoditas andalan kabupaten ini.

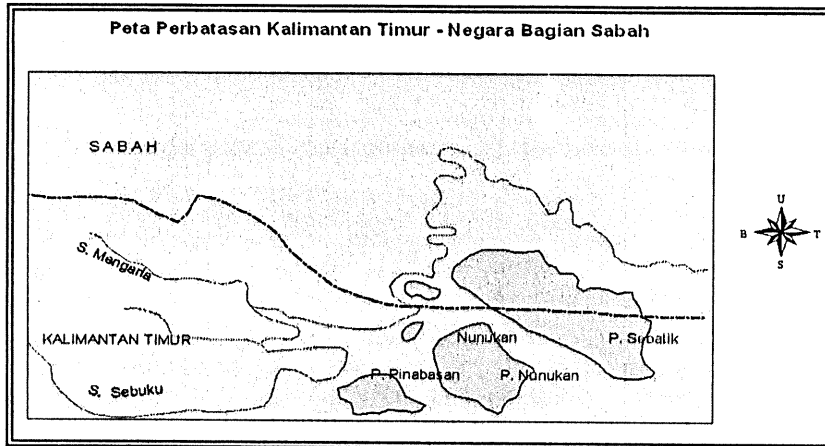
Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh satuan fisiografi gunung (mountain) dan dataran (plain). Sebagian besar satuan fisiografi gunung berada di bagian barat Kabupaten Nunukan memanjang ke arah Kabupaten Malinau hingga perbatasan Malaysia³⁰. Jenis Tanah di daerah ini didominasi oleh kombinasi podsolik/regosol yaitu sekitar 28,79 persen sedangkan jenis tanah yang paling kecil luasannya adalah kombinasi alluvial/gambut yaitu sebesar 3,7 persen. Melihat keadaan tanah di wilayah ini akan berpengaruh kecocokannya pada jenis tanaman tertentu. Hal ini akan berpengaruh pula pada perkembangan potensi perkebunan atau pun pertanian yang ada

Kecamatan Sebatik dimana penelitian ini di lakukan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan yang terletak di suatu pulau yang terbagi menjadi 2 wilayah, Malaysia dan Indonesia dengan luas wilayah. 246,61 km². Wilayah Kecamatan Sebatik pada akhir tahun 2006 telah dimekarkan menjadi dua, Sebatik dan Sebatik Selatan. Wilayah desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Sebatik yaitu Desa Sungai Pancang, Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Aru, Desa Tanjung Karang, sedangkan Desa

³⁰ Cadangan Karbon di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur : Monitoring Secara Spasial dan Permodelan

Setabu, Desa Liang Bunyu, Desa Binalawan dan Desa Aji Kuning merupakan bagian dari Kecamatan Sebatik Selatan³¹.

Peta1



Untuk mencapai wilayah Kecamatan Sebatik dari pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan hanya dapat ditempuh dengan jalur laut menggunakan kapal motor dengan jarak tempuh kurang lebih 15 hingga 20 menit, atau menggunakan kapal motor dari dermaga pelabuhan di Kota Tarakan langsung ke Pelabuhan Sungai Nyamuk, Sebatik. Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di pedalaman dan terisolir dengan kondisi alam yang sulit terjangkau. Selain kondisi ruas jalan yang masih sangat memprihatinkan, sarana transportasi antarwilayah di Kecamatan Sebatik pun masih belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga akses transportasi sering menjadi kendala. Sementara untuk ke ibu kota kabupaten Nunukan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kapal laut atau speedboat dan pesawat udara dari Kota Tarakan.

³¹ Menurut informasi dari Camat Sebatik dan juga Kepala desa Sungai Pancang, rencananya beberapa desa akan dimekarkan dan tampaknya berkembang wacana untuk memekarkan lagi kecamatan.

Desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sungai Pancang dan Desa Sungai Pancang³² yang letaknya bersebelahan. Dari Desa Tanjung Aru sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sebatik berjarak sekitar 6 km. Desa Sungai Pancang dan Sungai Nyamuk merupakan desa yang berbatasan laut dengan negara bagian Sabah Malaysia. Desa Sungai Pancang terbagi menjadi 4 dusun dengan 19 RT, masing-masing adalah Dusun Haji Bedu Rahim (6 RT), Dusun Lapri (5 RT), Dusun Sebrang (4 RT) serta Dusun Sungai Pancang Bukit Indah (4 RT). Adapun Desa Sungai Nyamuk terbagi menjadi 4 dusun dan 20 RT.

Untuk menghubungkan antar desa di Sebatik biasa menggunakan jalan darat dengan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Jalan yang berbukit-bukit dan masih di kelilingi hutan membuat sarana angkutan umum tidak terlalu banyak dapat ditemui selain mobil-mobil penumpang³³ milik penduduk setempat. Akses transportasi masih menjadi kendala utama bagi penduduk Desa Sungai Pancang maupun Sungai Nyamuk apabila harus melakukan perjalanan menuju wilayah lain di luar Pulau Sebatik. Biasanya penduduk memanfaatkan jalur laut untuk menuju ke Nunukan dengan menggunakan *speed boat*. Namun untuk menuju ke dermaga yang menghubungkan Pulau Sebatik dengan Pulau Nunukan, warga Desa Sungai Pancang harus melakukan perjalanan darat sekitar 2-3 jam

³² Sejarah Desa Sungai Pancang maupun Sungai Nyamuk sendiri seperti penuturan Kepala Desa Sungai Pancang, awalnya pada tahun 1967, beberapa orang Bugis datang ke Pulau Sebatik yang masih kosong untuk membuka lahan. Dan pada awal-awal tahun tersebut hanya terdiri atas 3 KK yang bekerja sebagai nelayan dan petani. Untuk tanaman perkebunan, di Pulau Sebatik pada umumnya dan Desa Sungai Pancang pada khususnya merupakan penghasil tanaman kakao terbesar. Penanaman kakao dimulai sejak tahun 1975 yang menurut penuturan nara sumber pada awalnya dirintis oleh sebuah keluarga yang pernah tinggal di Tawao kemudian mengajarkan cara bercocok tanam kakao pada masyarakat sekitarnya.

³³ Dengan menggunakan sarana mobil angkutan penumpang yang dapat menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya. Di Sebatik banyak pula terdapat mobil sewa sebagian besar merupakan mobil pribadi bukan mobil angkutan pendumpang.

menggunakan mobil sewa ke Bambang. Akses menuju Tawao, Malaysia selama ini dirasakan relatif lebih mudah dibandingkan dengan akses menuju Nunukan atau Tarakan. Sehingga kegiatan perekonomian lebih efisien apabila dilakukan di Tawao, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari.

3.1.2. Sarana-prasarana/infrastruktur

Sarana dan prasarana yang terdapat di dalam suatu wilayah daerah kabupaten hingga wilayah desa sangat penting peranannya dalam upaya mempermudah upaya masyarakat untuk mendapatkan akses dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik untuk mengembangkan upaya yang dilakukan masyarakat dalam segala aktivitasnya serta dalam upaya untuk mengembangkan diri ataupun mengembangkan potensi yang ada dalam wilayah. Kemajuan suatu wilayah atau masyarakat sangat tergantung pada keberadaan sarana yang ada serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Seperti halnya di daerah perbatasan, selalu digambarkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga membuat daerah atau masyarakatnya dianggap selalu tertinggal.

Ekonomi

Aktivitas penduduk di sektor perdagangan sangat menonjol di wilayah Sebatik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana penunjang perekonomian khususnya perdagangan. Sarana ini sangat dibutuhkan oleh penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembangunan sarana ekonomi dirasakan sangat diperlukan khususnya untuk membantu penduduk dalam mengembangkan usaha perdagangan. Berkembangnya keadaan ekonomi khususnya perdagangan akan dipengaruhi oleh keberadaan, pasar, bank dan koperasi serta lembaga ekonomi lainnya.

Perkembangan sarana ekonomi di Sebatik tampaknya cukup pesat, berbagai sarana penunjang kegiatan ekonomi sudah banyak dibangun di wilayah ini seperti pasar, pertokoan, kios, bank, dan koperasi. Jumlah sarana ekonomi yang ada di wilayah sebatik ini cukup banyak terutama toko dan kios (Tabel 3.1.). Untuk memfasilitasi masyarakat telah dibangun beberapa pasar, hampir setiap desa yang ada di wilayah ini sudah mempunyai pasar. Kebutuhan akan pasar selain sebagai sarana bagi para penjual atau pedagang untuk menjajakan hasil dagangannya juga sangat memudahkan para pembeli untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, keberadaan pasar tersebut belum semuanya dapat memenuhi keinginan masyarakat. Di beberapa desa, pasar hanya melakukan aktivitasnya pada hari-hari tertentu saja. Namun demikian, terdapat beberapa pasar yang buka setiap hari, seperti halnya salah satu pasar di Sungai Nyamuk. Pasar tersebut tidak terlalu besar namun berbagai kebutuhan sehari-hari terutama untuk makan dapat dibeli di pasar ini. Berbagai macam sayuran, bumbu dapur, dan kebutuhan dapur lainnya dengan mudah didapatkan. Pasar ini letaknya cukup strategis dipinggir jalan besar dan di pusat keramaian. Penduduk Sungai Pancang selain memanfaatkan pasar di desanya sendiri juga sering berbelanja ke pasar di Desa Sungai Nyamuk atau ke Aji Kuning. Letak pasar ini relatif mudah dijangkau oleh masyarakat Sungai Pancang.

Tabel 3.1. Sarana Ekonomi Desa di Kecamatan Sebatik, 2005

No.	Desa	Jenis Sarana Ekonomi			
		Toko/kios	Koperasi	Pasar	Bank
1	Pancang	74	-	1	-
2	Sei Nyamuk	78	4	3	3
3	Tanjung Aru	46	-	2	-
4	Tanjung Karang	38	-	2	-
5	Setabu	28	1	1	-
6	Binalawan	20	2	1	-
7	Liang Bunyu	44	-	-	-
8	Aji Kuning	48	2	4	-
	Jumlah	376	9	14	3

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik, 2005

Selain pasar-pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, terdapat pula toko-toko atau kios-kios yang juga menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari serta barang-barang kebutuhan hidup penduduk lainnya. Toko-toko tersebut tidak hanya menyediakan kebutuhan primer tetapi juga barang-barang kebutuhan sekunder. Kalau dilihat ukurannya, dari kios kecil sampai toko besar, toko serba ada sudah terdapat di Sebatik. Pusat pertokoan baru terdapat di Sungai Nyamuk serta pusat perbelanjaan modern yang cukup lengkap jenis barang yang diperdagangkan. Toko-toko besar atau toko grosir bagi para pedagang banyak terdapat di Sungai Nyamuk, Sungai Pancang, dan Aji Kuning. Pada umumnya barang-barang dagangan banyak didatangkan dari Malaysia, hal ini tampak dijumpai pada toko-toko tersebut selain barang-barang produksi Indonesia. Pada saat ini, para pedagang yang mempunyai kios atau warung di desa-desa lain tidak perlu belanja sendiri ke Tawau. Adanya toko-toko besar ini cukup membantu para pedagang kecil mendapatkan barang-barang dagangannya.

Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi laut masih merupakan andalan bagi masyarakat di wilayah perbatasan selain transportasi udara dan darat. Banyak wilayah di Kabupaten Nunukan hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut atau sungai. Di Nunukan terdapat pelabuhan besar yang dapat disandari kapal-kapal besar yaitu pelabuhan Tunon Naka, yang juga merupakan pintu gerbang bagi lalu lintas orang maupun barang baik dari dalam wilayah Indonesia maupun dari Malaysia. Selain pelabuhan besar Tunon Naka di sekitar Nunukan ini terdapat beberapa pelabuhan kecil untuk berlabuh kapal-kapal kecil atau speedboat yang dapat menghubungkan Nunukan dengan wilayah di sekitarnya, seperti pelabuhan Lemijung dan Sei Dadap.

Untuk menuju ke Nunukan dan Sebatik dapat menggunakan speedboat dari pelabuhan Kota Tarakan. Kapal yang melayani penumpang ke Nunukan frekuensinya lebih banyak dibandingkan ke Sebatik. Hal ini dapat dimengerti karena penumpang yang pergi ke

Nunukan jauh lebih banyak dibandingkan penumpang ke Sebatik. Perjalanan dengan menggunakan kapal/speedboat dari Tarakan ke Nunukan ditempuh kurang lebih selama 3 sampai 4 jam. Adapun dari Tarakan ke Sebatik tepatnya di pelabuhan Sungai Nyamuk ditempuh dalam waktu kurang 2 sampai 3 jam. Terdapat beberapa perusahaan transportasi laut yang memberikan jasa untuk melayani penumpang ke Nunukan dan Sebatik.

Selain menggunakan jasa transportasi laut bila hendak ke Nunukan beberapa tahun belakangan ini sudah dapat dilayani dengan menggunakan transportasi udara. Dari Kota Tarakan ke Pelabuhan udara Nunukan waktu yang dibutuhkan tidak sampai 45 menit. Walaupun lebih mahal, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan pesawat terbang tidak jauh berbeda dengan biaya speedboat. Oleh karena itu sejak adanya penerbangan secara rutin dari Tarakan ke Nunukan penumpang speedboat semakin berkurang.

Bila perjalanan ke Nunukan dapat ditempuh dengan menggunakan kapal dan pesawat, perjalanan ke Sebatik harus memakai kapal atau speedboat, karena sarana perhubungan udara belum tersedia. Transportasi dari Nunukan ke Sebatik pada dasarnya sudah relatif mudah aksesnya. Setiap saat tersedia speedboat atau kapal kayu yang siap mengantar penumpang menuju ke Sebatik. Dari pelabuhan "Pasar Yanmaker" di wilayah Lemijung, Nunukan sudah banyak tersedia speedboat dan kapal yang siap mengantar ke bagian selatan pulau Sebatik yaitu di dermaga Bambang yang masuk wilayah desa Binalawan. Speedboat atau kapal kayu inilah moda transportasi yang melayani masyarakat yang hendak ke wilayah Sebatik. Di penghujung dermaga Bambang sudah menunggu beberapa mobil yang siap mengangkut penumpang yang hendak pergi ke seluruh penjuru Pulau Sebatik, seperti ke Sungai Nyamuk, Aji Kuning, dan Pancang dimana desa tempat penelitian ini dilakukan.

Dari Bambang ke Sungai Nyamuk atau Sungai Pancang ditempuh melalui jalan darat kurang lebih selama 2 jam apabila kondisi jalan kering. Terdapat dua jalur alternatif untuk menuju Sungai Nyamuk dan Pancang, melalui jalur utara atau jalur selatan.

Keuntungan lewat jalur utara dapat menghemat waktu tempuh, namun bila hujan turun tidak ada dapat dilalui kendaraan. Pada umumnya jalur selatan merupakan alternatif yang sering dipilih walaupun kondisi jalannya tidak bagus seperti halnya jalur utara namun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Jangan membayangkan bahwa jalan yang menghubungkan antar desa di Sebatik adalah jalan bagus dan beraspal. Jalan yang ada di wilayah Sebatik merupakan jalan tanah yang diperkeras sehingga kalau hujan sangat licin dan berbahaya. Di beberapa desa telah dibangun sarana jalan aspal akan tetapi masih sedikit. Sedangkan jalan yang dulu pernah dibangun kondisinya sudah rusak.

Wilayah Sebatik yang tidak terlalu luas menyebabkan panjang jalan yang menghubungkan antar wilayah tidak terlalu banyak. Akhir-akhir ini pemerintah telah berupaya untuk membuka jalan-jalan baru guna mempermudah akses penduduk dari satu desa ke desa lainnya. Namun demikian, jalan yang merupakan jalan propinsi, kabupaten, maupun jalan desa tersebut kondisinya masih sangat buruk. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa jenis permukaan jalan beraspal di Sebatik sepanjang 26,10 Km, jalan kerikil 22,89 Km, dan jalan tanah 29,84 Km, serta lainnya sepanjang 7,75. Namun bila kita melintasi jalan-jalan di Pulau Sebatik, kondisi jalan aspal sudah tidak bagus. Dari pengalaman di lapangan ketika menyusuri jalan dari Tanjung Aru yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan menuju ke Sungai Nyamuk, Pancang, dan Aji Kuning jalan aspal yang ada sudah banyak berlubang bahkan tinggal kerikil dan berdebu. Namun demikian, pembangunan jalan sebagai prasarana transportasi telah membuka isolasi dari dusun-dusun yang ada di Desa Pancang masih terus dikerjakan.

Pembangunan jalan ini menurut keterangan penduduk banyak manfaatnya, terutama untuk membawa hasil pertanian atau perkebunan seperti coklat atau pisang. Saat ini lebih mudah untuk memasarkan hasil perkebunan secara langsung atau diambil oleh pedagang pengumpul. Selesainya pembangunan jalan walaupun masih berupa pengerasan sudah dapat menghemat biaya yang harus

dikeluarkan untuk transportasi, selain waktu yang diperlukan jauh lebih singkat.

Tabel 3.2. Sarana Jalan di Kecamatan Sebatik (m)

No.	Desa	Jenis jalan			
		negara	propinsi	kabupaten	desa
1	Pancang	-	7.400	6.320	11.740
2	Sei Nyamuk	-	1.500	2.000	38.500
3	Tanjung Aru	-	2.000	5.000	30.000
4	Tanjung Karang	-	-	-	4.400
5	Setabu	-	4.500	3.350	11.250
6	Binalawan	-	-	250	20.350
7	Liang Bunyu	-	10.500	17.000	4.400
8	Aji Kuning	2.000	750	7.810	14.784
	Jumlah	2.000	26.650	41.730	135.424

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik, 2005

Tidak seperti halnya di Pulau Nunukan yang telah memiliki pelabuhan besar. Di Pulau Sebatik pelabuhan besar belum ada, hanya terdapat dermaga Sungai Nyamuk untuk tempat berlabuhnya kapal-kapal penumpang dengan ukuran kecil atau speedboat-speedboat penumpang yang menghubungkan Sungai Nyamuk dengan Tarakan, Nunukan atau dengan Tawau di wilayah Malaysia. Untuk ke Tawau relatif lebih dekat melalui dermaga Sungai Nyamuk ini. Dengan hanya menggunakan speedboat atau kapal kayu orang dengan mudah dapat pergi ke Tawau, waktu tempuh juga sangat singkat kurang lebih hanya 30 menit. Akses transportasi yang cukup mudah dan memadai menyebabkan orang di wilayah Sebatik lebih senang untuk pergi ke Malaysia daripada harus ke Nunukan atau Tarakan. Mudahnya sarana transportasi ke Malaysia sangat menguntungkan penduduk Sebatik, namun hal ini juga menyebabkan ketergantungan penduduk kepada Malaysia. Pemasaran hasil pertanian dirasakan lebih mudah ke Malaysia dibandingkan ke wilayah Nunukan dan Tarakan atau

wilayah Indonesia lainnya. Barang-barang kebutuhan sehari-hari penduduk lebih mudah didapatkan dari Malaysia. Sebagian besar pedagang sering pergi berbelanja ke Tawau untuk berbelanja keperluan toko atau kiosnya. Apabila rencana pengembangan dan pembangunan di wilayah Sebatik tidak segera dilakukan, penduduk wilayah ini akan selalu tergantung pada Malaysia.

Pembangunan sarana komunikasi di wilayah Nunukan dan Sebatik sudah cukup bagus. Dengan adanya sarana komunikasi khususnya yang dibangun oleh pemerintah melalui PT Telkom memudahkan penduduk wilayah Nunukan dan Sebatik untuk berkomunikasi dengan wilayah lainnya. Selain pengembangan sarana telekomunikasi dengan menyediakan sambungan telpon kepada masyarakat oleh PT Telkom, sarana telekomunikasi lainnya dengan menggunakan telpon seluler juga sudah semakin berkembang di wilayah perbatasan ini. Beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi telpon seluler sudah mendirikan sarana penunjang telekomunikasi yang dapat memudahkan penduduk berkomunikasi. Penduduk sudah dapat memanfaatkan keberadaan telpon seluler sehingga komunikasi dengan wilayah lainnya semakin lancar.

Sementara itu, sarana komunikasi lainnya yang terdapat di wilayah ini adalah sudah semakin berkembangnya penerimaan siaran televisi. Di Nunukan maupun Sebatik telah didirikan stasiun relay TVRI. Pembangunan stasiun dengan pemancar ini dilakukan guna lebih memudahkan penyebaran informasi dari pemerintah ke daerah-daerah. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat sebelumnya masyarakat perbatasan ini lebih mudah mengakses TV Malaysia dibandingkan TVRI. Namun berkembangnya teknologi, dengan peralatan penangkap siaran seperti dengan menggunakan antena parabola, penduduk dapat menikmati siaran TVRI dan Stasiun TV lainnya yang ada di Indonesia. Dengan demikian siaran berita-berita dan informasi mengenai keadaan Indonesia sudah dapat dinikmati dan akan menambah pengetahuan penduduk perbatasan selain juga sebagai hiburan.

Air bersih dan Listrik

Air bersih merupakan suatu kebutuhan penduduk yang hakiki. Sudah selayaknya pemerintah memberikan kemudahan kepada penduduk untuk dapat memanfaatkan air bersih. Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pemerintah telah memfasilitasi penduduk dalam memperoleh akses air bersih dengan membuat instalasi air minum yang sudah dapat dinikmati oleh sebagian penduduk Nunukan dan Sebatik. Sampai sekarang belum ada perusahaan lain yang menyediakan air bersih selain PDAM Nunukan dan Sebatik. Khusus produksi PDAM Sebatik pada tahun 2004 sebanyak 92.599,2 m³, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak banyak banyak mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan jumlah pelanggan tidak mengalami peningkatan tetapi sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2001 jumlah pelanggan sebanyak 326 pelanggan sedangkan pada tahun 2004 sedikit berkurang menjadi 318 pelanggan. Pelanggan air minum PDAM lebih banyak didominasi oleh pelanggan rumah tangga/tempat tinggal/kantor pemerintah (69 persen).

Terlepas dari sudah tersedianya sarana air bersih yang dibangun oleh pemerintah, kenyataannya belum semua penduduk dapat memanfaatkan air bersih di Sebatik. Kalau kita perhatikan rumah-rumah di sepanjang jalan di wilayah Sebatik hampir semuanya mempunyai tempat penampungan air hujan. Air hujan banyak dimanfaatkan penduduk untuk mandi dan mencuci.

Sementara itu untuk sarana penerangan sebagian kecil penduduk di Sebatik telah dapat memanfaatkan listrik dari PLN. Namun demikian sampai saat ini masih banyak penduduk yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN terutama yang jauh dari tempat pembangkit listrik. Saat ini belum dibangun jaringan listrik ke dusun-dusun karena masih banyak keterbatasan dari PLN. Untuk itu di beberapa daerah yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, sebagian penduduk secara berkelompok mengusahakan generator pembangkit tenaga listrik yang dapat menerangi beberapa rumah penduduk. Seperti halnya di Dusun....Namun bagi penduduk yang

tinggalnya tidak mengelompok dalam satu pemukiman biasanya hanya menggunakan lampu tempel sebagai penerangan di rumahnya.

Pendidikan

Pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan melalui upaya peningkatan di bidang pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat diwujudkan. Pembangunan sarana pendidikan sebagai penunjang untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan. Pendidikan bagi penduduk usia sekolah sudah merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu pembangunan sarana pendidikan sebagai penunjang berlangsungnya proses belajar mengajar perlu terus ditingkatkan. Selama ini sejumlah sarana sekolah dasar hingga menengah sudah dibangun di wilayah Sebatik. Jumlah sarana sekolah dasar di Kecamatan Sebatik pada tahun 2005 sebanyak 23 sekolah dan sudah cukup merata tersebar di semua desa yang ada (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Sarana Sekolah Dasar dan Menengah di Kecamatan Sebatik, 2005.

No.	Desa	Jenis Sarana Sekolah						
		TK	SD	SMP	SMU	SMK	PT	Kursus
1	Pancang	-	4	1	1	-	-	-
2	Sei Nyamuk	1	3	1	-	-	1	2
3	Tanjung Aru	-	3	1	1	-	-	-
4	Tanjung Karang	-	2	1	-	-	-	1
5	Setabu	-	3	1	-	-	-	-
6	Binalawan	-	2	-	-	-	-	-
7	Liang Bunyu	-	4	-	-	-	-	-
8	Aji Kuning	1	2	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	23	5	2	-	1	3

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik, 2005

Di Desa Pancang, sekolah dasar yang ada sudah dapat menampung keinginan penduduk untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar. Sekolah dasar yang ada letaknya mudah dijangkau oleh masyarakat karena dekat dengan permukiman penduduk. Seperti diketahui di Desa Pancang, permukiman penduduk agak menyebar dekat dengan perkebunan coklat dan hal ini yang mengakibatkan telah terjadinya permukiman-permukiman baru. Oleh karena itu bangunan sekolah yang ada selayaknya dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang tersebar di beberapa permukiman. Sebagai contoh, sekolah dasar yang terdapat di Dusun Lapri (RT.9), yang didirikan sejak jamannya Kepala Desa H. Arsyad telah dimanfaatkan penduduk di sekitarnya. Awalnya SD tersebut berdiri belum terdapat bangunan. Setelah aktivitas belajar mengajar berjalan 4 tahun gedung SD tersebut baru berdiri, sekrang ini menjadi SD Negeri 015 Masago Baru. Yang dilengkapi dengan fasilitas perumahan guru.

Pentingnya pendidikan sangat dirasakan oleh masyarakat, namun demikian sebagian masyarakat masih belum mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya karena kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu dengan diprakarsai oleh Illkepada desa Sungai Pancang, telah berdiri sebuan madrasah ibtidaiah (MI) untuk menampung anak-anak yang kurang mampu. Untuk membangun sekolah ini diperlukan kerja keras dan kesabaran. Pada awalnya pengurus sekolah menyediakan alat tulis dan buku untuk murid sekolah sedangkan untuk honor guru biayanya dengan patungan pengurus dan donatur termasuk dari Camat Sebatik yang memang peduli terhadap pendidikan anak. Dari dulu di sekolah ini tidak dikenakan pungutan apapun karena pada umumnya murid-murid tergolong orang miskin. Sekolah ini sedikit-demi sedikit berkembang, dengan adanya bantuan dana PPK (Program Pengembangan Kecamatan) digunakan untuk membangun kantor dan perpustakaan sekolah.

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP dan SMA), di Sebatik sudah dibangun sarana pendidikan SMP dan SMA. Terdapat 5 buah SMP dan 2 buah SMA. Sekarang ini untuk menyekolahkan anak ke tingkat SMP atau SMA tidak perlu lagi ke Nunukan atau Tarakan. Walaupun demikian, dirasakan oleh

sebagian masyarakat letak sekolah yang ada jaraknya relatif jauh dari rumah mereka sehingga memerlukan biaya untuk transportasi. Keberadaan SMP dan SMA tidak seperti SD yang cukup merata tersebar di semua wilayah. Sekolah menengah ini hanya terdapat di wilayah desa tertentu yang terkadang sangat jauh dari desa lainnya. Namun demikian, adanya SMP dan SMA di Sebatik ini sudah cukup membantu penduduk dalam mendapatkan pendidikan tingkat menengah. Biaya pendidikan dapat ditekan dibandingkan mereka harus menyekolahkan anak ke Nunukan atau Tarakan. Selain dari pemerintah, peranan swasta cukup banyak dalam mengembangkan pendidikan di Sebatik terutama pada sekolah menengah ini. Sebagian SMP dan bahkan SMA didirikan oleh pihak swasta dengan dibantu oleh pemerintah.

Kesehatan

Berbagai sarana kesehatan telah dibangun oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sebatik. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penduduk yang sangat diharapkan. Untuk melayani kesehatan secara umum telah masyarakat dapat dilayani oleh Puskesmas maupun puskesmas pembantu yang saat penelitian ini dilakukan hampir terdapat di wilayah desa, kecuali di Tanjung Aru dan Sungai Pancang. Namun demikian keberadaan puskesmas di desa lainnya seperti misalnya di puskesmas di Desa Sungai Nyamuk dan Aji Kuning yang letaknya berdekatan dengan Desa Sungai Pancang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Dungai Pancang. Khusus untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat difasilitasi dalam kegiatan Posyandu yang selama ini masih tetap berlangsung di semua desa. Demikian pula dengan pelayanan keluarga berencana selain dilayani di posyandu juga dapat dilayani oleh Pos KB maupun BKIA (Tabel 3.4). Belum semua desa terdapat Pos KB, namun untuk pelayanan KB dapat dilakukan di Puskesmas, Pustu, posyandu, serta bidan-bidan di desa.

Tabel 3.4. Jumlah Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2005

No.	Desa	Jenis Sarana Kesehatan				
		Posyandu	Pos KB	BKIA	Apotik	Puskesmas/ Pustu
1	Pancang	4	-	-	2	-
2	Sei Nyamuk	5	1	1	5	1
3	Tanjung Aru	6	6	-	-	-
4	Tanjung Karang	5	-	-	-	1
5	Setabu	2	-	-	-	1
6	Binalawan	2	-	-	-	1
7	Liang Bunyu	4	-	-	-	1
8	Aji Kuning	3	-	-	1	1
	Jumlah	31	7	1	8	6

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik, 2005

Di Kecamatan Sebatik sampai saat penelitian ini dilakukan belum terdapat rumah sakit. Bagi masyarakat yang hendak berobat ke rumah sakit harus pergi ke Kota Nunukan atau ke Tarakan. Namun demikian mengingat jarak rumah sakit yang cukup jauh, penduduk lebih senang berobat ke Tawau Malaysia. Selain jaraknya yang lebih dekat dan aksesnya lebih mudah, pelayanan di rumah sakit atau klinik di Tawau dari keterangan beberapa orang yang pernah berobat jauh lebih baik dan biaya pengobatan tidak terlalu mahal.

Di Kecamatan Sebatik hanya terdapat Puskesmas yang dapat digunakan pelayanan pengobatan serta perawatan. Fasilitas puskesmas ini sudah cukup baik dengan tenaga dokter dan paramedis yang cukup memadai dapat melayani masyarakat untuk berobat (Tabel 3.5). Tenaga medis untuk melayani persalinan yaitu tenaga bidan sudah banyak tersebar di setiap desa, kecuali di desa Binalawan dan Sungai Pancang. Namun demikian, di semua desa sudah terdapat dukun yang terlatih untuk menangani persalinan. Pada kenyataannya,

dukun atau dikenal dengan sebutan *sandro* lebih banyak peranannya dalam menolong ibu-ibu yang melahirkan. Selama ini ibu-ibu hamil telah memanfaatkan pelayanan puskesmas dalam memeriksakan kehamilannya. Namun, pada saat melahirkan mereka lebih suka ditolong oleh sandro, walaupun terkadang diawasi pula oleh tenaga medis bidan.

Tabel 3.5. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2005

No.	Desa	Tenaga Kesehatan			
		Dokter praktek	Mantri kesehatan	Bidan desa	Dukun terlatih
1	Pancang	-	3	-	3
2	Sei Nyamuk	3	4	4	10
3	Tanjung Aru	-	-	2	2
4	Tanjung Karang	-	1	1	3
5	Setabu	-	5	1	5
6	Binalawan	--	-	-	1
7	Liang Bunyu	-	-	2	2
8	Aji Kuning	1	6	2	2
	Jumlah	4	9	12	28

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik, 2005

Bagi masyarakat yang cukup mampu cenderung lebih suka berobat ke Tawao, termasuk ibu-ibu yang hendak melahirkan bayinya. Lebih menguntungkan bila berobat di Tawao daripada di Nunukan, terutama dari segi jarak dan biaya perawatan. Masyarakat yang biasa berobat di klinik-klinik Tawao memiliki kartu identitas (I.C) yang menandakan bahwa mereka adalah warga negara Malaysia. Hal itu dibenarkan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Sebatik yang mengatakan bahwa dengan memiliki dua kewarganegaraan, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pengobatan dengan biaya sangat murah yaitu RM 1 untuk semua keperluan pengobatan termasuk operasi. Hal ini pula yang menyebabkan banyak warga

memilih merujuk berobat ke klinik-klinik di Tawao. Misalnya untuk kasus operasi seorang pasien, di RS Kabupaten Nunukan, biaya dapat mencapai hingga Rp 5-10 juta, sedangkan biaya operasi yang sama di klinik Tawao dengan kualitas yang baik hanya RM 750 atau sekitar Rp 2 juta. Dari Puskesmas tidak langsung memberi rujukan untuk pengobatan di klinik Tawao, tetapi akan diberi rujukan ke RS Nunukan atau ke RS Tarakan. Sedangkan rujukan klinik Tawao diberikan apabila warga Kecamatan Sebatik memiliki sanak saudara di Tawao.

3.1.3. Kelembagaan social ekonomi

Perkembangan perbankan juga cukup pesat, di kecamatan yang kecil dan terpencil terdapat 3 bank (BRI, BNI dan Danamon) yang melayani kebutuhan masyarakat. Semua bank yang terdapat di Kecamatan Sebatik ini terdapat di Sungai Nyamuk. Pesatnya perkembangan ekonomi dan besarnya peredaran uang di Sebatik terutama dari perdagangan membuat jasa bank sangat dibutuhkan. Modal-modal usaha yang banyak diperlukan oleh masyarakat relatif mudah diperoleh di wilayah ini. Upaya perbankan untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat disambut dengan baik oleh masyarakat. Selain bank yang membantu masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi terdapat pula beberapa koperasi yang diprakarsai oleh masyarakat. Namun demikian, belum semua desa yang ada di Kecamatan Sebatik terdapat koperasi. Koperasi hanya terdapat di Desa Sungai Nyamuk, Aji Kuning, Setabu dan Binalawan. Peranan koperasi bagi masyarakat dirasakan cukup bermanfaat, namun dalam perkembangannya masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Aktivitas ekonomi masyarakat terutama dalam perdagangan, pertanian dan lain-lain akan semakin dapat berkembang apabila keberadaan koperasi ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika jumlah dan dana koperasi itu dapat ditingkatkan dan dikelola dengan baik dan benar, maka sumbangan koperasi bagi perekonomian tentunya juga akan meningkat.

3.1.4. Kondisi sumber daya alam

Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup beragam yang terdiri dari sumberdaya alam daratan (pertanian dan perkebunan, pertambangan) dan sumber daya laut (perikanan). Potensi sumber daya alam ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di perbatasan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga sekarang perekonomian masyarakat Nunukan didominasi oleh sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, kehutanan serta pertambangan dan penggalian.

Pertanian masih merupakan sektor utama yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Padi merupakan salah satu produk unggulan dari kegiatan pertanian yang banyak dikembangkan di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Krayan, dan Sembakung. Hal ini merupakan salah satu misi program pembangunan Kabupaten Nunukan yaitu menciptakan daerah Kecamatan Sebatik, Krayan, Lumbis dan Sembakung sebagai daerah pertanian dan perkebunan (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2005). Luas panen dan hasil produksi padi ini selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Lahan padi sawah terluas terdapat di Kecamatan Krayan (2.563 ha.). Pada tahun 2003 produksi padi sawah mencapai 19.110 ton, meningkat menjadi 28.579 ton pada tahun 2004. Namun demikian, produksi padi ini jauh berkurang dibandingkan produksi padi pada tahun 2000 yaitu sebesar 57.586 ton (Bappeda dan BPS Kabupaten Nunukan, 2005a:14; Bappeda dan BPS Kabupaten Nunukan, 2005b:122-123)³⁴. Padi sawah dan padi ladang yang umumnya ditanam di wilayah Nunukan ini dapat ditanam 2 atau 3 kali dalam satu tahun. Sebagian besar sawah adalah tadah hujan yang mampu panen setahun dua kali, mengingat musim kemarau bukan halangan karena hujan turun sepanjang tahun.

³⁴ Bappeda dan BPS Kabupaten Nunukan, 2005a. *Profil Kabupaten Nunukan 2005*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan dan Bappeda Kabupaten Nunukan.

Selain pertanian padi, palawija, dan sayur mayur yang merupakan potensi di wilayah perbatasan ini, usaha perkebunan merupakan potensi andalan yang terus dikembangkan di wilayah Nunukan ini. Coklat, kelapa adalah tanaman yang banyak ditanam di wilayah ini dan merupakan komoditi yang sudah memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Perkebunan coklat lebih banyak diusahakan di Pulau Sebatik. Beberapa tahun terakhir ini, kelapa sawit sedang dikembangkan dan banyak ditanam di wilayah daratan Kabupaten Nunukan di Pulau Kalimantan. Luas lahan perkebunan ini mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2000 luas lahan coklat mencapai 7.575 Ha. dan terus meningkat menjadi 11.122 Ha pada tahun 2004 (Bappeda dan BPS Kabupaten Nunukan, 2005b:136-137). Tampaknya masyarakat cenderung untuk memperluas usaha perkebunan coklat. Hasil produksi coklat memberi keuntungan yang cukup bagi masyarakat. Harga jual coklat yang cukup tinggi dan tidak terpengaruh oleh keadaan krisis ekonomi serta pemasaran yang relatif mudah menyebabkan masyarakat tetap mengembangkan usaha perkebunan coklat.

Hutan di Kabupaten Nunukan ini merupakan salah satu sumber daya alam yang selalu ditingkatkan dalam pengelolaannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya disamping untuk melestarikan lingkungan. Kawasan hutan di Kabupaten Nunukan cukup potensial dengan keanekaragaman hayati termasuk berbagai jenis kayu dan hasil hutan lainnya. Hutan yang terdapat di Kabupaten Nunukan terdiri dari taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan kawasan budidaya non kehutanan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.79/Kpts-II/2001 kawasan hutan di Nunukan seluas 1.236.836,57 Ha. (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2005)³⁵.

³⁵ Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, 2005. *Kajian Prasarana Pemerintah Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah Kecamatan Sebatik dimana penelitian ini dilakukan merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Nunukan dengan potensi sumber daya alam yang sesuai untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan serta perikanan. Selama ini penduduk setempat telah memanfaatkan lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi sawah, ladang dan perkebunan yang mulai dibuka sejak tahun 1970an. Kedatangan orang-orang dari Sulawesi telah merubah tanah yang awalnya merupakan hutan dan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif. Usaha penduduk mengelola lahan sawah dan ladang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2004 luas panen padi sawah sebesar 2.296 Ha dan padi ladang seluas 80 ha. Produksi padi sawah sepanjang tahun 2004 sebanyak 11.462,30 ton dan padi ladang sebesar 117,60 ton. Luas areal persawahan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya seluas 1.425 Ha, padahal pada tahun 2001 luas lahan panen padi sudah seluas 2.299 Ha. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini luas lahan panen mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2004.³⁶(BPS Kabupaten Nunukan, 2004). Selain padi, palawija dan sayur mayur hasilnya cukup bagus. Hasil palawija dan sayur mayur selain dikonsumsi oleh masyarakat Sebatik sebagian hasilnya dipasarkan ke Tawau. Setiap pagi hari dari sungai Aji Kuning banyak perahu dan speedboat membawa hasil sayur mayur petani Sebatik ke pasar di Tawau.

Selama ini kebutuhan akan pangan pokok bagi masyarakat Sebatik khususnya dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Kebutuhan akan beras masih dengan mudah didapatkan di pulau ini. Selama ini kebutuhan beras jarang sekali didatangkan dari luar pulau ini. Kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari luar wilayah ini yang biasanya didatangkan dari Tawau adalah gula dan tepung terigu karena harganya relatif lebih murah dan mudah didupatkannya dibandingkan kalau harus berbelanja ke Nunukan atau Tarakan.

³⁶ BPS Kabupaten Nunukan, 2004. Kecamatan Sebatik dalam Angka 2004. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan

Pulau Sebatik yang separuh masuk ke dalam wilayah negara Indonesia, banyak ditanami coklat oleh penduduk setempat. Tidak heran kalau di pulau yang kecil ini dikenal sebagai penghasil coklat yang sebagian besar hasilnya dipasarkan ke Tawau, Malaysia. Luas areal tanaman coklat di Kecamatan Sebatik merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Nunukan yaitu seluas 9.225 ha.³⁷ Selain coklat penduduk menanam kelapa, kopi, lada, cengkeh. Kelapa sawit merupakan potensi andalan di wilayah Kabupaten Nunukan yang sedang dikembangkan, namun di Pulau Sebatik belum banyak penduduk yang menanam dan mengelola kebun kelapa sawit. Sebagian penduduk sudah sejak lama menanam kelapa yang hasilnya cukup banyak. Keberadaan tanaman coklat di Pulau Sebatik ini tidak lama setelah kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan dan orang-orang yang kembali dari Malaysia. Menurut keterangan dari beberapa nara sumber, sebagian dari mereka membawa bibit coklat dari Malaysia dan dari Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, orang-orang Sulawesi Selatan yang kembali dari Malaysia sebelumnya pernah bekerja di perkebunan coklat dan kelapa sawit. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari negeri seberang mereka membuka lahan di Pulau Sebatik. Selain itu, di daerah Sulawesi Selatan usaha perkebunan coklat sudah lebih dulu berkembang, jadi mengelola perkebunan coklat sudah terbiasa bagi penduduk. Produksi tanaman coklat dari Kecamatan Sebatik mencapai 14.383 ton pada tahun 2004, sedangkan untuk hasil tanaman kelapa sebesar 5.212,60 ton.

Usaha perkebunan coklat masyarakat yang tersebar di beberapa desa khususnya di Desa Aji Kuning dan Desa Sungai Pancang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Di Desa Pancang khususnya dimana penelitian ini dilakukan, di beberapa dusun seperti Dusun Lapri, Sebrang, dan Sungai Pancang Bukit Indah, hampir semua lahan yang ada dipenuhi dengan tanaman coklat. Perkebunan coklat rakyat ini cukup

³⁷ Bappeda Kabupaten Nunukan dan BPS Kabupaten Nunukan, 2005b. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2004. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan dan Bappeda Nunukan.

berkembang dengan pesat di Desa Sungai Pancang Sejak kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan. Sebagian pohon sudah berumur tua dan hal ini menjadi salah satu penyebab produksi coklat dapat menurun. Namun demikian, sebagian petani coklat sudah mulai meremajakan tanaman coklatnya. Hal ini dikarenakan prospek tanaman coklat ini sangat bagus. Harganya cukup tinggi dan pemasarannya relatif mudah sehingga secara ekonomi cukup menguntungkan³⁸.

Sebagian petani coklat memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, terutama petani-petani “perintis” yang datang pada periode tahun 1970-1980 an. Ketika itu, mereka tidak perlu membeli lahan akan tetapi cukup dengan minta ijin kepala kampung untuk membukan dan mengolah lahan. Oleh karena itu bagi mereka yang pada awalnya rajin mengolah lahan akan mendapatkan lahan yang cukup luas. Namun demikian sekitar akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990, orang yang datang hendak berkebun sudah harus membeli lahan. Bagi mereka yang tidak mampu membeli lahan, terpaksa menjadi buruh perkebunan dengan mendapatkan gaji harian atau mingguan atau mengerjakan kebun orang dengan sistem bagi

³⁸ Di wilayah Sebatik ini para petani biasanya menjual hasil coklatnya ke Tawau secara langsung atau melalui pedagang pengumpul sehingga petani tidak perlu susah payah mencari pembeli. Harga pasaran coklat pada saat penelitian ini dilakukan sekitar Rp 10.000 atau RM 4,30, harga saat ini relative rendah karena bukan musim buah coklat. Menurut informasi harga coklat akan semakin tinggi bila musim coklat berbuah tiba dan dapat mencapai RM5-6. Musim buah itu terjadi antara bulan September hingga Desember. Harga yang tinggi juga tergantung dari kualitas coklat atau kadar kekeringan yang tinggi. Oleh karena itu sangat diperlukan alat pengering selain dapat juga dengan matahari. Coklat yang dikeringkan dengan alat pengering kualitasnya lebih bagus dan proses pengeringan lebih cepat.

hasil³⁹. Harga lahan perkebunan saat ini cukup mahal, hanya orang yang mampu saja yang dapat membeli lahan perkebunan.⁴⁰

Buah-buahan terutama pisang merupakan produksi andalan kecamatan sebatik, pemasarannya hingga ke Tawau dan Tarakan, produksinya sepanjang tahun 2004 mencapai 668 ton. Produksi pisang ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hasil pengamatan di lapangan hampir di tiap pekarangan ataupun lahan terdapat pohon pisang. Selain itu, hasil pisang dari kebun tampak ditumpuk di depan rumah atau didekat jalan-jalan yang telah siap untuk dijual. Hasil pisang yang melimpah ini terkadang tidak dapat terjual akhirnya ditinggalkan saja. Harga pisang cukup murah, satu tandan pisang dihargai RM 2,50 di Tawau harga jualnya ingá RM 3,50. Biasanya sudah ada pengumpul yang mencari pisang ke desa-desa, sehingga penduduk tidak perlu membawanya ke pasar. Pengumpul ini kemudian menjualnya ke Tawau. Selama ini potensi pisang yang cukup banyak belum dimanfaatkan penduduk untuk mencoba diolah menjadi bentuk makanan lain. Selama ini pisang yang diambil hasilnya langsung dijual. Usaha industri rumah tangga untuk mengolah pisang agar mempunyai nilai tambah belum berkembang di wilayah Sebatik. Padahal bila hal ini dapat dilakukan akan mendapatkan penghasilan tambahan bagi rumah tangga.

Perikanan laut khususnya merupakan salah satu potensi andalan wilayah perbatasan ini. Pulau Sebatik yang dikelilingi oleh lautan serta ditunjang oleh penduduknya yang memiliki matapencaharian sebagai nelayan sangat mendukung untuk pengelolaan dan pengembangan perikanan. Mereka merupakan orang-orang dari Sulawesi Selatan yang pada dasarnya kehidupan nelayan

³⁹ Gaji bagi buruh kebun sekitar RM 7-10 per hari atau antara RM 210-300 per minggu. Sistem bagi hasil yang sering terjadi adalah 1:1 (bila modal dari penggarap) atau 2:1 (modal dari pemilik kebun)

⁴⁰ Harga tanah perkebunan menurut penuturan salah satu narasumber yang datang sekitar tahun 1986 sekitar Rp 750.000/bagian. Sekarang ini harga kebun yang sudah jadi seluas 1 bagian (2 ha.) sekitar RM15.000-20.000, hal ini tergantung dari jumlah pohon yang ada dan produksi coklatnya.

sudah tidak asing lagi. Hasil tangkapan nelayan di wilayah Sebatik lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Perikanan laut menghasilkan 3.202.250 kg pada tahun 2004. Namun demikian, produksi tangkapan ikan ini sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.603.184 kg. (BPS Nunukan, 2004: 38).

Perikanan laut hasilnya lebih banyak untuk dijual ke Tawau, sedangkan untuk konsumsi penduduk sangat sedikit. Kenyataannya untuk mencari ikan di Sebatik saat ini agak sulit, di pasar-pasar yang ada jarang penjual yang menjual ikan segar dari laut. Biasanya kalau ingin membeli ikan penduduk akan langsung mencari ke nelayan yang pulang dengan membawa ikan hasil tangkapan sisa dari penjualan di Tawau. Pada umumnya para nelayan mencari ikan di sekitar perairan Sebatik sampai ke wilayah perairan Berau. Ketika mereka mendapat ikan hasil tangkapan langsung dibawa ke Tawau karena sudah ada pembeli di sana yaitu para tauke yang biasanya memberikan modal kepada para nelayan. Beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini sudah dibangun oleh pemerintah tempat pelelangan ikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga nelayan lebih senang menjualnya langsung ke Tawau. Sementara itu kebutuhan akan es untuk tangkapan ikan tidak dapat diperoleh di Sebatik, mereka harus membelinya di Tawau. Di sebatik pernah dibangun pabrik es oleh salah seorang pengusaha, akan tetapi saat penelitian ini dilakukan sudah tidak berproduksi lagi. Menurut nelayan setempat, kualitas es yang dibeli di Tawau lebih bagus dan tahan lama dibandingkan dengan es yang diproduksi di Sebatik. Keberadaan nelayan Sebatik sangat tergantung pada Tawau, baik untuk modal usaha, pemasaran, dan keperluan nelayan lainnya. Namun demikian, dengan ketergantungan ini sebagian nelayan masih tetap dapat bekerja yang hasilnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Implikasi dari hal ini adalah sulitnya mendapatkan ikan laut di pasar-pasar di wilayah Sebatik. Sangat jarang ditemukan ikan laut di pasar maupun di tempat pelelangan ikan, pada umumnya ikan bandeng atau ikan-ikan dari tambak yang lebih mudah didapatkan. Ikan-ikan tersebut menurut informasi dari beberapa penjual

didatangkan dari Tarakan. Di Sebatik beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa tambak ikan maupun udang namun sekarang ini usaha pertambakan di Sebatik dapat dikatakan sudah berkurang. Oleh karena itu ikan bandeng saat ini banyak didatangkan dari Tarakan. Potensi ikan di sekitar perairan Sebatik sejak beberapa tahun belakangan ini sangat berkurang sehingga nelayan harus mencari ikan sampai ke wilayah perairan lainnya. Selain itu persaingan nelayan tradisional dengan nelayan yang sudah menggunakan kapal pukat harimau (trawl) atau armada yang lebih besar menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional semakin jauh berkurang. Padahal sebenarnya kapal-kapal pukat harimau tersebut tidak diperbolehkan beroperasi di sekitar perairan di wilayah Nunukan, namun kenyataannya saat penelitian dilakukan masih didapatkan kapal-kapal yang sedang berlabuh di dekat dermaga Sungai Nyamuk. Keberadaan kapal-kapal penangkap ikan ini sering dikeluhkan oleh para nelayan. Bahkan menurut keterangan beberapa nelayan yang dijumpai ketika penelitian ini dilakukan, mereka sempat melakukan unjuk rasa menentang keberadaan kapal-kapal pukat harimau.

3.2. Kondisi Kependudukan

3.2.1. Pertumbuhan dan komposisi

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Nunukan tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berjumlah 109.527 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 7,68 jiwa/km². Dibandingkan dengan tahun 2003, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen⁴¹. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan salah satu dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat para pendatang baru, hal ini juga disebabkan oleh letak Kabupaten Nunukan yang sangat strategis sebagai jalur keluar dari keragaman asalnya, penduduk di Kecamatan Sebatik rata-rata merupakan

⁴¹ Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2004.

pendatang dari Sulawesi yang pada awal kedatangannya hanya merantau yang kemudian membuka lahan dan menetap di Pulau Sebatik secara turun-temurun. Menurut penuturan salah satu perangkat Desa Sebatik, penduduk yang awalnya membuka lahan dan menetap di Sebatik berasal dari Bone yang kemudian menjadi penduduk pertama yang mengolah lahan di Sebatik. Sedangkan penduduk asli Pulau Sebatik adalah suku Tidung yang sebagian besar bermukim di pantai Barat pulau, antara lain di Bambang, Liang Bunyu, Setabu dan Mantikas, dan mata pencaharian penduduk suku Tidung adalah nelayan. Sedangkan suku Bugis banyak menempati bagian Timur pantai yang bekerja sebagai nelayan dan petani. Apabila dilihat dari jenis kelamin penduduk, jumlah penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dibanding jumlah penduduk perempuan di hampir semua kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Nunukan yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit, yaitu hanya 5 wilayah desa.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan yang menjadi daerah transit khususnya di Kecamatan Nunukan bagi pendatang yang akan pergi ke luar negeri. Hal ini nampak pada jumlah pelintas batas yang terdaftar di kantor Imigrasi. Pada tahun 2003 jumlah pelintas batas warga negara Indonesia tercatat sebanyak 451.253 orang, dengan rincian yang datang 102.129 orang dan 174.562 orang yang berangkat. Sedangkan warga negara Malaysia yang melintas batas mengalami peningkatan sebesar 7,38% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 4.228 orang pada tahun 2002 menjadi 6.684 orang pada tahun 2003⁴². Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah perbatasan adalah Pelabuhan Tunon Taka sebagai pelabuhan transit yang selama ini digunakan sebagai salah satu mata rantai perdagangan beras internasional. Sebab padi merupakan produk unggulan yang banyak dikembangkan di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Sebatik.

⁴² Renstra Kalimantan Timur 2004-2008

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nunukan Tahun 2004

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Krayan	3.676	3.262	6.938	112,69
Krayan Selatan	1.061	916	1.977	115,83
Lumbis	4.470	4.130	8.573	108,94
Sembakung	3.696	3.096	6.792	119,38
Nunukan	25.102	20.644	45.746	121,59
Sebatik	15.766	13.638	29.404	115,60
Sebuku	5.695	4.402	10.097	129,37
Jumlah	59.466	50.061	109.527	118,79

Sumber: BPS, 2004. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2004

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Sebatik, jumlah penduduk Kecamatan sebatik pada tahun 2004 sebesar 27.993 jiwa. Bila dilihat dari jumlah penduduk menurut desa pada tahun 2004, Desa Sungai Nyamuk merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 21 % dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sebatik, sedangkan desa dengan persentase jumlah penduduk paling kecil adalah wilayah Desa Binalawan yaitu hanya 7 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Apabila dilihat dari persentase jumlah KK yang menempati wilayah 8 desa di Kecamatan Sebatik, jumlah KK terbanyak terdapat di wilayah Desa Sungai Nyamuk (22 %), Desa Pancang (18 %), Desa Tanjung Aru (16 %) dan Desa Aji Kuning (13 %).

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Sebatik Tahun 2004

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
Pancang	2.603	2.438	5.041	106.77
Sungai Nyamuk	3.294	2.784	6.078	118.32
Tanjung Aru	2.321	2.139	4.460	108.51
Tanjung Karang	1.579	1.391	2.970	113.52
Setabu	1.069	948	2.017	0.11
Liang Bunyu	1.306	1.089	2.395	119.93
Binalawan	952	784	1.736	121.43
Aji Kuning	1.656	1.640	3.296	100.98
Jumlah	14.780	13.213	27.993	111.86

Sumber : BPS, 2004. Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2004

Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Sebatik⁴³, jumlah penduduk di Desa Pancang adalah 5.041 jiwa dengan komposisi penduduk desa tersebut adalah sebagai berikut, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.603 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.438 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 938 orang. Jumlah penduduk ini memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data⁴⁴ diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pancang terbanyak pada tahun 2003 yaitu berjumlah 8.400 jiwa. Sedangkan pada tahun 2004, jumlah penduduk menurun menjadi 5.170 jiwa dan pada tahun 2005 sedikit mengalami penambahan yaitu sebesar 6,3 persen menjadi 5.117 jiwa. Dengan demikian pada tahun 2005, rata-rata jiwa per KK di Desa Pancang adalah sebesar 4,42. Angka tersebut merupakan penurunan dari

⁴³ Laporan Pendataan Pemekaran Kecamatan Sebatik

⁴⁴ Kecamatan Sebatik Dalam Angka Tahun 2004

jumlah rata-rata jiwa per KK pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,72⁴⁵. Dengan kepadatan penduduk 3,72 jiwa per Ha, wilayah Desa Sungai Pancang termasuk wilayah yang padat dibandingkan dengan wilayah desa lain di Kecamatan Sebatik.

Sebagian besar penduduk Sebatik adalah petani kebun. Untuk hasil perkebunan di Desa Sungai Pancang masih didominasi oleh kakao yang selama ini hasilnya dijual ke Tawao. Selain petani, nelayan juga merupakan sebagian mata pencaharian penduduk walaupun selama ini hasil tangkapannya tidak menentu. Nelayan yang banyak beroperasi adalah nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap sederhana untuk melakukan kegiatan melaut. Pada umumnya, nelayan di wilayah Kecamatan Sebatik sangat bergantung kepada para *tauke* di Tawao sebagai pihak yang sebagian besar memberikan modal pinjaman kepada nelayan. Nelayan-nelayan ini wajib menjual hasil tangkapannya kepada *tauke* di Tawao dengan harga yang rendah, sehingga keuntungan nelayan Sebatik tidak terlalu banyak. Selama ini, nelayan sudah mencoba mengusulkan pada pemerintah untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal, tetapi hingga saat ini belum terlaksana. Bantuan modal yang diharapkan nelayan berupa bantuan kredit lunak untuk mendapatkan alat-alat tangkap seperti pukat, jaring atau perahu. Apabila harus membayar kredit dengan bunga tinggi pun masih dirasa memberatkan pihak nelayan⁴⁶. Jika nelayan menggunakan modal pribadi jelas masih sangat kurang dan hal ini yang menyebabkan nelayan di Desa Pancang banyak meminta bantuan modal kepada *tauke* di Tawao dan

⁴⁵ Kecamatan Sebatik Dalam Angka Tahun 2004

⁴⁶ Menurut penuturan salah satu nelayan di Desa Sungai Pancang, modal satu armada nelayan sekitar Rp 60 juta dengan perincian modal untuk perahu sekitar Rp 10 juta tetapi belum termasuk mesinnya. Untuk mendapatkan sebuah perahu dengan mesin, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 16 juta hingga Rp 24 juta. Sedangkan harga pukat berkisar antara Rp 600 ribu sampai dengan Rp 700 ribu sementara untuk satu armada nelayan biasanya membutuhkan sekitar 30 sampai dengan 40 buah pukat dan masih memerlukan tali pengait. Apabila dirinci keseluruhan untuk 40 buah pukat biaya yang dibutuhkan nelayan adalah sebesar Rp 700 ribu x 40 = Rp 28 juta.

sebagai kompensasinya, nelayan tidak diijinkan menjual hasil tangkapannya kepada *tauke* lain. Sebenarnya nelayan dapat menjual armada perahu kepada nelayan lain dengan harga sekitar Rp 15 juta, tetapi nelayan yang membeli armada perahu tersebut tetap harus menjual hasil tangkapan kepada *tauke* yang memiliki pukat. Selama ini nelayan masih *melaut* karena berapa pun hasil melaut selalu di terima oleh *tauke*. Misalnya, nelayan mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 10 kg ikan, maka ketika nelayan menjual kepada *tauke* tetap akan mendapatkan uang hasil penjualan mereka sebesar Rp 350 ribu tanpa di potong biaya apapun. Hasil penjualan nelayan akan dipotong apabila hasil tangkapan nelayan banyak dan mendapatkan untung maka diberikan ongkos melaut sebesar Rp 350 ribu.

Menurut para nelayan, biaya untuk melaut dapat dikatakan sangat mahal, sehingga untuk sekali perjalanan, dalam satu armada kapal nelayan hanya terdiri atas 2 – 3 awak kapal walaupun akan terasa berat pekerjaan yang dilakukan dibandingkan apabila jumlah awak kapal lebih dari 3 orang. Untuk hasil yang didapatkan dalam satu kali melaut, biasanya akan dibagi diantara para awak perahu dengan perhitungan terperinci sebagai berikut, misalnya hasil menjual hasil tangkapan adalah Rp 300 ribu, maka Rp 300 ribu tersebut akan dibagi menjadi dua dengan pemilik perahu, sehingga awak perahu akan mendapatkan Rp 150 ribu yang kemudian dibagi menjadi dua bagian masing-masing awak akan mendapatkan Rp 75 ribu. Tetapi menurut para nelayan, mereka masih mendapat ongkos jalan sekitar Rp 100 ribu diluar hasil penjualan tangkapan tersebut. Ikan yang selama ini banyak ditangkap oleh nelayan Desa Sungai Pancang adalah jenis ikan tenggiri, karena pasarnya sangat menjanjikan dibandingkan dengan jenis ikan cakalang. Untuk saat ini, kendala yang dihadapi oleh para nelayan tradisional di wilayah Pulau Sebatik antara lain adalah semakin banyaknya kapal-kapal *trawl* yang beroperasi, sehingga nelayan tradisional merasa hasil tangkapan tidak sebanyak sebelumnya. Sehingga mereka harus melaut ke wilayah perairan yang lebih jauh dan bahkan ada yang mencapai wilayah Berau.

3.2.2. Kualitas sumber daya manusia

Kasus kematian bayi atau ibu hamil tidak ada, hanya yang berkaitan dengan kasus kekurangan gizi yang disebabkan kurangnya perhatian dan pengetahuan keluarga terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Puskesmas Kecamatan Sebatik bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan Sebatik memeluk agama Islam dan selama ini fenomena yang terjadi adalah mereka lebih mementingkan kebutuhan “naik haji” dari pada kebutuhan untuk kesehatan. Karena sebenarnya, penghasilan yang didapat oleh sebagian keluarga di Kecamatan Sebatik tidak tergolong rendah untuk ukuran sebuah keluarga, karena mereka mampu membiayai ongkos naik haji. Kesadaran masyarakat yang masih kurang adalah untuk memprioritaskan skala kebutuhan yang seharusnya didahulukan, dalam hal ini adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Selain kasus kurangnya kesadaran menjaga kesehatan, masyarakat di sekitar Desa Sungai Pancang dan Kecamatan Sebatik juga masih percaya kepada dukun desa atau yang biasa disebut *sandro*. Dukun ini dipercaya oleh keluarga secara turun-temurun untuk membantu apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang sakit atau melahirkan. Untuk kasus kurang gizi balita memang sudah jarang ditemukan di Kecamatan Sebatik, karena pada dasarnya ibu-ibu sudah mulai menyadari pentingnya memberikan imunisasi kepada anaknya di usia dini. Tetapi khusus mengenai kesadaran hidup sehat masih terbatas pada penduduk yang bermukim di wilayah kecamatan kota, sedangkan yang bermukim di wilayah pinggiran masih membutuhkan pendekatan-pendekatan lebih lanjut mengenai kesadaran untuk memprioritaskan alokasi dana kesehatan. Prioritas pihak Puskesmas sejauh ini ingin mengaktifkan kegiatan di Posyandu yang sudah ada, sehingga penduduk yang membutuhkan pelayanan imunisasi tidak perlu datang langsung ke Puskesmas. Kasus yang selama ini terjadi, masyarakat belum secara maksimal menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan Sebatik. Jumlah total untuk wilayah kerja tenaga medis di pulau Sebatik terdapat 3 buah

Puskesmas yaitu Puskesmas di Aji Kuning, Sungai Nyamuk dan Setabu. Untuk wilayah Sungai Nyamuk terdapat 3 orang tenaga bidan. Beberapa keluarga di wilayah Kecamatan Sebatik biasanya meminta surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke klinik di Tawao, karena dengan biaya murah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan dan obat-obatan yang berkualitas baik walaupun hanya periksa di klinik-klinik.

Salah satu hal lagi yang juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia selain kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai fasilitas pelayanan sosial lainnya. Salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga pengajar yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan. Rasio murid guru merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban kerja seorang guru terhadap muridnya. Rasio ini juga menggambarkan mutu pendidikan di kelas, karena semakin besar angka ini menunjukkan semakin berat pula tanggungjawab seorang guru. Rasio murid guru untuk tingkat SD pada tahun 2004 mengalami peningkatan, baik negeri maupun swasta yaitu sebesar 23 untuk SD negeri dan 22 untuk SD swasta. Untuk tingkat SLTP rasio murid guru sebesar 13, tingkat SLTA sebesar 9 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah siswa SLTA dan tersedianya guru yang semakin sedikit dan diindikasikan bahwa jumlah murid SLTP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menurun. Selain fasilitas pendidikan dasar dan menengah, Kabupaten Nunukan juga memiliki fasilitas pendidikan untuk kegiatan perkuliahan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Tarakan yang memiliki 400 mahasiswa dengan 22 tenaga pengajar. Kecamatan Sebatik sendiri pada tahun 2005 memiliki 23 sekolah dasar dengan jumlah murid 3.202 pada tahun 2005. Sekolah tingkat lanjutan berjumlah 5 buah dengan jumlah murid sebesar 624 siswa sedangkan sekolah lanjutan sebanyak 2 buah dengan jumlah murid sebanyak 222 siswa. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh

Kecamatan Sebatik terletak di wilayah Desa Sungai Nyamuk, begitu pula dengan sarana kursus sebanyak 2 buah.

Tabel 3.8. Data Jumlah Siswa TK, SD, SMP, SMU, SMK Di Kecamatan Sebatik Tahun 2005

Desa	Jumlah Siswa						
	TK	SD	SMP	SMU	SMK	PT	KURSUS
Pancang	39	565	150	77	4	6	1
Sungai Nyamuk	123	821	36	-	-	43	21
Tanjung Aru	12	426	197	91	1	34	-
Tanjung Karang	2	295	46	23	1	2	3
Setabu	-	345	130	-	-	-	-
Binalawan	-	156	45	19	6	3	-
Liang Bunyu	-	394	-	-	-	-	-
Aji Kuning	1	200	20	12	2	5	1
Jumlah	177	3.202	624	222	14	93	26

Sumber: Laporan Pendataan Pemekaran Kecamatan Sebatik Tahun 2005

BAB IV

WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA

4.1. Kondisi Fisik Daerah

4.1.1. *Letak, aksesibilitas dan tipologi wilayah*

Bagian ini mendiskripsikan kondisi wilayah kepulauan Sangihe yang berhubungan dengan situasi kemiskinan sosial-demografi. Dari aspek wilayah administrasi, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum tahun 2002, wilayah kabupaten ini masih menjadi satu kesatuan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe-Talaud. Kabupaten Kepulauan Sangihe terpisah dari Kabupaten Kepulauan Sangihe-Talaud berdasarkan UU.No.5 Tahun 2002.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu wilayah perbatasan di bagian utara Indonesia. Wilayah perbatasan tersebut meliputi kepulauan sekitar Kawio, Kawaluso, Nusa dan Bukide. Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Secara lebih spesifik, wilayah perbatasan tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tabukan Utara⁴⁷. Dalam wilayah Kecamatan Nusa Tabukan terdapat dua pulau utama yaitu P. Nusa dan P. Bukide, sedang desa yang paling utara atau terluar adalah P. Marore. Luas pulau ini hanya 5,8 km² yang sebagian besar wilayahnya merupakan bukit, sehingga permukiman hanya berada di dataran pantai sebelah selatan dan timur. Daerah ini telah berfungsi

⁴⁷ Kecamatan lain yang juga berbatasan langsung dengan Negara Filipina adalah Kecamatan Nusa Tabukan yang sebelumnya termasuk daerah Tabukan Utara.

sebagai “*Check Point Border Crossing*” karena merupakan pulau terluar dan tidak jauh dari negara tetangga.

Wilayah Kepulauan Sangihe mempunyai luas daratan 1.013 km² dan luas lautan 19.250 km². Dengan kata lain wilayah tersebut merupakan wilayah maritim karena 95 persen luas wilayah adalah lautan (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005). Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai satu pulau besar dan 111 pulau kecil, tetapi hanya sekitar 30 pulau yang dihuni oleh penduduk. Letak pulau-pulau tersebut menyebar dari P.Biaro (paling dekat dengan Kota Manado) hingga P.Marore yang paling dekat dengan P. Balut di Mindanau, Filipina. Tiga pulau berpenghuni yang tergolong besar yaitu Sangir Besar, Siau dan Tagulandang. Adapun pulau-pulau yang tidak ada permukiman penduduk antara lain Liang, Buang, dan Poa. Keadaan geografis demikian telah mengkondisikan daerah Sangihe adalah terisolir, jauh dari pusat pertumbuhan.

Dalam konteks perencanaan daerah, pulau-pulau tersebut dikelompokkan menjadi 6 klaster, yaitu (1) klaster daerah perbatasan; (2) klaster Sangihe (Sangir Besar), (3) klaster P. Kahakitang, (4) klaster P.Siau, (5) klaster Tagulandang, dan (6) klaster Biaro. Pembagian klaster tersebut dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan yang mencakup pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meskipun secara strategi pembangunan telah ditetapkan menurut klaster namun dalam kenyataan belum menunjukkan hubungan fungsional pembangunan lintas sektor secara bersinergis.

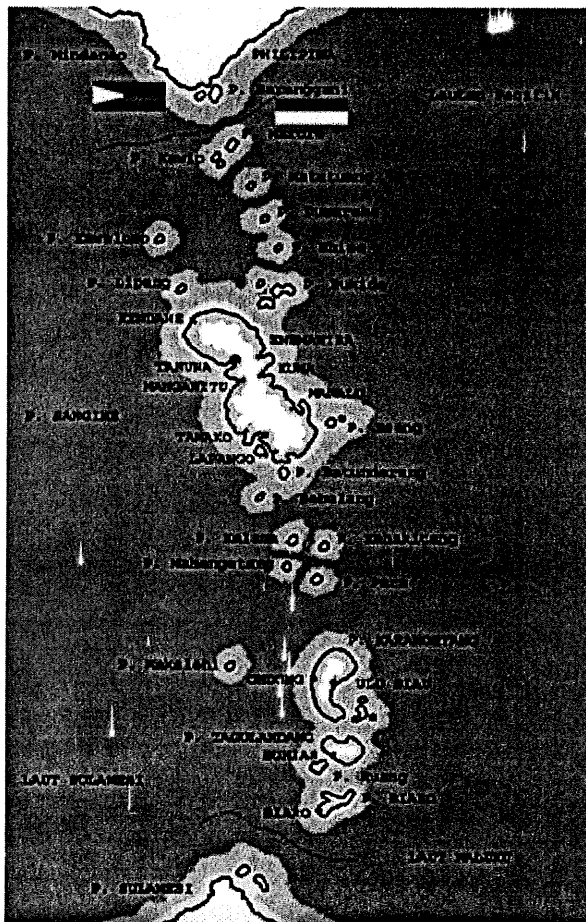
Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di Tahuna, yang menempati dataran rendah sempit di P. Sangir Besar. Penduduk setempat sering menyebut nama Taruna sebagai pengganti nama Tahuna. Jarak antara Tahuna ke Manado sekitar 142 mil laut. Untuk mencapai kota tersebut dari Kota Manado dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui laut atau melalui udara.

Secara geografis kepulauan Sangihe mempunyai topografi yang kasar yaitu berbukit-bukit terjal, sehingga hanya sebagian kecil wilayah merupakan dataran rendah di pesisir. Dataran rendah tersebut

umumnya menjadi lokasi permukiman penduduk, meskipun banyak penduduk yang mendirikan rumah di perbukitan. Secara umum wilayah Sangir berada pada jalur gunung berapi yang masih aktif, G.Ruang, G.Awu, dan G. Karangetang. Gunung-gunung tersebut membawa berkah berupa kesuburan tanah karena abu vulkanis, tetapi pada saat terjadi erupsi menimbulkan korban jiwa dan harta-benda penduduk. Erupsi gunung-gunung berapi tersebut telah mendorong penduduk yang tinggal di sekitarnya untuk berpindah ke daerah yang dianggap aman. Bahkan akibat letusan G.Ruang tahun 2002, daerah tersebut tertutup bagi permukiman penduduk. Di wilayah administrasi Kepulauan Sangihe juga terdapat dua gunung berapi di bawah laut, yaitu G. Mahangetang dan G. Banua Wuhu.

Pada peta wilayah Sangihe terlihat bahwa lokasi Kabupaten Sangihe berada pada lintasan antara Pulau Sulawesi dengan negara tetangga Filipina dan lebih jauh ke arah Asia Timur. Secara kemaritiman dan geologis wilayah kepulauan Sangihe berada pada pengaruh Samudera Pasifik. Kondisi geografis yang demikian telah menempatkan wilayah Kepulauan Sangihe mempunyai angin Muson Barat yang bertiup antara Bulan September-Februari. Pada saat Muson Barat bertiup, selain menimbulkan gelombang laut besar, juga diikuti dengan curah hujan tinggi. Adapun pada Bulan Juli-September daerah tersebut bertiup angin Muson Timur yang mengakibatkan gelombang laut yang tinggi pula. Pada saat itu tinggi gelombang bisa mencapai 3 m. Kondisi laut yang dianggap tenang hanya terjadi pada saat musim peralihan yang jatuh pada Bulan Maret-Mei dan Oktober-November. Kondisi laut tersebut telah mempengaruhi kehidupan nelayan yang kegiatannya sangat dipengaruhi kondisi musim. Bagi nelayan bulan-bulan yang kondusif untuk berlayar hanya terjadi pada musim peralihan. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh tingkat penguasaan teknologi nelayan Sangir yang masih sederhana sehingga belum mampu mengarungi laut pada saat ombak besar. Mereka juga belum memiliki tradisi pemanfaatan energi angin untuk berlayar. Hampir semua perahu motor yang ada umumnya bercadik, guna menjaga keseimbangan perahu bila melaju di laut.

Peta 2. Perbatasan Sulawesi Utara - Filipina



Sumber: website Kabupaten Sangihe Talaud
<http://www.sangihe.go.id/peta/html>

4.1.2. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi

a. Pendidikan

Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel ini memperlihatkan bahwa jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 295 buah. Sekolah Dasar tersebut tersebar sampai pada tingkat desa. Kecamatan yang mempunyai jumlah desa banyak juga memiliki jumlah SD yang banyak pula. Pada tahun 2004/2005, jumlah murid maupun jumlah guru SD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2003/2004. Penurunan jumlah murid dan jumlah guru tersebut masing-masing 3,8 persen dan 8,2 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya murid sekolah SD yang mengalami putus sekolah atau pindah sekolah karena berbagai alasan. Keluarga yang pindah dari daerah Sangihe tentunya akan membawa anaknya, termasuk mereka yang sedang sekolah SD.

Adapun penurunan jumlah guru SD antara lain karena beberapa guru telah memasuki masa pensiun, sementara untuk mengangkat guru baru masih mengalami hambatan. Selain itu guru cenderung keberatan untuk dimutasikan ke daerah pulau-pulau kecil karena rendahnya aksesibilitas daerah tersebut. Sebagai contoh lokasi bangunan SD yang ada di Dusun III Desa Nanedakele berada di puncak bukit, karena sulit memperoleh lahan untuk mendirikan sekolah. Dusun tersebut juga tidak mempunyai sarana transportasi umum yang menghubungkan dengan kecamatan maupun dengan daratan P. Sangir Besar di Petta. Satu-satunya jenis transportasi adalah sampan-sampan milik perorangan.

Tabel 4.1. Jumlah Prasarana Pendidikan dan Rasio Murid Guru, Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 2004.

Kecamatan	Jumlah Sekolah				Rasio Murid-Guru		
	SD	SLTP	SLTA	PT	SD	SLTP	SLTA
Tagulandang	19	3	1	-	17	41	28
Biaro	5	1	-	-	20	16	-
Tagulandang Utara	9	2	-	-	20	25	-
Siau Timur	21	4	1	-	13	16	18
Siau Tim.Selatan	12	2	-	-	15	10	-
Siau Barat	15	4	1	-	10	10	17
Siau Barat Sel.	10	1	-	-	10	12	-
Siau Barat Utr.	9	1	-	-	9	15	-
Manganitu Selatan	15	3	-	-	18	25	-
Tatoareng	11	2	-	-	19	9	-
Tamako	22	3	1	-	12	16	18
Tabukan Selatan	14	1	1	-	12	23	57
Tabukan Sel.Tengah	11	2	1	-	8	22	22
Tabukan Sel.Tenggara	4	1	-	-	15	17	-
Tabukan Tengah	22	4	-	-	14	16	-
Manganitu	21	3	1	-	13	23	11
Tahuna	26	8	4	1	21	17	14
Tabukan Utara	29	6	3	-	16	18	21
Nusa Tabukan	7	1	-	-	23	10	-
Kandahe	13	3	1	-	13	20	18
Kab. Sangihe	295	55	15	1	15	17	17

Sumber : BPS. Kab.Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. *Sangihe Dalam Angka*

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, prasarana SLTP telah menyebar di semua kecamatan, bahkan dalam satu kecamatan ada yang mempunyai SLTP lebih dari dua, misalnya di Tahuna ada 8 SLTP, Tabukan Utara 6, di Siau Timur dan di Siau Barat masing-masing terdapat 4 SLTP. Daerah yang mempunyai jumlah SLTP yang banyak umumnya daerah yang telah berkembang. Besar kemungkinan karena di kecamatan yang maju juga memiliki potensi murid yang cukup besar, disamping juga ditunjang oleh jumlah guru yang memadai. Namun demikian untuk SLTP yang letaknya di pulau-pulau kecil, guru-guru cenderung enggan ditempatkan di daerah tersebut.

Secara umum rasio murid SLTP dengan guru tidak tinggi, sehingga seorang guru hanya membina 17 murid. Meskipun

demikian, dibandingkan dengan tahun 2003 jumlah guru SLTP mengalami penurunan 4 persen dan jumlah murid mengalami kenaikan 2,6 persen. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya putus sekolah SD dan sekaligus untuk mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan agar SD dan SLTP berada dalam satu atap. Hal ini berarti akan terjadi perubahan fisik bangunan dan sekaligus penambahan jumlah guru.

Apabila jumlah sekolah SLTP di Kabupaten Kepulauan Sangihe 55, maka sekolah SLTA jumlahnya hanya 15. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan tingkat partisipasi pendidikan makin rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa masih banyak murid sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama karena kemampuan ekonomi orang tua yang masih rendah pula. Selain itu kondisi geografis kepulauan telah menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh mereka yang telah menamatkan SLTP di Desa Bukide untuk dapat melanjutkan sekolah ke SLTA harus mondok di Kecamatan Tabukan Utara. Mereka yang mampu melanjutkan sekolah adalah mereka yang lebih selektif dilihat dari latar belakang ekonomi orang tua dan kemampuan calon murid.

Di Kota Tahuna juga terdapat perguruan tinggi swasta (PTS) yaitu Akademi Keuangan dan Perbankan di bawah yayasan GMIST. Akademi tersebut didirikan pada tahun 1997. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum cukup untuk mendukung tujuan pendidikan. Masalah mendasar yang dihadapi terkait dengan persoalan: (1) pemerataan pendidikan; (2) kualitas pendidikan dan (3) kondisi internal yang menyangkut sarana, prasarana dan sistem pengelolaan. Permasalahan tersebut terkait erat dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit namun menyebar di pulau-pulau kecil. Selain itu tingkat kehidupan ekonomi penduduk yang juga masih rendah.

b. Kesehatan

Salah satu komponen utama yang menentukan pembangunan manusia adalah keberhasilan pembangunan kesehatan. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan, antara lain keberadaan sarana kesehatan dan sumber daya manusia yang melayani kegiatan kesehatan. Dampak pembangunan kesehatan akan tercermin dari peningkatan derajat kesehatan sehingga terjadi penurunan angka kesakitan dan penurunan kematian.

Pada saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya ada satu rumah sakit umum yang lokasinya berada di Ibu Kota Kabupaten yaitu Tahuna. Keberadaan rumah sakit tersebut sangat membantu pelayanan kesehatan terutama menjadi rujukan bagi pasien yang berasal dari Puskesmas yang jumlahnya mencapai 21 buah, menyebar di 20 kecamatan. Selain itu terdapat 80 Puskesmas Pembantu yang menyebar di semua kecamatan, termasuk di Tahuna. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terdapat Puskesmas keliling di 16 kecamatan. Pelayanan kesehatan pada tingkat desa juga ada Posyandu yang jumlahnya mencapai 273 buah. Posyandu tersebut menyebar di semua kecamatan.

Meskipun jumlah Puskesmas dan Posyandu telah menyebar di tiap kecamatan, tenaga kesehatan nampak belum memadai baik jumlah maupun distribusinya. Jumlah dokter umum hanya ada 32 orang dan setengahnya berada di Kota Tahuna. Tiga dokter spesialis juga berada di Kota Tahuna. Keterbatasan tenaga dokter yang juga cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten merupakan faktor yang kurang kondusif untuk upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk

Tabel 4.2. Jumlah Prasarana Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2004

Kecamatan	Jumlah Puskesmas				Jumlah Tenaga Kesehatan					
	Umum	Pembantu	Keliling	Dgn. tempat tidur	Dokter spesialis	Dokter umum	Dokter gigi	Apoteker	Sarjana kesehatan	Para Medis
Tagulandang	1	4	1	16	-	1	-	-	-	23
Biaro	1	2	1	-	-	-	-	-	-	4
Tagulandang Utara	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2
Siau Timur	1	5	2	50	-	2	1	-	-	12
Siau Tim.Selatan	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-
Siau Barat	1	2	2	10	-	2	-	-	-	21
Siau Barat Sel.	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Siau Barat Utr.	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Manganitu Selatan	1	6	1	11	-	-	-	-	-	8
Tatoareng	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Tamako	2	7	2	34	-	1	-	-	-	17
Tabukan Selatan	1	5	1	10	-	1	-	-	-	10
Tabukan Sel.Tengah	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2
Tabukan Sel.Tenggara	1	2	1	-	-	1	-	-	-	2
Tabukan Tengah	1	9	1	8	-	1	-	-	-	13
Manganitu	1	-	1	16	-	1	-	-	-	22
Tahuna	1	5	2	-	-	2	1	-	-	21
- RSU	-	-	-	-	3	11	1	3	-	-
- Staf dinas	-	-	-	-	-	2	-	-	6	25
Tabukan Utara	1	11	2	12	-	3	-	-	-	21
Nusa Tabukan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kandahe	1	6	1	6	-	1	-	-	-	11
Kab. Sangihe	21	80	22	173	3	32	3	3	6	242

Sumber : BPS. Kab. Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. *Sangihe Dalam Angka*

c. Ekonomi

Salah satu sarana ekonomi yang sangat penting dalam proses pembangunan adalah keberadaan perusahaan industri. Kegiatan perusahaan industri adalah mengolah bahan dasar menjadi bahan setengah jadi bahkan menjadi bahan jadi. Kegiatan industri dapat menyerap tenaga kerja sekaligus menciptakan nilai tambah suatu produk. Semakin tinggi kualitas produk hasil industri akan menciptakan nilai kompetitif yang lebih tinggi pula. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengolahan dan pengelolaan perusahaan industri.

Jenis industri yang tersebar merata (terdapat di semua kecamatan) di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah industri makanan. Hal ini terkait dengan ketrampilan penduduk yang umumnya masih berada pada tahap yang mementingkan kebutuhan makan. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga di kabupaten tersebut sering membeli jajanan makanan yang berbasis bahan lokal atau bahan lokal sebagai campuran kue. Di pasar Tahuna dan Petta misalnya, tersedia berbagai jenis makanan yang dibuat dari bahan sagu, kelapa, pala dan ikan. Meskipun demikian produk industri makanan rumah tangga belum menjadi komoditi untuk dijual ke luar daerah, masih terbatas untuk konsumsi setempat.

Di samping adanya industri rumah tangga yang sifatnya informal, di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terdapat industri yang bersifat formal seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3. Industri formal adalah perusahaan pengolahan bahan baku yang telah memperoleh izin formal dari pemerintah daerah.

Tabel 4.3. Prasarana Industri, Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi, Kabupaten Sangihe, Tahun 2004

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (000 Rp)
Industri Agro & hasil hutan	46	207	1.122.955
Industri kimia, pulp dan kertas	18	63	991.932
Industri tekstil dan Aneka	20	74	275.348
Industri logam mesin dan alat angkut	20	73	373.314
Jumlah	104	417	2.763.550

Sumber: BPS. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. Sangihe Dalam Angka 2004/2005.

Berdasarkan data tersebut di atas secara umum tampak bahwa prasarana ekonomi yang tercermin dari jumlah industri masih sangat terbatas. Dalam satu perusahaan industri, meskipun tergolong formal, rata-rata jumlah tenaga kerja hanya 4-5 orang dan nilai investasi baru mencapai 2.767 juta rupiah. Nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja yang paling banyak terserap berada pada industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan. Sebagian besar perusahaan industri tersebut berada di Kota Tahuna dan di Siau Timur. Dari gambaran singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa prasarana industri di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berkembang.

d. Transportasi dan Komunikasi

Salah satu faktor penting yang menunjang kegiatan perekonomian daerah dan mobilitas penduduk adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi-komunikasi. Pada saat ini untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kota Tahuna, dapat ditempuh dengan jalan laut maupun dengan jalur penerbangan. Jadwal penerbangan dari Bandara Udara Sam Ratulangi di Manado menuju Bandara Judha Tindas Naha adalah dua kali

penerbangan dalam seminggu. Penerbangan perintis tersebut hanya dilayani oleh satu pesawat milik Merpati dengan kapasitas 18 penumpang.

Jalur transportasi laut dari Kota Manado menuju Tahuna dilayani oleh dua kapal, yaitu KM Mekar Teratai dan KM Era Santa. Dua kapal tersebut menggantikan kapal kayu Agape, Ave Maria dan Nusa Teratai. Jika satu kapal berangkat dari Tahuna, maka satu kapal lainnya berangkat dari Manado. Kapal-kapal tersebut mengarungi laut sejauh 172 mil selama 8,5 jam, berangkat pukul 8 malam dan sampai pukul 4.30 pagi. Di Sangihe juga ada satu kapal ferry yang menghubungkan Bitung dengan pelabuhan Pananaru, di bagian selatan kabupaten tersebut. Kabupaten Kepulauan Sangihe selain disinggahi kapal motor milik swasta juga terdapat kapal perintis.

Dua kapal perintis melayari dua kabupaten yaitu Sangihe dan Talaud. Satu kapal berlayar dari arah jarum jam yaitu Bitung, Tahuna, Kawaluso, Marore, Miangas, Beo, Lirung. Kapal yang satu lagi melewati pelabuhan tersebut namun berlawanan arah. Tiap dua minggu sekali, pelabuhan tersebut dapat disinggahi kapal perintis yang membawa penumpang orang dan barang-barang komoditi kebutuhan daerah tersebut. Selain itu juga ada kapal penumpang yang menghubungkan Manado- Tagulandang dan Siau.

Pada saat Muson Timur dan Muson Barat pelayaran tersebut terganggu oleh ombak besar. Pelayaran terasa nyaman pada saat bulan-bulan paling teduh yaitu Mei dan Oktober. Secara umum prasarana perhubungan laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih jauh dari mencukupi, sehingga masih perlu investasi pembangunan yang mengarah terbangunnya armada pelayaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan transportasi reguler antar kecamatan kepulauan.

Selain itu prasarana perhubungan darat sangat memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas barang dan orang terutama untuk daerah P.Sangir Besar. Panjang jalan di kabupaten ini hanya sekitar 659 km, terdiri dari jalan negara sepanjang 87 km dan 93 km jalan provinsi. Selain itu ada 480 km jalan kabupaten. Kondisi

jalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya sudah bagus, terutama jalan-jalan di daerah P. Sangir Besar dan Siau. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sangihe dan Talaud, pada tahun 2004 di daerah tersebut hanya terdapat mobil jenis bus umum sebanyak 382 buah, pick up 350 buah dan 101 mobil barang. Dari sejumlah taksi minibus umum tersebut sebagian kendaraan melayani trayek antar kecamatan, misalnya trayek Tahuna-Petta. Keberadaan kendaraan umum tersebut baik truk maupun *pick up*, sangat berperan dalam menunjang perekonomian daerah terutama di P.Sangir Besar dan Siau.

Khusus daerah penelitian, yaitu di Kecamatan Nusa Tabukan, belum tersedia kendaraan darat, bahkan sepeda juga tidak ada. Beberapa dusun sudah ada jalan setapak seperti antara Dusun I dengan Dusun IV di Desa Nanedakele. Jalan setapak dengan lebar 2 meter tersebut merupakan proyek pengecoran. Hal ini karena topografi pulau Nusa yang sangat kasar dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Karena daerah penelitian merupakan wilayah perbatasan, hubungan dengan negara tetangga (Filipina) tergolong cukup sering dilakukan. Transportasi yang biasa digunakan penduduk untuk mencapai Filipina bagian selatan (biasanya ke P. Balut atau P. Sarangani) cukup dengan motor laut ketinting *pumpboat* dan *fuso* milik sendiri atau milik kerabat/teman. Bilamana kondisi cuaca dianggap baik, yaitu pada bulan Mei dan Oktober, hanya dengan motor laut jenis *pumpboat* ukuran 5 PK penduduk dapat melintas ke Filipina hanya dalam tempo 3 jam. Sampai saat ini tidak ada transportasi umum yang menghubungkan antara P. Marore ke daerah Filipina bagian selatan yang jaraknya hanya sekitar 60 mil laut. Motor laut yang kadangkala singgah di P.Marore adalah motor laut milik penduduk Sangihe, baik yang tinggal di Filipina Selatan⁴⁸ dan sedang mengunjungi keluarganya di wilayah Sangihe atau sebaliknya.

⁴⁸ Jumlah penduduk etnik Sangir yang saat ini tinggal di Filipina bagian selatan (terutama tinggal di P. Balut dan P.Sarangani) diperkirakan lebih dari 10 ribu jiwa.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perkembangan telekomunikasi lewat telepon telah meluas digunakan di daerah perdesaan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada saat ini sebagian penduduk dapat memperoleh akses telpon baik lewat SLJJ maupun dengan telpon seluler. Di banyak desa telah ada warung telekomunikasi, di samping banyak orang yang telah memiliki telpon genggam yang menggunakan kartu pra bayar antara lain Simpati dan Mentari. Penduduk perdesaan juga punya akses televisi, sepanjang ada aliran listrik dan mempunyai pesawat parabola. Sebagai contoh di Dusun I Tinakareng, kendati lokasinya berada di pulau kecil namun warga setempat dapat berkomunikasi dengan penduduk di P. Besar dengan menggunakan telpon genggam dan menikmati siaran televisi dari Jakarta. Di Dusun II sudah ada pembangkit listrik yang dikelola PLN dan dari tempat tersebut aliran listrik dialirkan ke dusun-dusun sekitarnya.

4.1.3. Kelembagaan Sosial-Ekonomi

Salah satu kelembagaan sosial-ekonomi yang sangat penting adalah pasar. Pasar terbesar di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat di Kota/Kecamatan Tahuna. Kompleks pasar tersebut sangat strategis karena dekat jalan di pinggir pantai, pusat pertokoan, pom BBM, Bank BRI, Hotel Nasional dan terminal angkutan kota. Di Tahuna, usaha pertokoan yang tergolong besar umumnya dikelola pengusaha etnis Cina yang sudah turun temurun tinggal di daerah tersebut. Sedangkan pedagang sayuran, hasil kebun dan ikan lebih banyak dilakukan oleh etnis Sangir. Pasar Tahuna dan daerah pertokoan berfungsi sebagai pusat grosir maupun eceran. Banyak pedagang dari daerah pulau kecil sekitar P. Sangir Besar mengambil dagangan barang-barang non-pertanian dan sekaligus memasarkan produk hasil bumi maupun hasil laut. Setiap pagi dapat disaksikan nelayan sekitar Kecamatan Tahuna menjual ikan yang kemudian dibeli oleh pedagang perantara untuk dijual kembali di pasar.

Berbeda dengan Pasar Tahuna yang setiap hari terjadi transaksi jual beli, pasar-pasar yang ada di daerah perdesaan

umumnya tergantung pada hari pasar. Tidak semua kecamatan punya pasar. Hari pasar di tingkat kecamatan pada umumnya hanya satu kali dalam seminggu. Waktu pasar umumnya mulai pagi hingga pukul 14 siang. Dengan demikian para pedagang di P.Sangir Besar dalam menjalankan aktivitasnya berpindah-pindah, tergantung pada hari pasar. Pada umumnya pedagang yang berpindah-pindah tersebut menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti ember plastik, sabun, rokok, sapu ijuk, roti kering dan pakaian jadi. Demikian pula masyarakat setempat hanya dapat berbelanja atau menjual hasil bumi (buah-buahan, sayuran), hasil laut (ikan) atau menjual industri rumah tangga (kue basah) pada hari-hari pasar.

Di Kecamatan Nusa Tabukan tidak ada pasar, sehingga penduduk harus berbelanja seminggu sekali ke pasar Petta. Mereka harus mengarungi selat yang jaraknya sekitar 3 mil laut. Pasar yang ada di Petta letaknya berdekatan dengan pertokoan. Tiga toko terbesar di Petta antara lain menjual barang-barang impor asal Filipina. Mereka adalah importir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. Mereka membeli barang-barang di Filipina dengan menggunakan kapal milik sendiri. Barang impor yang masuk ke Sangihe umumnya jenis kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur, perhiasan dinding, lampu, ember, kosmetik dan golok. Barang-barang tersebut tidak seluruhnya buatan Filipina, tetapi banyak barang buatan Cina. Komoditi asal Filipina yang masuk ke daerah tersebut telah mendesak komoditi serupa buatan Indonesia, karena barang-barang impor justru lebih murah.

Sarana ekonomi lain yang berhubungan erat dengan kegiatan industri dan perdagangan adalah lembaga koperasi. Pada tahun 2004, di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat 202 usaha koperasi. Usaha koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Tahuna yaitu sebanyak 89 buah. Lima kecamatan lain yang terdapat koperasi cukup banyak adalah di Tabukan Utara (16 buah), Tamako (15 buah), Siau Timur Selatan 12 (buah), Manganitu (11 buah), dan Manganitu Selatan (10 buah). Kecamatan yang terdapat banyak koperasi mengindikasikan bahwa daerah tersebut kegiatan ekonominya juga berkembang. Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe

pada tahun 2002 sebanyak 34 buah. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan KUD tidak mengalami perkembangan, bahkan ada KUD yang punya nama dan pengurus namun tidak mempunyai kegiatan. Di Kecamatan Nusa Tabukan juga belum ada lembaga koperasi. Di tempat tersebut kebutuhan simpan-pinjam dikelola oleh lembaga PKK. Meskipun demikian, kegiatan koperasi lain yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Koperasi Karyawan dan Koperasi Serba Usaha. Pada umumnya kelemahan KUD terletak pada faktor internal yaitu manajemen bisnis yang tidak mampu menciptakan keuntungan (BPS, 2005, Sangihe Dalam Angka 2004/2005).

4.1.4. Kondisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam pada garis besarnya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber daya hayati dan sumber daya nir-hayati. Sumber daya hayati terdapat di darat maupun di laut, yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Adapun sumber daya nir-hayati berupa bahan batuan, fosil dan mineral. Berbeda dengan sifat sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, sumber daya nir-hayati tidak dapat diperbaharui, atau dapat habis bila dieksplotasi oleh manusia secara berlebihan. Sampai saat ini manusia belum mampu membuat sumber daya nir-hayati sehingga bila dieksplotasi secara berlebihan akan berdampak negatif terhadap generasi mendatang.

a. Hutan

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat kawasan hutan yang menyebar di 11 kecamatan, yaitu di Tagulandang, Siau Timur, Siau Barat, Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Selatan, Tabukan Tengah, Manganitu, Tahuna, Tabukan Utara dan Kendahe. Dengan demikian di daerah penelitian (Kecamatan Nusa Tabukan) tidak terdapat kawasan hutan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak ada hutan produksi, tetapi terdapat hutan lindung dan hutan mangrove

dengan luas masing-masing 13.820 ha dan 1.149 ha. Hutan lindung dapat ditemukan di 11 kecamatan, terutama berada di P.Sangir Besar.

Hutan konservasi yang hanya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe cenderung mengalami degradasi. Beberapa kayu spesifik yang mempunyai nilai tinggi yaitu kayu ebony, kayu besi, kayu linggua, kayu melengku, kayu raja dan kayu sui. Namun demikian jenis kayu tersebut sudah semakin langka karena diambil oleh penduduk. Pengurangan hutan lindung juga karena pengaruh perluasan permukiman dan prasarana umum. Kalau pada tahun 2002 luas lindung adalah 15.165 ha, kemudian menyusut menjadi 13.820 ha pada tahun 2004.

Keadaan sebaliknya terlihat pada hutan mangrove yang justru mengalami perluasan sangat pesat. Hal ini mengindikasikan terjadinya perluasan dataran lumpur akibat sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai kecil. Pembangunan bidang kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara lestari melalui pelibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan dan pengawasan. Dalam kenyataannya upaya untuk menjaga kelestarian jenis-jenis kayu yang mempunyai harga tinggi sulit dilakukan karena keterbatasan aparat polisi hutan. Dari observasi tampak bahwa keberadaan hutan lindung di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berperan dalam menjaga fungsi kelestarian mata air dan menjaga bahaya longsor. Keadaan ini berpengaruh pada sulitnya memenuhi kebutuhan kayu bagi masyarakat, selain juga dipengaruhi oleh kawasan hutan sangat terbatas. Untuk mengatasi kebutuhan kayu untuk bahan bangunan, pedagang kayu telah mendatangkan kayu dari Kalimantan Timur.

Tabel 4.4. Distribusi Luas Hutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004

Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Mangrove	Jumlah
Tagulandang	1.516	350	1.866
Biaro	-	-	-
Tagulandang Utara	-	-	-
Siau Timur	638	145	783
Siau Timur Selatan	-	-	-
Siau Barat	1.024	51	1.075
Siau Barat Selatan	-	-	-
Siau Barat utara	-	-	-
Manganitu Selatan	559	51	610
Tatoareng	-	-	-
Tamako	1.418	-	1.418
Tabukan Selatan	1.163	189	1.352
Tab.Sel. Tengah	-	-	-
Tab.Sel.Tenggara	-	-	-
Tabukan Tengah	1.341	35	1.376
Manganitu	826	250	1.076
Tahuna	1.519	49	1.568
Tabukan Utara	1.643	20	1.663
Nusa Tabukan	-	-	-
Kendahe	2.173	9	2.182
Kab. Kep.Sangihe	13.820	1.149	14.969

Sumber : BPS. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. Sangihe Dalam Angka.

b. Perkebunan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kawasan perkebunan mencapai lebih dari separuh luas wilayah, yaitu sekitar 58 persen. Lahan perkebunan yang sangat luas ini tampaknya merupakan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan alam di daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia juga mempengaruhi untuk memilih tanaman perkebunan

sebagai sumber mata pencaharian karena jenis usaha ini hanya memerlukan curahan waktu kerja dan mempunyai resiko kegagalan yang rendah. Jenis tanaman perkebunan utama yang dikembangkan adalah kelapa, cengkih, dan pala. Tiga jenis tanaman perkebunan tersebut telah menjadi komoditi unggulan yang ditanam oleh penduduk di semua kecamatan. Lahan perkebunan tersebut tidak berada di kawasan khusus untuk perkebunan, tetapi tanaman perkebunan ditanam di lahan pekarangan dan perbukitan. Besar kemungkinan kawasan perkebunan seperti ini dipengaruhi oleh luas tanah daratan yang relatif sempit dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan.

Tabel 4.5. Distribusi Luas Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004

Kecamatan	Kelapa	Cengkih	Pala
Tagulandang	1.768	88	531
Biaro	508	5	7
Tagulandang Utara	187	69	126
Siau Timur	522	50	564
Siau Timur Selatan	333	38	243
Siau Barat	598	87	613
Siau Barat Selatan	299	22	287
Siau Barat utara	731	138	771
Manganitu Selatan	1.351	88	73
Tatoareng	126	11	2
Tamako	1.634	798	669
Tabukan Selatan	1.712	398	101
Tab,Sel. Tengah	705	302	79
Tab.Sel.Tenggara	1.298	165	42
Tabukan Tengah	1.989	467	333
Manganitu	1.360	522	560
Tahuna	2.916	117	279
Tabukan Utara	4.977	817	510
Nusa Tabukan	355	9	6
Kendahe	928	19	172
Kab. Kep.Sangihe	24.297	4.210	5.970

Sumber : BPS. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. Sangihe Dalam Angka.

Dalam usaha budidaya perkebunan kelapa, petani cenderung menyukai jenis kelapa dalam/lokal daripada jenis kelapa hebrida, karena kelapa lokal mudah dalam pemeliharaan dan tanaman berumur panjang. Namun demikian, permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya serangan hama endemis sebagai akibat pengelolaan yang kurang intensif, terutama terkait dengan kebersihan lahan.

Luas areal perkebunan kelapa pada Tahun 2004 naik sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jumlah produksi justru mengalami penurunan 2 persen. Pada Tahun 2004, produksi kelapa mencapai 22.541 ton. Penduduk umumnya mengolah hasil kelapa untuk dibuat menjadi kopra. Hasil kopra yang dihasilkan oleh petani kelapa di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menjadi komoditi ekspor, terutama ke Filipina. Ekspor kopra ke Filipina dilakukan melalui Pelabuhan Petta di Tabukan Utara.

Areal tanaman cengkih di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami perluasan yang signifikan, yaitu mencapai 5,4 persen dibandingkan tahun 2003. Distribusi tanaman cengkih paling luas terdapat di P.Sangir Besar, terutama di daerah Tabukan Utara, Tamako, Manganitu dan Tabukan Tengah. Namun demikian, apabila dilihat dari produksi cengkih tahun 2004 menunjukkan penurunan sangat drastis (89 persen). Pada tahun 2004 produksi cengkih di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mencapai 189 ton. Padahal dalam tahun 2003 produksi cengkih mencapai 1.718 ton. Penurunan tersebut diperkirakan karena faktor iklim yang kurang kondusif.

Tanaman unggulan yang mengalami peningkatan adalah komoditi pala. Produksi pala telah mengalami kenaikan dari 3.438 ton pada tahun 2003 menjadi 3.452 ton pada tahun 2004. Luas areal tanaman pala juga mengalami kenaikan dari 5.237 ha pada tahun 2003, menjadi 5.970 pada tahun 2004. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah perkebunan pala yang cukup luas terdapat di P. Siau dan P.Sangir Besar.

c. Perikanan Laut

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut, mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, meskipun masih sedikit yang telah dimanfaatkan. Kekayaan laut tersebut telah dimanfaatkan oleh sebagian penduduk untuk menopang kehidupannya, disamping dari hasil tanaman perkebunan. Ikan telah menjadi sumber protein yang dikonsumsi masyarakat pantai setiap harinya.

Penduduk Sangihe mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi dan keterbatasan penguasaan iptek kelautan, sehingga tingkat produksi ikan di daerah tersebut juga rendah. Pada tahun 2003 produksi sumber daya laut sebagai berikut: ikan 13.940 ton, ikan berkulit keras 42,6 ton, ikan berkulit lunak 27,9 ton, biota lainnya 4,4 ton dan rumput laut 81,9 ton. Lebih dari 70 persen produksi perikanan berasal dari perikanan laut skala kecil, antara lain diindikasikan oleh sarana penangkapan ikan yang masih mengandalkan peralatan sederhana. Selain itu, usaha perikanan masih mengalami kendala keterbatasan prasarana seperti tempat pendaratan ikan dan pabrik es yang belum sebanding dengan kondisi kepulauan. Kondisi kemampuan nelayan yang masih terbatas tentunya sulit untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

Potensi perikanan di daerah tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal yang berukuran besar dengan teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, di daerah tersebut menjadi daerah tangkapan ikan nelayan Filipina secara illegal. Pengawasan perairan di daerah tersebut masih terbatas sehingga kasus pencurian sering terjadi. Bahkan nelayan asal Filipina sering melakukan pembelian ikan milik nelayan tradisional di tengah laut. Kemungkinan hal ini dilakukan karena eksploitasi laut di Filipina sudah dilakukan secara intensif dan perkembangan industri perikanan sudah maju. Untuk mengatasi kebutuhan ikan bagi industri ikan di Filipina, mereka melakukan penangkapan di Indonesia baik secara legal maupun illegal.

Dalam hal produksi ikan, pemerintah daerah nampaknya tidak mempunyai data yang akurat, bahkan dalam buku Sangihe Dalam Angka 2005 tidak memasukkan produksi ikan dan sumberdaya laut lainnya untuk kabupaten tersebut. Kesulitan yang dihadapi dalam menghitung produksi hasil tangkapan ikan, antara lain karena: (1) sebagian tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan yang dijual langsung kepada nelayan asing tidak mungkin dapat dihitung. (2) kebanyakan hasil tangkapan yang hanya sekedar untuk konsumsi. Data produksi ikan seperti tersebut di atas (meskipun *under estimate*), ternyata tidak dilaporkan ke kantor BPS. Hal ini adalah contoh lemahnya koordinasi lintas instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4.2. Kondisi Kependudukan

Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi penggerak sekaligus kendala dalam pembangunan. Tersedianya sejumlah penduduk merupakan sumber yang potensial dalam menyediakan tenaga kerja yang diperlukan sebagai penggerak dalam pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar dan tidak berkualitas juga dapat menjadi kendala bagi pembangunan di wilayah tersebut.

4.2.1. Pertumbuhan dan Komposisi

Jumlah penduduk 1971 di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 182,6 ribu jiwa. Pada tahun 1980 dan 1990 jumlah penduduk di kabupaten tersebut masing-masing menjadi 180.716 dan 192.744 jiwa. Sepuluh tahun kemudian atau pada tahun 2000, jumlah penduduk turun menjadi 187.898 jiwa, tetapi mengalami kenaikan empat tahun kemudian (tahun 2004), yaitu menjadi 193.831 jiwa. Atas dasar data penduduk tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kurun waktu 1971-1980 adalah -0,12 persen tiap tahun. Pertumbuhan penduduk menjadi

0,65 persen pada kurun waktu 1980-1990. Angka pertumbuhan penduduk ini relatif sangat rendah, bahkan pada kurun waktu 1990-2000 menurun menjadi negatif yaitu -0,25 persen.

Tabel 4.6. Jumlah, Distribusi, dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 1990, 2000 dan 2005

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Tingkat Pertumbuhan Penduduk		
	1971	1980	1990	2000	1971-1980	1980-1990	1990-2000
Tagulandang	21.512	21.665	21.647	23.612	0,07	-0,1	0,89
Biaro							
Tagulandang Utara							
Siau Timur	25.235	22.000	22.061	20.407	-1,21	0,03	-0,80
Siau Tim.Selatan							
Siau Barat	20.065	17.405	17.480	16.334	-2,91	0,04	-0,69
Siau Barat Sel.							
Siau Barat Utr.							
Manganitu Selatan	-	-	18.501	16.515	-	-	-1,16
Tatoareng							
Tamako	18.782	18.915	15.029	14.288	0,07	0,85	-0,52
Tabukan Selatan							
Tabukan Sel.Tengah	13.818	14.534	12.901	10.950	0,52	0,65	-1,67
Tabukan Sel.Tenggara							
Tabukan Tengah	9.721	10.825	10.746	11.282	1,14	0,07	0,50
Manganitu	22.761	21.844	14.620	13.688	-0,40	1,43	-0,67
Tatoareng							
Tahuna	21.387	23.514	29.055	29.187	0,99	2,36	0,05
Tabukan Utara	22.071	23.173	23.960	24.051	0,50	0,34	0,04
Nusa Tabukan							
Kandahe	6.435	6.841	6.744	7.584	0,63	0,20	1,20
Kab. Sangihe	182.687	180.716	192.744	187.898	-0,12	0,65	-0,25

Sumber : BPS. Kab.Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. *Sangihe Dalam Angka*

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah tersebut terjadi hampir di semua kecamatan, bahkan di Ibukota Kabupaten yaitu Kota Tahuna pada tahun 1990-2000 angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,05 persen. Secara umum angka pertumbuhan yang relatif lebih tinggi terjadi pada kurun 1980-1990, terutama di P.Sangir Besar yaitu Kota Tahuna dan Kecamatan Manganitu. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk menurun. Pertama, penurunan fertilitas penduduk menuju *replacement level* (2,1 persen). Tingkat fertilitas total turun dari 2,27 persen pada Tahun 2000 menjadi 2,26 persen pada Tahun 2001. Kedua, karena tingginya tingkat migrasi netto negatif.

Dua faktor tersebut juga sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di tingkat Kabupaten Sangihe. Angka TFR tahun 2000 hanya sebesar 2,27. Angka fertilitas tersebut jauh lebih rendah daripada angka fertilitas pada tingkat nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah umur kawin pertama. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa rata-rata umur kawin pertama untuk wanita adalah tinggi yaitu 22,7 tahun. Selain itu, rendahnya fertilitas juga dipengaruhi oleh pemakaian alat kontrasepsi. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa peserta KB aktif di kabupaten ini mencapai 83,4 dari jumlah pasangan usia subur (PUS). Selain fertilitas yang rendah, fenomena banyaknya migrasi penduduk yang meninggalkan wilayah Sangihe telah memberi kontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan penduduk. Lebih lanjut, pertumbuhan penduduk yang rendah akibat penurunan fertilitas penduduk, mortalitas dan migrasi berpengaruh terhadap rasio beban tanggungan yang rendah pula, yaitu sebesar 0,54. Rasio ini adalah hasil pembagian antara jumlah penduduk di bawah 15 tahun dan yang 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk 15-64 tahun.

Mobilitas penduduk pada garis besarnya dapat dikategorikan menjadi dua pola, yaitu perpindahan secara permanen dan sirkulasi atau sering juga disebut migrasi non-permanen. Hasil survai PPK-LIPI di Desa Nanedakele (2006) menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang meninggalkan desa tersebut daripada penduduk yang

masuk, baik yang permanen maupun yang non-permanen. Umumnya mereka melakukan mobilitas menuju daratan Sulawesi terutama ke Kota Manado, Kota Bitung dan daerah Minahasa.

Untuk mengetahui mobilitas penduduk permanen, data dapat diperoleh dari Sensus Penduduk Tahun 2000, yang pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2000. Untuk maksud kajian ini migrasi penduduk dilihat atas dasar konsep migrasi seumur hidup (*lifetime migration*). Dalam konsep tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai migran apabila tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya pada saat sensus dilakukan. Data yang tersedia adalah data migrasi untuk Kabupaten Sangihe-Talaud, karena pada saat diadakan Sensus Penduduk, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi satu dengan Kabupaten Talaud. Dengan demikian data yang disajikan berikut ini masih merupakan gabungan dua kabupaten. Meskipun demikian, pola migrasi dari dan ke kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih relevan untuk menggambarkan pola migrasi dan selektifitas migran bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa pola migrasi baik yang masuk maupun yang keluar, sebagian besar berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe daripada Kabupaten Talaud, karena daerah Sangihe mempunyai akses transportasi yang lebih baik dan jarak yang lebih dekat dengan Manado. Gambaran tentang pola dan arus migrasi dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8 berikut ini.

Tabel 4.7. Pola Migrasi Seumur Hidup Sangihe-Talaud Dari dan Ke Kota/Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/ Kota	Migran Masuk dari	Migran Keluar ke	Migrasi netto
Bolaang Mongondow	687	5.655	- 4.972
Minahasa	2.867	8.979	- 6.112
Kota Manado	1.799	24.958	- 23.159
Kota Bitung	468	18.058	- 17.590
Jumlah	5.817	57.650	- 51.833

Sumber : Diolah dari data SP.2000. BPS. Jakarta Seri L.2.2.23

Tabel 4.8. Tingkat Migrasi Seumur Hidup di Kabupaten Sangihe-Talaud Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
Laki-laki	1,95	9,28	- 7,33
Perempuan	1,79	9,33	- 7,54
Jumlah	3,75 (5.917)	18,61 (57.650)	-14,86 (51.833)

Sumber : Diolah dari data SP.2000. BPS. Jakarta Seri L.2.2.23

Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2000 tampak jelas bahwa migrasi keluar dari Sangihe-Talaud jauh lebih besar daripada migrasi masuk. Dengan kata lain telah terjadi migrasi netto negatif yang sangat signifikan. Migrasi netto negatif tersebut terjadi pada kurun waktu 1995-2000, yaitu sebesar 2.953 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Sangihe-Talaud bukan daerah tujuan migrasi bagi daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara di mana hanya ada 5,8 ribu jiwa yang tinggal di daerah Sangihe-Talaud. Selama periode tersebut terdapat 18,6 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Sangihe-Talaud yang telah meninggalkan daerah tersebut dan menetap di kota atau di kabupaten lain di Sulawesi Utara. Daerah tujuan migrasi keluar penduduk Sangihe-Talaud adalah Kota Manado. Kota Manado sebagai kota terbesar di Sulawesi Utara telah menjadi daerah tujuan utama migrasi keluar sebagian penduduk perdesaan di Sangihe-Talaud, yaitu sebanyak 43 persen. Dengan kata lain terjadi kecenderungan pola migrasi desa-kota. Migrasi keluar dari daerah Sangihe-Talaud lebih banyak perempuan daripada laki-laki dan sebaliknya untuk migrasi masuk ke daerah tersebut.

Penduduk yang melakukan migrasi keluar daerah juga tercermin dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin dihitung untuk mengetahui tiap 100 orang perempuan berapa jumlah laki-laki. Dengan penduduk laki-laki yang jauh lebih banyak daripada perempuan dapat diperkirakan bahwa di daerah tersebut terjadi migrasi yang dilakukan oleh perempuan. Demikian pula sebaliknya, bila jumlah perempuan jauh melebihi jumlah laki-laki diperkirakan banyak laki-laki yang melakukan migrasi keluar daerah. Beberapa

kecamatan di Kabupaten Sangihe menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu Kecamatan Nusa Tabukan, Siau Barat Utara, Tabukan Utara, Biaro, Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah tersebut merupakan daerah pengirim migran perempuan, yang kemungkinan besar melakukan perpindahan ke Manado. Fenomena migrasi keluar, terutama kelompok perempuan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe mungkin sebagai dampak dari kemiskinan daerah tersebut. Sebaliknya, daerah pengirim migran laki-laki tampaknya hanya Kecamatan Siau Timur. Banyaknya migran ke luar, disamping angka pertambahan alami yang rendah, sangat menguntungkan karena dapat membuat keseimbangan dengan daya dukung lingkungan kepulauan yang relatif rendah.

Tabel 4.9. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Kecamatan, 2004

Kecamatan	Laki	Perempuan	Rasio Jenis kelamin
Tagulandang	7889	7914	99,7
Biaro	1899	1773	107,1
Tagulandang Utara	2113	2039	103,6
Siau Timur	7526	7971	94,4
Siau Tim.Selatan	3489	3548	98,3
Siau Barat	4537	4565	99,4
Siau Barat Sel.	1993	2029	98,2
Siau Barat Utr.	2138	1932	110,7
Manganitu Selatan	5630	5521	101,9
Tatoareng	2571	2448	105,0
Tamako	6632	6583	100,7
Tabukan Selatan	3559	3341	106,5
Tabukan Sel.Tengah	2037	2015	101,1
Tabukan Sel.Tenggara	1260	1178	107,0
Tabukan Tengah	5884	5427	108,4
Manganitu	7071	6816	103,7
Tahuna	14994	15284	98,1
Tabukan Utara	11302	10545	107,2
Nusa Tabukan	1713	1494	114,7
Kandahe	3652	3519	103,8
Kab. Sangihe	97889	95942	102,0

Sumber : BPS. Kab.Kepulauan Sangihe dan Talaud. 2005. *Sangihe Dalam Angka*

4.2.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kondisi kemiskinan demografis tercermin dari kualitas penduduk dimana lebih dari dua pertiga atau tepatnya 66 persen penduduk usia 10 tahun ke atas hanya memiliki ijazah SD ke bawah. Kualitas pendidikan yang masih rendah tersebut tentunya merupakan hasil dari banyak faktor yang telah mempengaruhinya, yaitu: (1) rendahnya kemampuan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membiayai sekolah anaknya ke tingkat lanjutan.; (2) kondisi geografis sebagai daerah kepulauan, sehingga banyak penduduk tinggal di pulau-pulau kecil yang terpencil; dan (3) jumlah maupun penyebaran prasarana dan sarana sekolah belum memadai. Rendahnya kualitas pendidikan penduduk tentunya membawa konsekuensi luas yang tidak menguntungkan bagi kehidupan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tabel 4.10. Ijazah Terakhir Yang Dimiliki Penduduk Usia 10 Tahun Keatas

Ijazah terakhir	Jumlah	%
Tidak punya	69.612	30,9
SD/MI/ sederajat	79.267	35,1
SLTP sederajat	42.205	18,7
SLTA sederajat	28.608	12,7
SLTA keatas	5886	2,6

Sumber: Sumber: BPS, 2004, Susenas 2004

Sebagian besar kehidupan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tergantung pada sumberdaya alam atau lazim disebut sebagai kegiatan pada sektor primer. Dari 67.212 penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja, 66,5 persen bekerja di lapangan usaha utama di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan dan tanaman semusim. Kegiatan tersebut mempunyai produktivitas yang rendah karena mereka menjual langsung hasil pertanian tanpa lebih dahulu melakukan pengolahan pasca panen. Hal ini terjadi karena

kualitas penduduk dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat terbatas sehingga belum banyak yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi komoditi industri jadi, bahkan setengah jadi.

Kegiatan utama penduduk dalam industri pengolahan hanya 4,9 persen. Dalam kondisi yang demikian posisi tawar petani sangat rendah karena tidak mampu menentukan harga jual. Harga komoditi pertanian sangat ditentukan oleh para tengkulak yang sekaligus menguasai rantai pemasaran. Kegiatan utama lain yang cukup menonjol adalah perdagangan, yaitu 8,7 persen. Adapun kegiatan utama konstruksi dan pengangkutan masing-masing hanya 2,4 persen.

Indikator lain untuk melihat kualitas penduduk adalah dari aspek kesehatan. Kualitas kesehatan tercermin dari indikator harapan hidup waktu lahir, angka kematian dan kondisi gizi Balita. Data kependudukan yang diolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengalami peningkatan dari 61,5 tahun pada tahun 1990 menjadi 62,2 tahun pada tahun 2002. Hal ini tentunya sama artinya dengan penurunan angka kematian bayi, yakni dari 61,8 per 1000 kelahiran tahun 1990 menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002.

Kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya karena penyakit pnemonia dan berat badan waktu lahir rendah (BBLR). Berdasarkan pemantauan di Puskesmas-Puskesmas menunjukkan adanya kenaikan angka BBLR dari 2,6 persen pada tahun 2001 menjadi 3,6 persen pada tahun 2001. Angka BBLR pada tahun 2003 menurun menjadi 2,7 persen, hampir sama dengan angka pada tahun 2004 (2,69 persen). Angka kurang gizi anak balita juga telah mengalami penurunan dari 37,5 persen pada tahun 1990 menjadi 24,6 persen pada tahun 2000. Meskipun telah terjadi perbaikan kondisi gizi anak balita, angka kematian anak balita (CMR) justru mengalami peningkatan. Angka CMR tahun 2001 sebesar 0,34 per 1000 balita menjadi 0,56 per 1000 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 naik menjadi 0,95 per 1000.

Adapun angka kematian ibu saat melahirkan (MMR), juga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 1999 angka MMR sebesar 390 per 10.000 kelahiran hidup, turun menjadi 307 dan 324 per 10.000 kelahiran hidup, berturut-turut untuk tahun 2000 dan 2005. Dalam kurun waktu tahun 2000-2005 angka kematian ibu waktu melahirkan telah mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kematian ibu waktu melahirkan tersebut terkait dengan penyakit malaria dan kurang gizi yang sering menyebabkan pendarahan. Namun ibu tersebut tidak sempat memperoleh pertolongan medis karena faktor jarak pelayanan medis yang relatif jauh.

4.3. Kondisi Sosial Demografi di Tingkat Rumah Tangga

Hasil penelitian di tingkat rumah tangga di Kecamatan Nusa Tabukan dengan mengambil 400 kepala keluarga sebagai sampel, menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga laki-laki (914 orang) relatif lebih besar dibanding perempuan (792 orang). Karena jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan, maka rasio jenis kelamin di lokasi penelitian lebih dari 100 yaitu 115,40 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat lebih dari seratus penduduk laki-laki (Tabel 4.11.). Selanjutnya, dari anggota rumah tangga yang berjumlah 1.706 orang, sekitar 8 persen adalah balita (mereka pada kelompok umur 0 – 4 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 4 tahun yang lalu angka kelahiran sekitar 8 persen. Kondisi ini terjadi pula pada 5 hingga 10 tahun lalu, yang nampak dari proporsi mereka pada kelompok umur 5 – 9 tahun. Kemudian terdapat sekitar 72 persen kelompok usia kerja berumur antara 10 – 60 tahun. Diantara kelompok usia kerja ini proporsi terbesar ada pada mereka yang berumur 10 – 39 tahun, selanjutnya proporsi semakin rendah pada kelompok umur makin tua diatas 60 tahun.

Tabel 4.11. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Desa Nanedakele, Nusa dan Bukide, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2007

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	9.2	6.9	8.1
2	5 – 9	8.4	8.6	8.5
3	10 – 14	9.1	9.5	9.3
4	15 – 19	10.6	8.0	9.4
5	20 – 24	7.0	7.6	7.3
6	25 – 29	10.0	7.6	8.9
7	30 – 34	9.1	9.6	9.3
8	35 – 39	6.9	9.6	8.1
9	40 – 44	5.6	6.6	6.0
10	45 – 49	5.1	4.0	4.6
11	50 – 54	5.3	6.4	5.8
12	55 – 59	4.5	4.0	4.3
13	60 – 64	3.6	3.4	3.5
14	65 +	5.7	8.2	6.9
	Jumlah (N)	100.0 (914)	100.0 (792)	100.0 (1.706)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Dari Tabel 4.11 ini dapat pula dilihat bahwa anggota rumah tangga usia kerja yaitu 10 – 60 tahun keatas, memiliki proporsi yang hampir sama pada tiap-tiap kelompok umur yaitu sekitar 17 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tiga desa di lokasi penelitian ini memiliki struktur penduduk dengan umur produktif. Besarnya penduduk pada usia produktif harapannya dapat mengurangi beban tanggungan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Bagi masyarakat di tiga desa lokasi penelitian yang memiliki pendidikan

dan ketrampilan cukup dapat mencari pekerjaan di kota Tahuna. Namun dengan pendidikan yang mereka miliki dimana sebagian besar adalah tamat SD, maka kesempatan kerja yang bisa menampung antara lain sektor informal, misal sebagai kuli bangunan atau berdagang.

Selanjutnya melihat dari distribusi rumah tangga berdasarkan jumlah anggota rumah tangga dan bentuk keluarga (tabel 4.12), hasil survei terhadap 399 rumah tangga di 3 desa penelitian di Nusa Tabukan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ART adalah sebesar 4.3.orang atau bila dibulatkan adalah 4 orang. Dilihat dari bentuk keluarga maka hampir 2/3 dari total rumah tangga sampel adalah tipe keluarga inti dimana artinya, sesuai dengan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah terdiri dari pasangan suami-istri atau salah satu dari pasangan tersebut bersama dengan anak-anak yang belum menikah..

Tabel 4.12. Distribusi RT berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Bentuk Keluarga, Desa Nanedakele, Nusa dan Bukide, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jumlah anggota rumah tangga dan bentuk keluarga	%	n
Jumlah anggota rumah tangga		
1-2 orang	15.0	60
3-4 orang	45.9	183
5-6 orang	29.3	117
7 orang dan lebih	9.8	39
Total	100.0	399
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga	4.3	399
Bentuk keluarga		
Keluarga inti	65.2	260
Keluarga luas	34.8	139
Total	100.0	399
Rata-rata anak lahir hidup dalam rumah	3.4	

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007

Keluarga inti merupakan satuan keluarga yang lebih kecil daripada keluarga luas, sehingga jumlah ART keluarga inti cenderung lebih sedikit daripada jumlah ART yang tergabung dalam tipe keluarga luas. Demikian pula seperti yang diperlihatkan dari hasil survei (Tabel 4.13), rumah tangga yang tergolong dalam tipe keluarga inti/batih umumnya memiliki jumlah anggota antara 1-2 orang. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga, semakin menurun persentase rumah tangga tersebut. Sebaliknya untuk rumah tangga tipe keluarga luas, proporsi rumah tangga semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa mayoritas keluarga luas memiliki anggota rumah tangga sebanyak 7 + orang. Keadaan ini bukan hanya karena faktor kuatnya ikatan kekerabatan, tetapi juga keterbatasan ekonomi dan ketersediaan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mendirikan rumah baru. Topografi wilayah yang didominasi oleh daerah perbukitan dengan lereng yang cukup tajam menyebabkan penggunaan lahan (*land use*) untuk perumahan sangat terbatas, yaitu hanya menempati wilayah pesisir dan lereng yang landai. Kendala ini semakin diperburuk oleh rendahnya kondisi ekonomi, sehingga kebanyakan keluarga baru pada umumnya tetap menumpang pada orang tua. Selain itu, merupakan suatu hal yang biasa jika orang tua/mertua dan kerabat lain tetap tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah tangga dengan anak/menantu/saudara, sehingga situasi ini juga mempengaruhi eksistensi norma keluarga luas.

Tabel 4.13. Distribusi RT berdasarkan Tipe Keluarga dan Jumlah ART

Tipe keluarga	Jumlah ART			
	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7+
Keluarga inti	95.0	80.3	44.4	10.3
Keluarga luas	5.0	19.7	55.6	89.7
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0
n	60	183	117	39

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007

Dari tabel 4.13 juga dapat dilihat bahwa sebagian kecil keluarga luas hanya mempunyai jumlah ART antara 1-2 orang. Termasuk dalam keluarga ini kemungkinan besar hanya terdiri dari kepala rumah tangga (KRT) dan salah satu orang tua/mertua/kerabat. Tipe keluarga luas dengan jumlah ART sangat sedikit ini kemungkinan besar karena pasangan KRT sudah meninggal/bercerai, sedang anak-anak tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Dengan kata lain, sedikitnya jumlah ART dalam suatu rumah tangga dapat dipengaruhi oleh migrasi, terutama migrasi permanen. Terjadinya migrasi permanen ke luar rumah tangga antara lain disebabkan karena alasan afiliasi/keluarga (misalnya perkawinan), meskipun kemungkinan masih tetap tinggal di dalam wilayah desa, disamping alasan mencari pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik di daerah lain. Terjadinya pola migrasi permanen tidak langsung diputuskan pada awal perpindahan, tetapi setelah berhasil dalam menjalani kehidupan di daerah tujuan. Meskipun kasusnya tidak banyak, adanya migrasi permanen tersebut berpengaruh terhadap sedikitnya jumlah ART pada sebagian kecil rumah tangga.

Selain adanya fenomena perpindahan ART ke luar/dalam rumah tangga bersangkutan, banyaknya individu yang menetap dalam rumah tangga juga berkaitan dengan komponen utama lainnya dari demografi, yaitu jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Hasil wawancara mendalam menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kelahiran dalam beberapa tahun belakangan ini. Kelahiran bayi tidak hanya terjadi pada keluarga baru tetapi juga pada keluarga pasangan usia subur yang sudah memiliki dua, bahkan empat orang anak. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan kelahiran ini adalah relatif sulitnya memperoleh alat kontrasepsi. Apabila sebelumnya alat kontrasepsi dapat diperoleh secara cuma-cuma pada saat kegiatan Posyandu (tidak semua dusun ada kegiatan posyandu yang dijalankan secara rutin, seperti misalnya di Dusun Kelumang) maka saat ini pasangan usia subur harus membeli alat kontrasepsi di Petta atau di rumah bidan. Baru beberapa bulan terakhir saja alat kontrasepsi sudah dapat dibeli di Puskesmas di

Nipa, sehingga orang tidak perlu pergi ke Petta untuk mendapatkan alat kontrasepsi.

Relatif jauhnya tempat pembelian alat kontrasepsi terutama untuk pasangan usia subur yang bertempat tinggal seperti di Dusun III dan IV Desa Nanedakele, menyebabkan mereka harus menyediakan biaya transportasi yang tidak sedikit. Harga alat kontrasepsi untuk suntik, bila beli sendiri ke Petta, harganya Rp 9.000,- sedangkan kalau tidak beli sendiri maka orang harus membayar Rp.15.000,- untuk jenis kontrasepsi tersebut. Sedangkan harga alat kontrasepsi jenis pil, harganya Rp. 2.500,- untuk 30 butir. Kebanyakan ibu-ibu yang ikut KB menggunakan kedua jenis alat kontrasepsi tersebut. Meskipun harga alat kontrasepsi untuk kedua jenis tersebut relatif murah, namun tidak selalu dapat dijangkau oleh mereka, karena prioritas utama adalah untuk membeli kebutuhan makanan yang umumnya tidak dapat diproduksi sendiri. Akibat kendala geografis dan ekonomi tersebut adalah kasus *drop out* tidak terhindarkan, sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kelahiran. Pelayanan keluarga berencana yang tidak lagi menyediakan alat-alat kontrasepsi gratis pada keluarga miskin, kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan perubahan kebijakan keluarga berencana sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah⁴⁹.

⁴⁹ Sebelum undang-undang otonomi daerah diimplementasikan, pelayanan KB gratis diberikan pada saat ada kegiatan Posyandu di masing-masing dusun yang diadakan antara 2-3 bulan sekali. Namun demikian, pelayanan KB ini berhenti sejak sekitar empat tahun terakhir karena Kantor KB di tingkat kabupaten tidak lagi memberikan bantuan alat-alat kontrasepsi. Menurunnya penyediaan alat kontrasepsi pada era otonomi daerah antara lain karena imbas dari kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap lembaga KB (Republika Online, 21 Oktober 2006). Hal ini antara lain tercermin dari bentuk kelembagaan KB yang dibuat cukup bervariasi, ada yang setingkat 'dinas' atau hanya menempel pada dinas lain. Dengan status, bentuk kelembagaan, dan program KB seperti ini, ditambah dengan sangat menurunnya supply alat kontrasepsi dari BBKBN Pusat, maka pelayanan gratis alat kontrasepsi kepada masyarakat menjadi sangat berkurang.

Besaran rumah tangga kemungkinan juga memiliki keterkaitan dengan aspek mortalitas. Meskipun dalam survey tidak diperoleh data jumlah kematian anggota rumah tangga pada periode waktu terkini (misalnya satu hingga lima tahun terakhir), namun dari hasil informasi kualitatif diketahui bahwa kejadian kematian pada umumnya dialami oleh rumah tangga yang memiliki ART usia lanjut. Berdasarkan hasil survey yang lebih memfokuskan pada data kematian anak-balita dapat diketahui bahwa jarang ditemukan adanya kematian bayi atau balita. Kematian bayi hanya terjadi pada saat ada proses persalinan dengan kesulitan tinggi dan biasanya mengalami keterlambatan rujukan, karena faktor geografis dan ekonomi. Apabila melihat pada relatif kecilnya jumlah kematian maka kemungkinan aspek mortalitas juga membawa pengaruh yang signifikan pada besaran rumah tangga.

Dalam hal pendidikan, data hasil survey di tiga desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa dari 400 kepala rumah tangga (KRT) yang terkena sampel (Tabel 4.14), hampir separo dari mereka berpendidikan belum tamat SD (sekitar 50 persen), sepertiga lebih tamat SD (sekitar 32 persen), dan hanya sebagian kecil saja proporsi kepala rumah tangga yang dapat mengenyam pendidikan sampai pendidikan lanjutan. Rendahnya pendidikan KRT, kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan sarana-prasarana pendidikan yang tersedia pada saat mereka berada dalam kelompok usia sekolah (7-18 tahun). Selain itu, rendahnya motivasi untuk sekolah kemungkinan juga mempengaruhi KRT pada saat mereka diusia sekolah untuk menamatkan pendidikan. Meskipun Pemerintah Indonesia sudah sejak awal 70-an menunjukkan komitmennya untuk memajukan pendidikan dan hal ini antara lain diterjemahkan melalui Instruksi Presiden no.10 pada tahun 1973, yang pada intinya mempromosikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dasar, pada kenyataannya belum semua orang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Tekanan ekonomi, kemungkinan merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan sebagian besar penduduk Desa Nandedakele

sekitar 20-30 tahun yang silam, hanya mampu menamatkan pendidikan dasar saja.

Tabel 4.14. Distribusi Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum sekolah	6	22.4	8.0
Tidak/Belum Tamat SD	48.9	53.1	49.4
SD	33.1	20.4	31.6
SD	4.6	0.2	4.3
SLTP	6.6	0.2	6.0
SLTA	0.9	-	0.7
DPL/PT			
Jumlah (N)	100 (350)	100 (49)	100 (399)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Selanjutnya bila melihat tingkat pendidikan anggota rumah tangga, yang berumur 7 tahun keatas (Tabel 4.15) nampak bahwa kondisinya tidak berbeda jauh dengan pendidikan kepala rumah tangga yaitu sebagian besar /hampir separo (sekitar 49 persen) adalah berpendidikan tidak atau belum tamat SD. Kemudian mereka yang berpendidikan tamat SD menduduki urutan kedua yaitu 30 persen, sedang Tamat SLTP sekitar 8 persen dan SLTA 6 persen.

Tabel 4.15. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Umur 7 Tahun Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum sekolah	6.7	6.7	6.7
Tidak/Belum Tamat SD	48.9	47.4	48.2
SD	31.3	29.4	30.4
SD	6.5	9.1	7.7
SLTP	6.1	6.7	6.4
SLTA	0.5	0.8	0.7
DPL/PT			
Jumlah	100	100	100
(N)	(804)	(718)	(1.522)

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Relatif rendahnya tingkat pendidikan anggota rumah tangga usia 7 tahun ke atas ini, terutama dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sarana pendidikan khususnya untuk sekolah lanjutan SLTP maupun SLTA. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Nandedakele, misalnya hanya terbatas pada tingkat sekolah dasar. Apabila ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan, warga harus pergi ke Petta atau Bukide yang hanya dapat dicapai melalui jalur laut. Meskipun jarak dari Desa Nandedakele menuju lokasi tersebut relatif dekat namun untuk mencapai kedua tempat tersebut bukan perkara yang mudah. Sebagai gambaran, dari Desa Nandedakele menuju Petta dengan menggunakan perahu motor (*pumpboat*), waktu tempuhnya antara $\frac{3}{4}$ sampai 1 jam. Demikian pula bila menuju Bukide, diperlukan waktu kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam. Namun, apabila sedang angin muson barat maupun muson timur, sebagian besar penduduk desa memilih untuk tidak bepergian daripada harus menghadapi resiko tenggelam di laut karena besarnya ombak pada musim-musim

tersebut. Dengan demikian, karena relatif sulitnya mengakses sekolah untuk tingkat lanjutan menyebabkan sebagian besar ART tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat SD. Sementara bagi sebagian siswa yang melanjutkan SLTP, pada umumnya lebih memilih tinggal di Bukide atau Petta daripada harus pulang-balik yang membutuhkan waktu dan ongkos transportasi yang relatif mahal, di samping untuk menghindari resiko ombak besar saat angin muson barat dan timur.

BAB V

INDEKS KEMISKINAN SOSIAL DEMOGRAFI

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana manusia tidak memiliki kesempatan dan pilihan dasar untuk dapat hidup panjang umur, sehat, kreatif dan menikmati standar hidup yang layak, bebas, bermartabat, percaya diri dan hormat pada orang lain (UNDP, 1997). Konsep ini menunjukkan berbagai dimensi kehidupan manusia yang secara normatif (pendekatan objektif) dapat digunakan untuk melihat dan mengukur kondisi kemiskinan. Selama ini, ukuran kemiskinan yang umum digunakan, baik untuk mendapatkan pemahaman maupun dalam menentukan target intervensi dalam program pengentasan kemiskinan, mengacu pada pengukuran berdasarkan perhitungan ekonomi, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pokok bahan makanan dan bukan makanan. Pengukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran ini dikenal sebagai *head count index*, yang memberikan ukuran kemiskinan absolut, yaitu rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk.

Berdasarkan konsep kemiskinan di atas, UNDP juga memperkenalkan suatu pengukuran kemiskinan yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran HPI ini mencakup dimensi dasar: umur pendek, keterbatasan akses terhadap pendidikan dasar dan keterbatasan akses terhadap sumber pemilikan umum dan milik sendiri. Tiga indikator yang dikembangkan oleh UNDP adalah (UNDP, 1997):

1. Persentase penduduk yang diperkirakan meninggal sebelum umur 40 tahun
2. Persentase penduduk dewasa yang dapat membaca dan menulis

3. Nilai komposit dari tiga variabel: persentase penduduk yang mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih serta persentase balita kurang gizi.

HPI ini tidak menunjukkan rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, tetapi menunjukkan posisi kondisi kemiskinan manusia di suatu negara/daerah terhadap negara-negara/daerah-daerah lain.

Konsep kemiskinan yang dilihat dari berbagai dimensi kehidupan manusia ini juga mendorong pemikiran dalam mengembangkan indeks kemiskinan dimensi sosial demografi. Indeks ini dimaksudkan untuk melihat kemiskinan penduduk dari dimensi yang berkaitan dengan kondisi demografi, mencakup variabel-variabel demografi; kelahiran, kematian dan migrasi, serta variabel sosial seperti pendidikan, perkawinan dan status pekerjaan. Pengembangan indeks kemiskinan sosial demografi ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang kondisi kemiskinan dengan lebih mendalam serta memberi masukan dalam perencanaan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih terfokus.

5.1. Indeks kemiskinan Sosial Demografi: Kasus Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan

Untuk menghitung Indeks kemiskinan Sosial Demografi, seperti sudah dijelaskan dalam Bab II (Konsep dan Pengukuran Kemiskinan Sosial Demografi), digunakah variabel jumlah anggota rumah tangga sebagai ukuran dalam mengkategorikan rumah tangga dalam kelompok rumah tangga miskin dan tidak miskin, dengan *cutting point* jumlah anggota rumah tangga sebesar 5 orang. Artinya, rumah tangga yang memiliki anggota lima orang atau lebih dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin⁵⁰. Distribusi rumah tangga sampel di daerah penelitian di Kalimantan Timur

⁵⁰ Asumsi ini berdasarkan tinjauan literature, baik teori maupun temuan-temuan penelitian yang sudah dilakukan (Lihat Bab II).

menunjukkan bahwa dengan *cutting point* ini, 44,8 persen rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (Tabel 5.1.).

Tabel 5.1. Distribusi persentase rumah tangga berdasarkan jumlah anggota rumah tangga, kalimantan Timur, 2007

Jumlah anggota rumahtangga	Frekuensi	Persen	Persen kumulatif
1	2	0,5	0,5
2	29	7,3	7,8
3	62	15,5	23,3
4	86	21,5	44,8
5	93	23,3	68,0
6	49	12,3	80,3
7	38	9,5	89,8
8	24	6,0	95,8
9	11	2,8	98,5
10	5	1,3	99,8
11	1	0,3	100,0
Jumlah	400	100	-

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Dengan melakukan regresi linear antara variabel-variabel sosial demografi (sebagai variabel bebas) yang diasumsikan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan sosial demografi rumah tangga, diketahui variabel-variabel yang signifikan terhadap variabel jumlah anggota rumah tangga. Variabel-variabel bebas ini terdiri dari 6 variabel yaitu:

1. Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+
2. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja

3. Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga
4. Jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga
5. Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir
6. Umur ibu rumah tangga pada saat perkawinan pertama

Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa antara variabel sosial demografi (variabel bebas) tidak saling berkorelasi (semua nilai VIF nya < 10). Dari keenam variabel bebas tersebut ternyata hanya empat (4) variabel yang signifikan berhubungan dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu :

1. Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+
2. Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga
3. Jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga
3. Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir

Keempat variabel ini berhubungan signifikan dengan jumlah anggota rumahtangga dan hubungan yang paling kuat adalah dengan variabel 'jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga' dengan *standardized coefficient (Beta)* sebesar 0,791. Nilai positif menunjukkan bahwa bila jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga bertambah, anggota rumahtangga akan bertambah. Nilai *Beta* negatif ditemukan pada variabel "jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga", yang berarti bila jumlah jumlah balita yang meninggal dalam rumah tangga tersebut bertambah, maka jumlah anggota rumah tangga akan berkurang. Variabel lainnya tidak signifikan karena nilai signifikansinya (Sig) $> 5\%$ (Lihat Tabel 5.2), sedangkan keempat variabel yang signifikan

berhubungan dengan jumlah anggota rumah tangga mempunyai nilai signifikansi antara 0,000 dan 0,016.

Tabel 5.2. Hasil regresi linier antara variabel jumlah anggota rumah tangga (variabel terikat) dengan beberapa variabel sosial demografi (variabel bebas)

Variabel bebas	Standardized Coefficients	<i>t</i>	<i>Sig</i>	Collinearity Statistics	
	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1. Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+	,092	2,422	,016	0,897	1,115
2. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja	-,052	-1,400	,162	,946	1,057
3. Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga	,791	18,736	,000	,724	1,382
4. Jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga	-,200	-5,013	,000	,814	1,228
5. Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar Kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir	,095	2,547	,011	,932	1,073
6. Umur ibu rumah tangga pada saat perkawinan pertama	,032	,850	,396	,914	1,094

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Untuk menghitung Indeks Kemiskinan Sosial Demografi berdasarkan variabel-variabel yang signifikan dilakukan berupa langkah.

1. Menentukan *cutting point* untuk masing-masing variabel yang berhubungan signifikan dengan jumlah anggota rumah tangga dengan *cutting point* sebesar 5 orang, untuk mengklasifikasikan rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Dalam menentukan *cutting point* variabel-variabel sosial demografi yang signifikan terhadap variabel jumlah anggota rumah tangga, yang merupakan *proxy* kondisi kemiskinan rumah tangga, sebagai dasar digunakan proporsi rumah tangga tidak miskin (dengan jumlah anggota rumah tangga 4 orang atau kurang), sebesar 44,8 persen (55,2 persen rumah tangga masuk dalam kategori miskin). Untuk itu di cari nilai masing-masing variabel pada persentase distribusi kumulatif sebesar 44,8 persen dengan menggunakan metode interpolasi

Berdasarkan metode ini didapatkan nilai *cutting point* untuk (Lihat data Tabel lampiran 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4).:

1. Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+ adalah 5,74 tahun
 2. Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga adalah 3 (tiga) orang
 3. Jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga adalah 0 (nol) orang.
 4. Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir adalah 0 (nol) kali.
2. Pembakuan terhadap variabel-variabel sosial demografi.

Karena hubungan antara variabel-variabel sosial demografi yang digunakan dalam analisis tidak selalu searah dengan kondisi kemiskinan, untuk menghitung indeks kemiskinan sosial demografi, perlu dilakukan pembakuan terhadap variabel-variabel

tersebut. Hubungan-hubungan yang diasumsikan terjadi antara variabel-variabel sosial demografi terhadap kondisi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga semakin besar kemungkinan rumah tangga tersebut berada di bawah garis kemiskinan (+;-)
2. Semakin besar rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga semakin besar kemungkinan rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan (Hubungan +;+).
3. Semakin banyak jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan (Hubungan +; -).
4. Semakin banyak jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan (Hubungan +; -).
5. Semakin banyak anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan (Hubungan +; -).

Dengan melihat hubungan antara kelima variabel tersebut diatas dengan kondisi kemiskinan sosial demografi, pembakuan dilakukan dengan dua rumus berbeda, pertama (a), untuk variabel sosial demografi yang mempunyai hubungan searah dengan kondisi kemiskinan, yaitu variabel 'rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berumur 7+; dan kedua (b) untuk variabel sosial demografi lainnya yang mempunyai hubungan tidak searah dengan kondisi kemiskinan. Rumus-rumus tersebut adalah:

- a. Rumus pembakuan yang searah (untuk variabel rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+)

$$Z = \frac{(X_i - X_{\min}) * BA + (X_{\max} - X_i) * BB}{(X_{\max} - X_{\min})}$$

- b. Rumus pembakuan yang tidak searah (untuk variabel ‘Jumlah ART’, ‘Jumlah anak lahir hidup’, ‘Jumlah anak balita yang meninggal’ dan ‘Jumlah ART usia 15 th + yang bermigrasi keluar’)

$$Z = \frac{(X_{\max} - X_i) * BA + (X_i - X_{\min}) * BB}{(X_{\max} - X_{\min})}$$

Dimana :

Z	=	nilai indikator hasil pembakuan
X _i	=	nilai indikator yang akan dibakukan
X _{min}	=	nilai minimum indikator
X _{max}	=	nilai maksimum indikator
BB	=	batas bawah daftar konversi = 1
BA	=	batas atas daftar konversi = 10

Tabel 5.3. Nilai pembakuan untuk *cutting point* tiap indikator

Indikator/variabel	<i>Cutting point</i>	Nilai pembakuan (Z)
Jumlah ART (Y)	4,00	7,30
YOS/jml ART 7th + (X1)	5.74	4.44
Jumlah anak lahir hidup (X2)	3.00	8.20
Jumlah anak balita yang meninggal (X3)	0.00	10.00
Jumlah ART usia 15th + yang bermigrasi keluar (X4)	0.00	10.00

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

3. Menghitung Indeks Kemiskinan Sosial Demografi dari semua indikator hasil pembakuan *cutting point*/ $Z_{\text{cutting point}}$ (Tabel 5.3) dengan menggunakan rumus:

$$Z_{\text{cutting point}} = \frac{(Z_Y + Z_{X1} + Z_{X2} + Z_{X3} + Z_{X4})}{5} = \frac{(7,3 + 4,44 + 8,2 + 10 + 10)}{5} = 7,99$$

Angka 7,99 merupakan Garis Kemiskinan (*cutting point*) untuk mengklasifikasikan apakah suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin secara sosial demografi.

- Rumah tangga yang mempunyai nilai indeks atau $Z_{\text{cutting point}} < 7,99$ diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin.
 - Rumah tangga yang mempunyai nilai indeks atau $Z_{\text{cutting point}} \geq 7,99$ diklasifikasikan sebagai rumah tangga tidak miskin.
4. Melakukan pembakuan semua indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kemiskinan Sosial Demografi untuk setiap rumah tangga sampel di daerah penelitian dengan menggunakan rumus yang sama dalam melakukan pembakuan *cutting point* (poin), yaitu
- a. Rumus pembakuan yang searah (untuk variabel Jumlah anggota rumah tangga berusia 7+)
 - b. Rumus pembakuan yang tidak searah (untuk variabel ‘jumlah ART’, ‘jumlah anak lahir hidup’, ‘jumlah anak balita yang meninggal’ dan ‘jumlah ART usia 15 th + yang migrasi keluar’)
5. Menghitung Indeks Kemiskinan Sosial Demografi, yang merupakan rata-rata nilai pembakuan dari semua indikator (Z rata-rata dari nilai $Z_Y, X1-X5$, di setiap rumah tangga) di setiap rumah tangga menggunakan rumus:

$$Z_{\text{rata-rata}} = \frac{(Z_Y + Z_{X1} + Z_{X2} + Z_{X3} + Z_{X4})}{5}$$

Dengan menggunakan rumus ini didapatkan nilai Indeks Kemiskinan Sosial Demografi dari setiap rumahtangga sampel penelitian (sebanyak 400 rumahtangga, lihat lampiran).

Dengan membandingkan nilai Indeks Kemiskinan Sosial Demografi di tingkat rumah tangga (Z_{rataan}) dengan Garis Kemiskinan Sosial Demografi ($Z_{cutting\ point}$), didapatkan distribusi rumah tangga berdasarkan kategori miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator sosial demografi seperti dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Distribusi Rumah Tangga sampel di daerah penelitian di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur berdasarkan kondisi kemiskinan sosial demografi.

Kategori berdasar kondisi sosial demografi	Frekuensi	Persen
Miskin	252	68,1
Tidak Miskin	118	31,9
Jumlah *)	370	100,0

Catatan: *) Missing kasus sebanyak 30 dari total 400 sampel.

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Hasil penghitungan Indeks Kemiskinan Sosial Demografi di setiap rumah tangga memberikan hasil akhir bahwa 68,1 persen rumah tangga sampel didaerah penelitian di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan masuk dalam klasifikasi rumah tangga miskin. Proporsi ini lebih besar dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan hanya berdasarkan jumlah anggota rumah tangga (ART) yang menunjukkan 55,2 persen rumah tangga masuk dalam klasifikasi rumah tangga miskin. Keadaan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel lainnya berkontribusi dalam meningkatkan jumlah proporsi

rumahtangga miskin, atau berkontribusi terhadap memburuknya kondisi sosial demografi rumahtangga. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan sosial demografi ini, dengan menggunakan jumlah ART sebagai indikator utama dalam pengukuran kondisi kemiskinan Sosial Demografi ini adalah:

1. Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+
2. Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga.
3. Jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga.
4. Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar Kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir.

Dengan mempertimbangkan keempat variabel di atas, besarnya proporsi penduduk miskin (68,1 persen) berdasarkan pengukuran kondisi sosial demografi rumah tangga di daerah penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kondisi demografi, seperti keluarga berencana, yang berkaitan dengan jumlah kelahiran dalam rumah tangga serta perbaikan kondisi kesehatan, yang berkaitan dengan penurunan angka kematian, terutama kematian anak balita masih perlu ditingkatkan. Kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari tingkat pendidikan dan kesempatan kerja juga masih perlu ditingkatkan. Pendidikan anggota rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang bermigrasi keluar juga masih mempunyai hubungan yang signifikan terhadap jumlah anggota rumah tangga sebagai proksi kondisi kemiskinan sosial demografi. Keadaan ini sangat berkaitan dengan keterisolasian wilayah Kecamatan Sebatik, yang membatasi ketersediaan sarana prasarana pendidikan kesempatan kerja.

Sebagai daerah perbatasan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, penduduk di wilayah ini mempunyai akses yang lebih besar untuk mencari pekerjaan di negara tetangga, melalui berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Karena itu mobilitas ke negara tetangga untuk bekerja

merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah kurangnya lapangan kerja. Tetapi dari sisi pendidikan, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan tidak mempunyai kemudahan untuk menempuh pendidikan di negara tetangga. Bahkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja dan menetap di wilayah Malaysia dengan anggota keluarganya biasa mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah di wilayah Indonesia. Tetapi untuk Pulau Sebatik sendiri, sarana prasarana pendidikan tersebut masih sangat. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sudah cukup banyak tersedia, yaitu sebanyak 23 buah SD. Tetapi pada tingkat SMP hanya terdapat 5 sekolah dan pada tingkat SMA hanya terdapat 2 sekolah, masing-masing terletak di Desa Pancang dan Desa Sei Nyamuk (Tim Peneliti PPK-LIPI, 2006: 59-60).

Pemerintah Kabupaten Nunukan memang mempunyai program untuk mendirikan asrama untuk anak-anak TKI yang orang tuanya masih bekerja di Malaysia, agar dapat melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Tetapi fasilitas itu direncanakan terletak di Pulau Nunukan, sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, akses tersebut juga relatif tidak mudah untuk dijangkau penduduk di Pulau Sebatik.

Dari analisis indikator-indikator serta indeks kemiskinan sosial demografi di Kecamatan Sebatik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi kemiskinan di wilayah perbatasan dari perpektif non-ekonomi. Pemahaman kondisi ini tentunya memberikan arahan untuk intervensi dari perpektif non-ekonomi, meskipun intervensi ekonomi juga masih dibutuhkan, dengan mempertimbangkan bahwa variabel yang berkaitan dengan kesempatan kerja (proksi dari migrasi keluar anggota rumah tangga berumur 15 tahun keatas) juga berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan sosial demografi.

Pengembangan Indeks Kemiskinan Sosial Demografi, diharapkan bermanfaat sebagai pengukuran kompelemen terhadap pengukuran kemiskinan berdasarkan perhitungan ekonomi (*head count index*). Dari sisi pengumpulan data, indikator-indikator yang

digunakan dalam pengukuran Indeks kemiskinan Sosial Demografi ini lebih mudah dikumpulkan, karena menyangkut informasi yang mudah diingat oleh anggota rumah tangga. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan juga dapat lebih akurat. Untuk melihat keterkaitan antara pengukuran kemiskinan berdasarkan kondisi sosial demografi dan pengukuran berdasarkan pendekatan ekonomi/pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan (*head count index*), dilakukan uji konsistensi, yang dibahas dalam bagian berikut.

Seperti telah dibicarakan pada bagian sebelumnya, sampai saat ini kebanyakan pengukuran kemiskinan menggunakan indikator ekonomi, yaitu jumlah pengeluaran per kapita. Banyak studi mengenai kemiskinan yang pernah dilakukan menggunakan indikator ekonomi untuk mengukur kemiskinan. Sejalan dengan itu, kebijakan yang diambil pemerintah yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan juga menggunakan indikator yang sama untuk memilih kelompok sasaran. Indikator pengeluaran ini digunakan sebagai proksi dari jumlah pendapatan, karena pengukurannya relatif lebih mudah daripada pengukuran jumlah pendapatan.

Berdasarkan indikator ekonomi, BPS menetapkan garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kalimantan Timur adalah Rp. 171.122,- per kapita. Artinya, mereka yang mempunyai pengeluaran per kapita lebih kecil dari Rp. 171.122,- termasuk kategori penduduk miskin, sedangkan yang pengeluarannya sama atau lebih besar dari jumlah tersebut dikelompokkan sebagai penduduk tidak miskin. Jika mengacu pada garis kemiskinan ekonomi tersebut, maka sebanyak 30,3 persen rumah tangga yang menjadi sampel penelitian termasuk rumah tangga miskin. Selanjutnya, sebanyak 62,3 persen termasuk dalam kelompok rumah tangga tidak miskin. Jumlah rumah tangga miskin berdasarkan indikator pengeluaran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga miskin menurut indikator sosial demografi, yaitu sebanyak 59,2 persen rumah tangga adalah rumah tangga miskin.

Data pada Tabel 5.5 memperlihatkan proporsi rumah tangga menurut kemiskinan sosial demografi dan kemiskinan berdasarkan indikator pengeluaran. Sekitar seperempat dari rumah tangga sampel di Kalimantan Timur adalah rumah tangga yang tergolong miskin sosial demografi dan juga miskin pengeluaran. Proporsi ini lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang sama di Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 40 persen rumah tangga sampel. Selanjutnya, sekitar sepertiga rumah tangga sampel di Provinsi Kalimantan Timur tergolong rumah tangga miskin demografi, akan tetapi tidak miskin pengeluaran. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Salah satu di antaranya adalah yang terkait dengan variabel yang memberi sumbangan terbesar terhadap kemiskinan demografi di Kalimantan Timur, yaitu jumlah tahun sekolah per kapita rumah tangga sampel (*cutting point* = 5,74). Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa dari 219 rumah tangga miskin demografi, sebanyak 148 rumah tangga (67,6 persen) adalah yang mempunyai tingkat pendidikan di bawah *cutting point* yang ditentukan.

Tabel 5.5. Kelompok Rumah Tangga Menurut Kemiskinan Sosial Demografi dan Pengeluaran, Desa Sungai Pancang dan Sungai Nyamuk, Nunukan, Kalimantan Timur (%)

Kemiskinan Sosial Demografi	Kemiskinan pengeluaran		Jumlah
	Miskin	Tidak Miskin	
Miskin	24,9	34,3	59,2
Tidak Miskin	7,8	33,0	40,8
Jumlah	32,7	67,3	100,0

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Komposisi anggota rumah tangga sampel menurut umur kemungkinan menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan mereka. Anggota rumah tangga sampel penelitian ini didominasi oleh mereka yang berusia muda, yaitu sekitar 37 persen dalam usia 0-14 tahun, di samping sekitar 15 persen penduduk yang berusia 45 tahun ke atas. Kedua kelompok penduduk ini kemungkinan mempunyai pendidikan, dalam arti jumlah tahun sekolah yang ditempuh, kurang dari 5,74 (tahun).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan anggota rumah tangga sampel terkait dengan komposisi umur tersebut. Bagi kelompok umur muda, kecenderungan orang tua untuk mengawinkan anak-anak mereka dalam usia muda mengakibatkan anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara anak-anak perempuan, khususnya, masih ditemukan kasus-kasus mereka yang dikawinkan pada usia sekitar 12 tahun, ketika mereka kebanyakan baru menyelesaikan sekolah dasar. Sebaliknya, pada kelompok penduduk yang lebih tua, sebanyak 15 persen anggota rumah tangga yang berusia 45 tahun ke atas (kemungkinan juga termasuk yang lebih muda) adalah mereka yang berada dalam usia sekolah ketika program wajib belajar belum dicanangkan⁵¹. Dengan kondisi tersebut, ada kemungkinan mereka tidak menempuh pendidikan tinggi, terlihat dari besarnya proporsi kelompok penduduk tersebut yang tidak tamat SD, yaitu dengan lama bersekolah kurang dari enam tahun.

Meskipun tergolong miskin sosial demografi, sebagian rumah tangga mampu mempunyai pengeluaran lebih besar dibanding standar pengeluaran yang ditetapkan oleh BPS (Rp. 171.122,- per kapita). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah keberadaan sumberdaya alam yang dapat memberikan hasil dalam jumlah besar, terutama tanaman kakao yang bernilai jual tinggi. Dengan posisi sebagai daerah perbatasan menyebabkan mayoritas penduduk Kecamatan Sebatik melakukan interaksi ekonomi dengan negara tetangga, termasuk menjual hasil pertanian, perkebunan dan hasil

⁵¹ Program wajib belajar enam tahun dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1984.

melaut. Semua hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dapat ditampung oleh pasar Malaysia, sehingga mereka yang melakukan usaha ekonomi bisa mempunyai penghasilan secara tetap. Selain itu, penjualan dengan menggunakan kurs ringgit Malaysia memberikan keuntungan tersendiri, karena jika dikonversi ke mata uang rupiah nilai jual komoditas-komoditas tersebut lebih tinggi daripada penjualan di dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan masyarakat, termasuk rumah tangga sampel tidak termasuk sebagai rumah tangga miskin pengeluaran sebagaimana kategori BPS.

Selain itu, jika dibandingkan antara kedua jenis kemiskinan, rumah tangga miskin sosial demografi hampir dua kali lebih besar daripada rumah tangga miskin pengeluaran (masing-masing 59 persen dan 30 persen secara berurutan). Hal ini berimplikasi bahwa hanya sebagian rumah tangga miskin sosial demografi yang juga tergolong miskin pengeluaran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hanya sedikit rumah tangga sampel yang termasuk kategori miskin sosial ekonomi dan pengeluaran. Hal yang sama juga berlaku untuk menjelaskan fenomena besarnya proporsi rumah tangga miskin sosial demografi namun tidak miskin pengeluaran.

5.2. Indeks Kemiskinan Sosial Demografi: Kasus Tiga Desa (Nanedakele, Nusa, dan Bukide) di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara

Seperti telah dikemukakan pada Bab II, indeks kemiskinan sosial demografi merupakan indeks komposit dari beberapa variabel sosial-demografi. Dari sembilan variabel sosial demografi yang merupakan variabel bebas (*independent variables*) (lihat Kerangka Pikir pada Bab I), dua di antaranya (pekerja anak dan KRT perempuan) tidak dimasukkan dalam uji statistik dengan menggunakan regresi linier untuk melihat adanya hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan *dependent variable* (jumlah ART) pada tingkat taraf nyata (α), yaitu sebesar 5 persen. Dikeluarkannya dua variabel tersebut dari perhitungan adalah karena jumlah kasus (n) terlalu kecil, (< 5 rumah tangga). Dengan demikian hanya ada enam

independent variables, yaitu (1) jumlah lama tahun sekolah (YOS) untuk seluruh ART per jumlah ART usia 7 tahun ke atas, (2) indeks jenis pekerjaan ISEI per jumlah ART bekerja, (3) jumlah anak lahir hidup, (4) jumlah balita meninggal, (5) jumlah ART usia 15 th ke atas bermigrasi ke luar kabupaten tempat tinggal sekarang, dan (6) umur perempuan pada perkawinan pertama. Seperti dikemukakan pada Bab II, enam *independent variables* tersebut dilakukan analisis untuk mendeteksi apakah diantara variabel-variabel ini saling berkorelasi/tidak berkorelasi. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya multikoleniaritas di antara semua atau beberapa *independent variables* yang diperlihatkan oleh nilai $VIF < 10$ (lihat Tabel 5.6).

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan regresi linier antara enam *independent variables* tersebut dengan *dependent variable* (Y: Jumlah ART), hanya terdapat empat variabel sosial-demografi yang menunjukkan hubungan pada taraf signifikansi (α) < 5 persen (lihat Tabel 5.6). Terlihat pada tabel ini, bahwa hubungan antara jumlah anak lahir hidup dengan jumlah ART menunjukkan tingkat signifikansi yang paling tinggi, demikian pula hubungan antara jumlah ART usia 15 tahun ke atas yang melakukan migrasi ke luar Kabupaten Sangihe dengan jumlah ART. Dua variabel lain berada pada taraf signifikansi sebesar 0,7 persen untuk korelasi antara jumlah anak balita yang meninggal dengan jumlah ART, dan 1,6 persen untuk hubungan antara indeks jenis pekerjaan ISEI per jumlah ART bekerja dengan jumlah ART.

Tabel 5.6. Hasil Regresi Linier Antara *Dependent Variable* (Jumlah ART) Dengan *Independent Variables*

	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,088	,474		6,518	,000		
X1: YOS/Jml ART	-,028	,060	-,036	-,475	,635	,723	1,383
X2: indeks ISEL/Jml ART	,032	,013	,185	2,435	,016	,738	1,356
X3: Jml anak lahir hidup	,263	,058	,321	4,550	,000	,851	1,176
X4: Jml balita meninggal	-,497	,183	-,187	-2,709	,007	,896	1,116
X5: Jml ART usia 15 th+ bermigrasi ke luar	,803	,181	,299	4,443	,000	,937	1,067
X6: umur perempuan pada saat perkawinan pertama	-,015	,016	-,065	-,964	,336	,935	1,070

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIP, 2007.

Hubungan/korelasi (Beta) antara indeks jenis pekerjaan ISEI per jumlah ART bekerja dengan jumlah ART bernilai 0,185. Hal ini menunjukkan hubungan searah (karena tanda dari nilai tersebut adalah +), yang berarti meningkatnya nilai indeks jenis pekerjaan ISEI per jumlah ART yang bekerja, akan diikuti dengan jumlah ART yang semakin banyak. Keadaan ini mencerminkan bahwa rumah tangga sampel di tiga desa penelitian yang ART-nya bekerja pada jenis pekerjaan dengan nilai yang semakin besar, maka rumah tangga tersebut juga mempunyai jumlah ART yang lebih besar. Suatu kondisi yang agak sulit dimengerti karena kecenderungan umum yang terjadi biasanya menunjukkan bahwa rumah tangga dengan jenis-jenis pekerjaan 'tradisional' (nilai indeks jenis pekerjaan ISEI rendah) cenderung ART lebih besar daripada rumah tangga dengan jenis pekerjaan 'modern' (nilai indeks jenis pekerjaan ISEI-nya tinggi).

Tabel 5.6 juga menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah ART usia 15 tahun ke atas yang bermigrasi ke luar bersifat searah dengan nilai 0,299. Angka Beta dengan tanda positif (+) ini menggambarkan bahwa semakin banyaknya jumlah ART yang melakukan migrasi ke luar juga diikuti dengan jumlah ART dalam rumah tangga yang semakin banyak pula. Dengan perkataan lain, adanya ART yang melakukan migrasi bukan mengurangi jumlah ART dalam rumah tangga bersangkutan. Korelasi semacam ini terjadi karena pengaruh dari konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Termasuk migran dalam penelitian ini adalah ART yang pernah atau sedang melakukan perpindahan ke luar kabupaten Sangihe, tetapi (pada saat penelitian ini) mereka masih terdaftar/menjadi anggota rumah tangga bersangkutan (bukan melakukan migrasi permanen).

Tingkat signifikansi 0,000 pada korelasi antara jumlah anak lahir hidup dengan jumlah ART dengan Nilai Beta 0,321 menunjukkan adanya hubungan linier antara dua variabel tersebut. Hal ini berarti bahwa jumlah anak lahir hidup yang semakin banyak akan diikuti dengan jumlah ART yang semakin banyak pula. Korelasi pada taraf signifikansi 0,000 juga ditemukan pada hubungan antara jumlah anak balita meninggal dengan jumlah ART dengan tanda koefisien negatif (-). Tanda negatif (-) pada Beta menunjukkan

hubungan dua variabel tersebut adalah terbalik, yang dapat diartikan bahwa jumlah anak balita yang meninggal semakin banyak, maka jumlah ART semakin sedikit. Demikian sebaliknya, semakin sedikit jumlah anak balita yang meninggal, jumlah ART dalam rumah tangga semakin banyak.

Semua *independent variables* maupun *dependent variable* (jumlah ART) dipakai untuk menghitung indeks kemiskinan sosial demografi. Perumusan indeks kemiskinan sosial demografi dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata dari nilai *cut-off-point* dari setiap indikator yang sudah dibakukan. Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II, penentuan *cut-off-point* untuk *independent variables* didasarkan pada nilai *cut-off-point dependent variabel* (jumlah ART) yang sebesar 4 orang, atau terletak pada batas nilai persentase kumulatif sebesar 60,9 persen. Batas nilai ini kemudian dipakai untuk menentukan nilai *cut-off-point* untuk semua *independent variables* dengan menggunakan metode interpolasi yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.7, kolom 2. Lebih lanjut, pembakuan terhadap semua *independent* dan *dependent variables* karena ukuran dan satuan berbeda satu dengan yang lain. Dengan menggunakan rumus pembakuan searah dan tidak searah (lihat Bab II), diperoleh nilai pembakuan (Z) yang dicantumkan pada Tabel 5.7, kolom 8.

Tabel 5.7. Nilai cut-off-point/indikator yang akan dibakukan, Minimum&Maksimum Indikator Sosial-Demografi, Batas Bawah&Batas Atas Daftar Konversi, dan Nilai Pembakuan, Sulawesi Utara

Indikator sosial-demografi	Nilai cut-off-point/ nilai indikator yg akan dibakukan	Nilai indikator maksimum	Nilai indikator minimum	Batas bawah daftar konversi	Batas atas daftar konversi	Nilai hasil pembakuan (Z)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah ART	4,00	11	1	0	10	7,30
Indeks ISEI/Jml ART	15,72	90,5	0	0	10	2,56
Jml anak lahir hidup	3,00	12	3	0	10	8,36
Jml balita meninggal	0,00	6	0	0	10	10,0
Jml ART usia 15 th+ bermigrasi ke luar	0,00	3	0	0	10	10,0

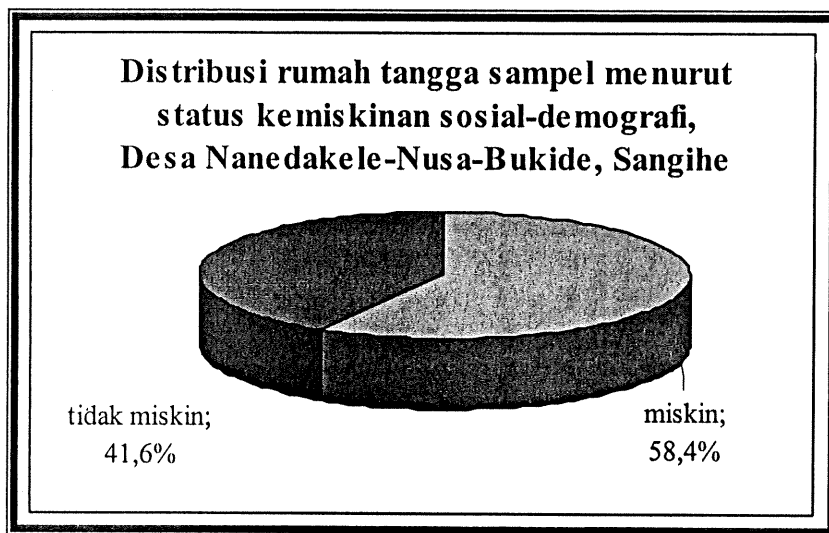
Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Dengan menjadikan empat *independent variables* dan satu *independent variable* sebagai satu ukuran komposit tunggal, maka indeks kemiskinan sosial-demografi merupakan garis kemiskinan yang membagi rumah tangga sampel ke dalam kelompok miskin dan tidak miskin. Bahkan, dengan ditentukannya indeks kemiskinan sosial-demografi pada setiap rumah tangga, maka indeks ini dapat dipakai untuk menentukan/mengidentifikasi apakah suatu rumah tangga termasuk miskin/tidak miskin. Merujuk variabel-variabel tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa rumah tangga miskin sosial demografi cenderung dicirikan oleh jumlah ART-nya banyak, jumlah anak lahir hidup banyak (meskipun ada beberapa di antaranya yang pada saat sekarang sudah tidak termasuk dalam rumah tangga bersangkutan), mempunyai paling tidak satu ART yang bermigrasi ke luar kabupaten tempat tinggal sekarang, jumlah ART yang bekerja sedikit, dan ART bekerja pada jenis pekerjaan yang mempunyai nilai indeks ISEI rendah/kecil (seperti pekerjaan nelayan, tenaga jasa perseorangan, dan buruh kasar lainnya). Nilai indeks kemiskinan sosial-demografi diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai pembakuan (Z_{rataan}) dari nilai cut-off-point setiap indikator sosial-demografi, dan juga Z_{rataan} untuk semua rumah tangga (lihat Bab II). Nilai Z_{rataan} berkisar dari 1-10, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tidak miskin.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui batas nilai indeks untuk menentukan garis kemiskinan sosial-demografi, yaitu sebesar 7,64. Rumah tangga yang berada di bawah nilai indeks 7,64 termasuk dalam rumah tangga miskin demografi. Merujuk pada garis kemiskinan/nilai indeks tersebut, maka terdapat sebanyak 58,4 persen rumah tangga miskin di tiga desa penelitian (Nanedakile, Nusa dan Bukide) dari 341 rumah tangga sampel. Rumah tangga miskin sosial-demografi yang mencapai lebih dari separuh rumah tangga sampel tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kependudukan/sosial-demografi di wilayah perbatasan Sangihe-Filipina ini masih dalam kondisi tertinggal. Banyak faktor yang berpengaruh, antara lain kurangnya aksesibilitas (fisik, sosial, transportasi dan komunikasi, ekonomi), kualitas SDM yang rendah, dan terbatasnya sarana

pelayanan pendidikan dan kesehatan (termasuk pelayanan keluarga berencana).

Diagram 5.1.



Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Tingginya angka kemiskinan sosial-demografi rumah tangga di wilayah perbatasan Sangihe-Mindanao kemungkinan besar berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh rumah tangga miskin yang hanya mempunyai nilai indeks jenis pekerjaan ISEI yang rendah. Ini ditunjukkan oleh nilai Z -nya yang terkecil (2,56) dibandingkan dengan nilai indikator lainnya (lihat Tabel 5.7, kolom 8). Keadaan ini kemungkinan dapat dipahami dari adanya banyaknya rumah tangga yang ART-nya bekerja pada jenis-jenis pekerjaan sebagai nelayan dan petani pada lahan sangat sempit. Pekerjaan kenelayanan umumnya hanya menggunakan perahu motor bermesin kecil (mereka menyebutnya *pump-boot*), bahkan sebagian lainnya hanya menggunakan sampan (menurut istilah lokal disebut *londe*).

Kebanyakan rumah tangga miskin sosial-demografi kemungkinan mempunyai 1-2 orang yang bekerja sebagai nelayan 'tradisional'. Sedangkan mereka yang bekerja pada jenis pekerjaan petani, mayoritas petani di lokasi penelitian adalah petani lahan pangan pada luas yang kira-kira hanya puluhan meter persegi (masyarakat setempat menyebutnya kebun). Sebagian kecil petani memiliki kebun pala dan kelapa, tetapi juga bukan merupakan kebun yang cukup luas, sehingga mereka juga termasuk petani berlahan sempit, yang dalam klasifikasi jenis pekerjaan ISEI dimasukkan dalam kategori petani tanpa teknologi pertanian (*farm-hand*).

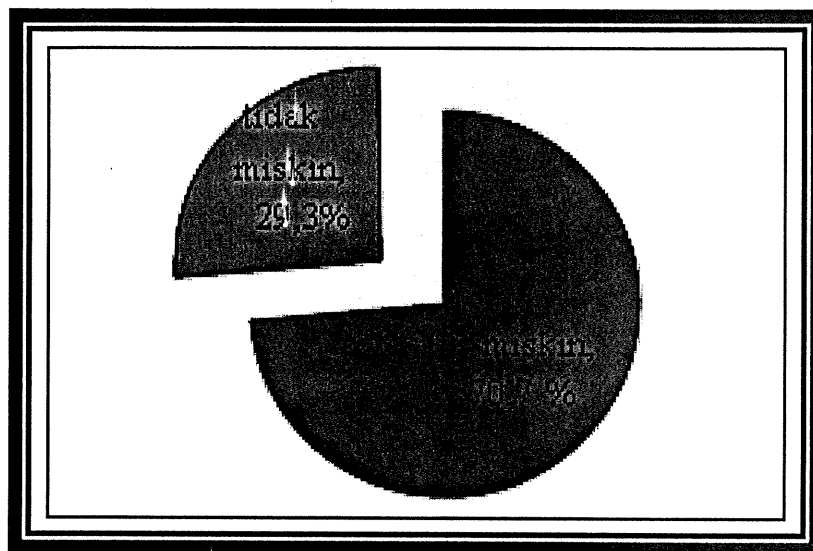
Terpusatnya rumah tangga miskin sosial-demografi pada jenis-jenis pekerjaan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan potensi sumberdaya alam dan penguasaan teknologi penangkapan serta iklim/cuaca. Kecamatan Nusa Tabukan yang meliputi empat desa di dua pulau agak besar dan pulau-pulau kecil, bertipologi wilayah pesisir dan pertanian. Potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan hanya pada sumberdaya laut (SDL), karena wilayah perairan laut di sekitar pulau ini sangat luas dan tersedia berbagai jenis SDL yang besar (lihat BAB IV). Namun demikian, kekayaan SDL tersebut belum dimanfaatkan oleh penduduk dengan optimal, karena keterbatasan kualitas SDM yang rendah (diindikasikan oleh penggunaan teknologi penangkapan yang masih sederhana akibat keterbatasan modal dan tingkat pendidikan/ketrampilan). Jenis pekerjaan nelayan di desa-desa penelitian yang juga merupakan wilayah kepulauan juga sangat tergantung pada keadaan musim angin (yang berakibat pada kuat/lemahnya gelombang laut) dalam melakukan pekerjaan kenelayanan. Pengaruh faktor alam lain yang berpengaruh terhadap keterbatasan jenis pekerjaan adalah rendahnya potensi sumberdaya alam. Telah dikemukakan pada Bab IV, potensi SDA yang ada hanya berupa lahan, yang umumnya berupa hutan primer (termasuk tanaman sagu liar yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan penduduk). Tidak ada potensi SDA lain yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanian modern. Dengan topografi wilayah yang berbukit yang kemiringan lerengnya cukup

tajam, maka petani hanya dapat mengembangkan usaha tani pada lahan dan jenis tanaman yang sangat terbatas.

Indeks kemiskinan sosial-demografi merupakan ukuran kemiskinan yang dapat melengkapi ukuran-ukuran kemiskinan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Salah satu ukuran kemiskinan yang sering dipakai oleh berbagai kalangan pemerintah maupun akademisi adalah ukuran kemiskinan yang dimotori oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berdasarkan pada variabel pengeluaran (dilihat sebagai proksi pendapatan), atau merupakan ukuran kemiskinan berdimensi ekonomi. Dengan melakukan tabulasi silang antara status kemiskinan sosial-demografi dengan kemiskinan pengeluaran, dapat diketahui dan dipahami suatu rumah tangga miskin sosial-demografi yang juga miskin ekonomi, miskin sosial-demografi tetapi tidak miskin ekonomi, tidak miskin sosial-demografi tetapi miskin ekonomi, dan tidak miskin sosial-demografi dan juga tidak miskin ekonomi. Pemahaman terhadap masing-masing kelompok tersebut diperlukan karena intervensi program pembangunan juga berbeda-beda menurut kelompok kemiskinan tersebut.

Dengan menghitung besar pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan yang esensial dan dengan menggunakan garis kemiskinan di Kabupaten Sangihe untuk wilayah perdesan yang ditetapkan oleh BPS (yaitu sebesar Rp 136.004,-/bulan/ kapita), maka diketahui terdapat 70,7 persen rumah tangga miskin pengeluaran/ekonomi (lihat Diagram 5.2). Angka kemiskinan yang sangat tinggi menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga di tiga desa penelitian belum dapat memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang paling mendasar (seperti pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi, dan keperluan sosial).

Diagram 5.2. Distribusi Rumah Tangga Sampel Menurut Status Kemiskinan Sosial Demografi, Kecamatan Nusa Tabukan-Sangihe, Sulawesi Utara, 2007



Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Pengeluaran untuk kebutuhan makanan yang umumnya berupa sagu dan lauk pauk termasuk pada tingkatan nilai rupiah yang rendah⁵². Jenis makanan pokok yang paling umum dikonsumsi adalah

⁵² Harga sagu di pasar Petta berkisar antara Rp 80.000,- - Rp 90.000,- (pada musim kemarau) atau Rp 50.000 - Rp 60.000,- (pada musim penghujan) per bakul besar yang dapat dipergunakan selama satu bulan untuk rumah tangga yang beranggotakan 3-4 orang. Sebagian kecil rumah tangga memperoleh sagu dengan memproduksi sendiri. Pohon sagu diperoleh dari kebun sendiri maupun dari sagu yang tumbuh di hutan. Namun demikian, mengolah tepung sagu tersebut hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, karena pada musim kemarau pohon sagu tidak tumbuh dan tidak berkembang dengan baik, karena jenis sagu di lokasi

sagu dan beras, tetapi konsumsi sagu cenderung lebih banyak daripada beras. Demikian pula lauk-pauk yang umumnya berupa ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan sendiri (ikan segar maupun ikan yang sudah dikeringkan). Sangat jarang rumah tangga yang mengkonsumsi sayuran yang harus dibeli di pasar di P. Sangahe Besar (Pasar Petta). Kebiasaan jajan makanan matang cenderung jarang dilakukan, diindikasikan oleh sedikitnya penduduk yang menjual makanan matang. Demikian pula warung-warung yang ada pada umumnya hanya menjual jenis barang-barang kebutuhan pokok, itupun dalam jumlah dan jenis yang terbatas. Keadaan ini secara kasar juga merupakan indikasi rendahnya pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk kebutuhan bahan makanan.

Selain pengeluaran untuk kebutuhan makanan yang rendah, pemenuhan kebutuhan bukan makanan yang mendasar juga tergolong sedikit. Pengeluaran untuk biaya pendidikan umumnya rendah, karena mayoritas tamatan SMP tidak melanjutkan lagi ke bangku sekolah yang lebih tinggi. Bahkan masih terdapat cukup banyak anak-anak yang setelah menamatkan SD juga berhenti dari bangku sekolah, karena di setiap desa tidak tersedia sekolah setingkat SMP, padahal jarak antar desa (bahkan juga dusun) harus dilakukan dengan transportasi laut. Seperti halnya dengan pengeluaran biaya untuk pendidikan, biaya untuk kesehatan juga rendah. Pengeluaran biaya untuk kesehatan tidak selalu dikeluarkan setiap bulan, karena mereka hanya memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut jika sudah dalam kondisi 'agak serius'. Jenis penyakit ringan hanya diobati sendiri (membeli obat di warung atau meminum ramuan tradisional) dan umumnya tidak diperhitungkan dalam pengeluaran bulanan. Pengeluaran bukan makanan untuk biaya transportasi⁵³ cenderung

penelitian adalah pohon sagu berukuran kecil. Satu pohon sagu hanya menghasilkan satu bakul tepung sagu yang dapat dipakai untuk makan selama 7 hari untuk rumah tangga beranggotakan 5-6 orang, atau 2 minggu untuk rumah tangga yang memiliki anggota 3 orang.

⁵³ Pengeluaran untuk transportasi umumnya untuk pergi ke pasar Petta yang terletak di ujung P. Sangahe Besar. Tujuan ke pasar pada umumnya untuk menjual hasil tangkapan, membeli sembako dan barang-barang kebutuhan harian lainnya.

paling tinggi daripada pengeluaran untuk jenis bukan makanan lainnya (termasuk listrik). Tidak adanya transportasi (laut) umum menyebabkan penduduk harus menggunakan *pump boot* mereka sendiri. Untuk meringankan biaya transportasi, mereka biasanya pergi bersama-sama. Pemilik *pump boot* mendapat 'biaya tumpangan' (berkisar antara Rp 20 - 30 ribu pergi pulang). Meskipun biaya transportasi mahal, karena besar pengeluaran bukan makanan lainnya tergolong kecil, maka rata-rata besar pengeluaran per kapita untuk bukan makanan juga rendah (Rp.....). Bersama-sama dengan pengeluaran untuk makanan yang hanya Rp.../kapita/bulan, maka sebagian besar rumah tangga hanya mempunyai pengeluaran yang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, sehingga mereka termasuk dalam rumah tangga miskin pengeluaran.

Hubungan antara kemiskinan pengeluaran dengan kemiskinan sosial-demografi memperlihatkan, terdapat sebesar 39,6 persen rumah tangga yang termasuk dalam rumah tangga miskin sosial-demografi dan miskin pengeluaran/ekonomi. Kelompok ini kemungkinan besar adalah rumah tangga yang ART-nya bekerja pada jenis pekerjaan sebagai nelayan dan/atau petani kebun tanaman pangan. Pendapatan dari dua jenis pekerjaan ini umumnya rendah. Nelayan di tiga desa penelitian pada umumnya mempunyai kapasitas penangkapan yang rendah, yaitu hanya menggunakan perahu motor bermesin kecil (13 PK) dan bahkan beberapa nelayan hanya 'mengail' dengan menggunakan sampan (*londe*), disamping alat-alat tangkapnya juga masih sederhana (jaring dan pancing). Akibatnya, jangkauan wilayah tangkap terbatas pada wilayah perairan yang tidak jauh dari pantai. Keadaan ini mempengaruhi hasil tangkapan, yaitu dalam jumlah sedikit, lebih-lebih jika dalam satu rumah tangga hanya terdapat satu orang yang bekerja. Hasil penjualan ikan hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, itupun dalam kuantitas yang sedikit. Meskipun dalam rumah tangga nelayan umumnya juga terdapat ART yang bekerja sebagai petani kebun, tetapi karena luas kebun sangat sempit (kurang dari 50 m²), hasil kebun yang umumnya hanya ubi kayu sering dipakai untuk konsumsi sendiri yang jika ditukar dalam nilai rupiah hanya berada pada nilai pengeluaran yang rendah. Dengan

demikian, rumah tangga yang ART-nya bekerja pada dua jenis pekerjaan tersebut pada umumnya mempunyai tingkat pengeluaran rendah, yaitu berada di bawah atau pada batas garis kemiskinan pengeluaran. Artinya rumah tangga tersebut termasuk dalam rumah tangga miskin pengeluaran. Mereka juga termasuk dalam rumah tangga miskin sosial demografi, karena jenis pekerjaan nelayan bernilai rendah, dimana variabel nilai jenis pekerjaan merupakan faktor penentu utama (memiliki kontribusi dominan) dalam menentukan suatu rumah tangga termasuk miskin sosial-demografi.

Tabel 5.8. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kemiskinan Sosial-Demografi dan Kemiskinan Pengeluaran, Kecamatan Nusa Tabukan-Sangihe, Sulawesi Utara, 2007 (%), N= 341

<i>Kemiskinan Sosial Demografi</i>	<i>Kemiskinan Pengeluaran</i>		<i>Jumlah</i>
	<i>Miskin</i>	<i>Tidak miskin</i>	
Miskin	39,6	7,6	47,2
Tidak miskin	31,1	21,7	52,8
Jumlah	70,7	29,3	100,0

Sumber: Penelitian Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, PPK-LIPI, 2007.

Rumah tangga tidak miskin sosial-demografi tetapi miskin pengeluaran juga cukup besar, yakni hampir sepertiga dari total rumah tangga sampel. Diperkirakan termasuk kelompok ini adalah rumah tangga yang mempunyai ART bekerja pada jenis pekerjaan buruh kasar, umumnya sebagai kuli bangunan⁵⁴, tetapi upah yang diperoleh tidak dapat dipakai untuk belanja kebutuhan makanan dan bukan makanan yang melebihi nilai garis kemiskinan pengeluaran,

⁵⁴ Nilai indeks jenis pekerjaan ini adalah 21, atau lebih tinggi dari jenis pekerjaan nelayan dan petani kebun yang hanya 16)

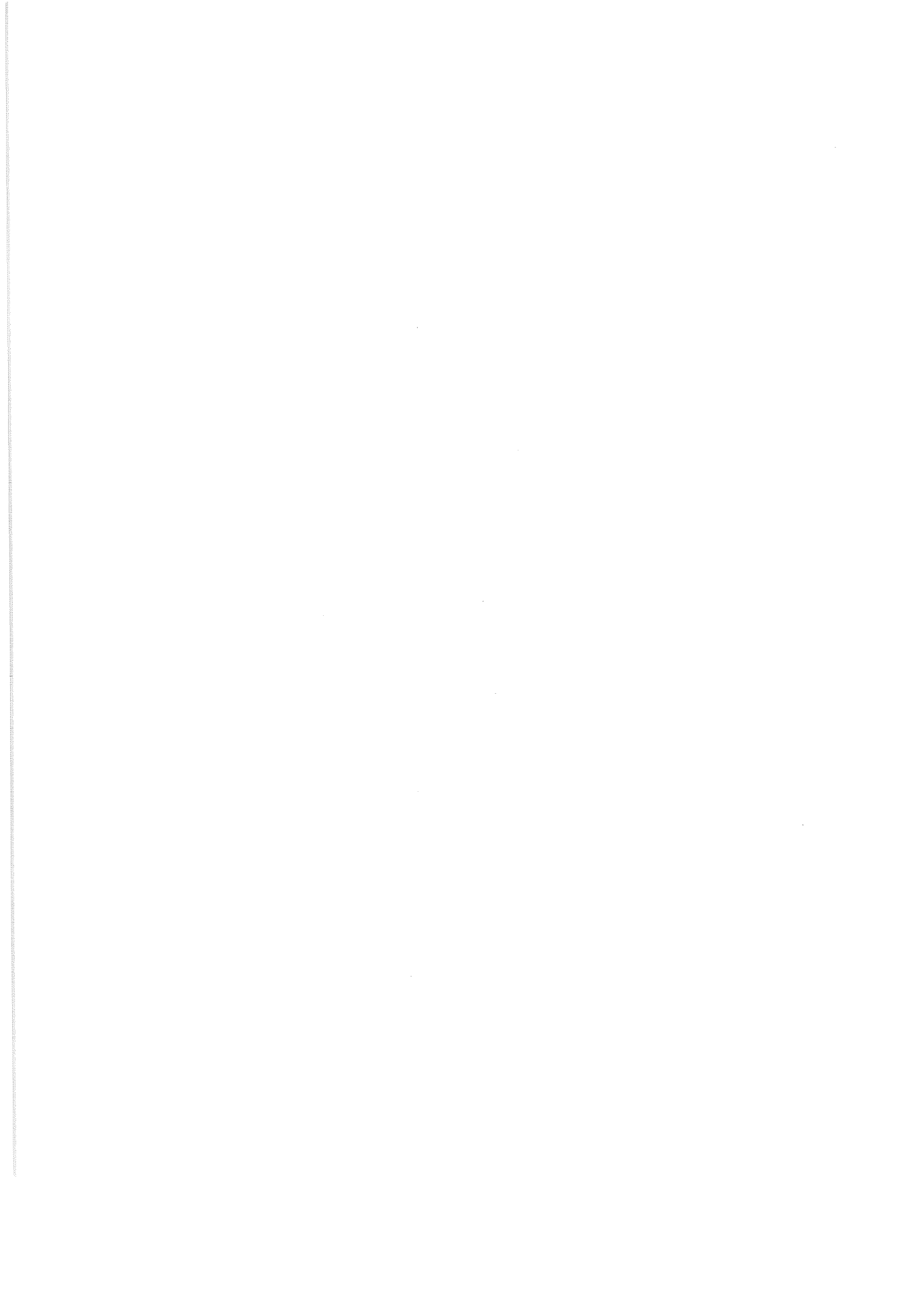
sehingga mereka termasuk miskin pengeluaran. Pekerjaan sebagai buruh bangunan dilakukan di Kota Manado untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan informasi dari mereka yang pernah bekerja sebagai kuli bangunan, jenis pekerjaan ini tidak selalu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerjaan sebagai nelayan, lebih-lebih jika pekerjaan sebagai kuli bangunan tidak dapat dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, meskipun rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori tidak miskin sosial demografi, tetapi mereka termasuk miskin pengeluaran. Hal ini karena upah yang diperoleh dari pekerjaan sebagai kuli bangunan tidak cukup untuk dibelanjakan makanan dan bukan makanan yang jumlahnya melebihi nilainya lebih besar dari nilai rupiah sebagai batas/garis kemiskinan pengeluaran⁵⁵.

Kurang lebih seperlima rumah tangga adalah rumah tangga yang tidak miskin sosial demografi dan juga tidak miskin pengeluaran. Termasuk pada kelompok ini diperkirakan adalah rumah tangga yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai guru SD, pembuat dan jasa penyewaan *pump-boot*, dan kepala desa yang cenderung mempunyai daya beli cukup baik untuk konsumsi makanan dan bukan makanan yang mendasar, mempunyai anak lahir hidup sedikit, tidak pernah mengalami kematian untuk anak balita, dan tidak ada ART yang bermigrasi ke luar. Dengan karakteristik ekonomi dan sosial-demografi seperti tersebut, maka mereka diperkirakan termasuk dalam kelompok rumah tangga yang tidak miskin sosial-demografi maupun pengeluaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan anggota masyarakat umum diketahui bahwa rumah tangga yang mempunyai pendapatan tetap dan cukup besar biasanya lebih banyak mengkonsumsi beras daripada sagu sebagai makanan pokok. Mereka juga dapat membeli lauk-pauk yang lebih banyak, meskipun jenisnya juga tidak lebih banyak karena

⁵⁵ Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa untuk melakukan pekerjaan sebagai kernet/kuli bangunan di Manado memerlukan modal untuk biaya perjalanan yang umumnya diperoleh dengan meminjam kepada keluarga/tetangga. Pinjaman uang dikembalikan ketika mereka sudah mendapatkan upah sebagai kuli/kernet bangunan yang besarnya hanya sekitar Rp 30.000,- per hari

memang tidak tersedia di dalam desa. Demikian pula mereka biasanya dapat menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang lebih tinggi daripada anak-anak lain yang berasal dari rumah tangga kebanyakan. Dengan demikian, besar pengeluaran mereka lebih tinggi daripada rumah tangga pada umumnya, sehingga berada di atas garis kemiskinan pengeluaran, dalam arti mereka termasuk rumah tangga tidak miskin pengeluaran.

Proporsi rumah tangga miskin sosial demografi tetapi tidak miskin pengeluaran hanya kurang dari seperlima total rumah tangga sampel. Temuan ini menggambarkan adanya sebagian kecil rumah tangga yang meskipun bekerja pada jenis pekerjaan bernilai rendah, karena jumlah ART yang bekerja beberapa orang, maka pendapatan yang diperoleh dapat dibelanjakan yang melebihi garis kemiskinan pengeluaran.



BAB VI

PENUTUP

Salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri merupakan fenomena sosial yang sifatnya kompleks sehingga untuk memahaminya memerlukan pengetahuan yang luas. Fenomena kemiskinan tidak hanya dipahami dari dimensi ekonomi saja karena dalam kenyataan kemiskinan juga terkait erat dengan dimensi sosial-budaya dan kependudukan. Dalam dimensi ekonomi kajian kemiskinan lebih menekankan pada kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, termasuk pendapatan, pengeluaran dan pemilikan aset. Adapun dalam dimensi sosial-budaya kajian kemiskinan lebih menekankan pada nilai-nilai sosial yang sifatnya kualitatif dan *intangible* seperti apatisme, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam berdemokrasi. Oleh karena itu kemiskinan pada dasarnya adalah penduduk yang tidak terpenuhinya hak dasar dan tidak berkembang dalam kehidupannya sehingga tidak bermartabat.

Mengingat bahwa isu kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi sebagian besar penduduk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, maka kesepakatan MDGs untuk menurunkan angka kemiskinan sebelum 2015 merupakan rujukan yang harus diperhatikan. Bagi Indonesia agenda untuk mensejahterakan rakyat seperti memperoleh pekerjaan, akses pelayanan publik yang memadai serta kecukupan pangan, adalah sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini telah dilandasi oleh konstitusi UUD 45 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Telah banyak dikenal berbagai macam ukuran kemiskinan yang bersifat absolut (misalnya yang dikenal luas adalah angka kemiskinan yang dihitung oleh BPS yang berdasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar manusia/*basic need approach*, yaitu

menggunakan variabel pengeluaran, angka kemiskinan menurut Bank Dunia dengan pendekatan pendapatan/*income approach*) maupun yang bersifat relatif (biasanya menggunakan pendekatan ketimpangan (*inequality approach*)⁵⁶ (Darmawan, 2006). Masih jarang ditemukan ukuran kemiskinan yang dilihat secara komposit, seperti yang dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan indeks kemiskinan manusia (*human poverty indeks-HPI*)⁵⁷. Pendekatan kemiskinan versi UNDP yang berporos pada paradigma pembangunan populis/kerakyatan (*popular development paradigm*) ini memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen (Media Indonesia Online, seperti dikutip oleh PBDI, 2005).

Dalam konteks pengukuran kemiskinan, penelitian ini berupaya mencari indikator kemiskinan dilihat dari dimensi sosial-demografi atau Indeks Kemiskinan Sosial Demografi (IKSD) dengan menggunakan unit analisis rumah tangga. Dalam pencarian menuju indikator kemiskinan yang berdimensi sosial-demografi, studi empirik yang sifatnya eksplorasi dilakukan di daerah perdesaan kawasan Sebatik, Nunukan dan Nusa Tabukan, Sangihe, masih merupakan awal dari rencana tersebut. Dalam pelaksanaan pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner, ternyata tidak mengalami

⁵⁶ Pendekatan lain untuk mengukur kemiskinan adalah pendekatan aksesibilitas dan kemampuan manusia (*human capability approach*). Pendekatan aksesibilitas melihat seseorang miskin karena kurangnya akses terhadap aset produktif, akses terhadap infrastruktur sosial dan fisik, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap teknologi. Pendekatan kemampuan manusia melihat seseorang disebut miskin jika tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat minimal.

⁵⁷ Indeks ini terdiri dari tiga komponen dasar yaitu (i) *longevity*; menghitung persentase penduduk yang meninggal sebelum berusia 40 tahun, (ii) *literacy*; persentase penduduk dewasa yang melek huruf, dan (iii) *living standard*; yang merupakan kombinasi dari persentase penduduk yang memiliki akses yang cepat pada layanan kesehatan, persentase penduduk yang memiliki akses air bersih dan sehat, dan persentase balita kurang gizi.

permasalahan serius dalam mengoperasionalkan konsep variabel. Responden dengan mudah dapat menjawab pertanyaan karena merupakan data yang nyata seperti jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah anak lahir hidup, sehingga validitas data juga tinggi. Dengan kata lain pengukuran kemiskinan dengan konsep IKSD ternyata mudah dilakukan dan data yang diperoleh adalah akurat, sehingga hal ini dapat merupakan alternatif lain dalam pengukuran kemiskinan,

Atas dasar konsep IKSD yang dicobakan dapat diketahui bahwa di kawasan Nusa Tabukan, Sangihe terdapat 47,2 persen dari 399 rumah tangga sampel tergolong miskin, sedangkan di daerah penelitian di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan 68,1 persen rumah tangga sampel masuk dalam klasifikasi rumah tangga miskin. Padahal bila kemiskinan dihitung berdasarkan indikator pengeluaran rumah tangga, maka mereka yang tergolong miskin untuk kasus di Nusa Tabukan, Sangihe sangat tinggi yaitu 70,7 persen. Sebaliknya untuk kasus di Sebatik, jika mengacu pada garis kemiskinan ekonomi tersebut, maka sebanyak 30,3 persen rumah tangga yang menjadi sampel penelitian termasuk rumah tangga miskin.

Kemudian bila nilai kemiskinan sosial-demografi di tabulasikan dengan ukuran kemiskinan atas dasar pengeluaran, di daerah penelitian di Nusa Tabukan dapat diperoleh 39,6 persen keluarga yang tergolong miskin. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pada tingkat kemiskinan daerah perdesaan nasional bahkan pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2003 masing-masing 20,23 persen dan 11,60 persen (BPS 2003). Angka kemiskinan di Kecamatan Nusa Tabukan tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil penelitian SMERU (2004) yang menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Sangihe sebesar 36,07 persen. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari studi ini adalah di Kecamatan Nusa Tabukan hampir separuh keluarga tergolong sangat miskin. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dari daerah tersebut, antara lain:

- Letak daerah tersebut terisolir dari pusat pertumbuhan dan merupakan gugusan pulau kecil..
- Kemampuan sumberdaya alam di daratan sangat terbatas, terutama hanya tanaman keras berupa kelapa dan cengkih.
- Kondisi iklim yang kurang bersahabat dan waktunya panjang sehingga membatasi kegiatan kenelayanan di laut.
- Kualitas penduduk masih rendah, terutama keluarga nelayan dan petani.
- Keterbatasan akses prasarana publik.

Untuk kasus di daerah penelitian di Sebatik, proporsi rumah tangga menurut kemiskinan sosial demografi dan kemiskinan berdasarkan indikator pengeluaran adalah sekitar seperempat dari rumah tangga sampel termasuk sebagai rumah tangga yang tergolong miskin sosial demografi dan juga miskin pengeluaran. Proporsi ini lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang sama di Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 40 persen rumah tangga sampel.

Selanjutnya dengan melakukan perhitungan statistik parametrik regresi dapat diketahui tingkat keeratan hubungan variabel independen sebagai determinan kemiskinan sosial-demografi dan variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Kemaknaan tingkat keeratan tersebut dilihat berdasarkan nilai p . Dari lima variabel yang dijadikan variabel independen ada empat yang mempunyai nilai p sangat signifikan ($< 0,05$) yaitu jumlah anggota rumah tangga usia 15 tahun atau lebih yang migrasi keluar kabupaten, jumlah anak lahir hidup, jumlah anak Balita yang meninggal, dan anggota rumah tangga yang bekerja. Adapun variabel lama sekolah bagi anggota rumah tangga umur 7 tahun atau lebih ternyata tidak signifikan.

Dengan diketahuinya variabel-variabel yang sangat signifikan sebagai determinan kemiskinan sosial-demografi maka pembangunan kependudukan lebih diarahkan pada upaya mempengaruhi variabel tersebut agar nilainya dapat kondusif untuk menurunkan jumlah

anggota rumah tangga yang dijadikan variabel dependen. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi. Selain itu secara substansi kegiatan untuk mencari kesempurnaan indikator IKSD perlu dilanjutkan dengan melakukan berbagai uji penelitian di daerah lain dan mempunyai tipologi daerah yang berbeda. Demikian pula kajian IKSD dengan memanfaatkan data sekunder pada tataran nasional juga perlu dilakukan.

Lampiran.

Tabel 5.1. Penentuan Cutting point untuk variabel Rata-rata tahun sekolah anggota rumah tangga berusia 7+

YOS / Jml ART usia 7 + (cutting point : yos_art = 5,74)

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ,00	11	2,8	2,8	2,8
,50	1	,3	,3	3,0
,75	1	,3	,3	3,3
,80	1	,3	,3	3,5
1,00	1	,3	,3	3,8
1,25	1	,3	,3	4,0
1,40	1	,3	,3	4,3
1,75	1	,3	,3	4,5
2,00	4	1,0	1,0	5,5
2,20	1	,3	,3	5,8
2,25	1	,3	,3	6,0
2,33	2	,5	,5	6,5
2,50	1	,3	,3	6,8
2,67	2	,5	,5	7,3
2,75	2	,5	,5	7,8
3,00	14	3,5	3,5	11,3
3,17	2	,5	,5	11,8
3,20	1	,3	,3	12,0
3,25	1	,3	,3	12,3
3,33	2	,5	,5	12,8
3,40	1	,3	,3	13,0
3,50	3	,8	,8	13,8
3,57	1	,3	,3	14,0

3,60	2	,5	,5	14,5
3,67	5	1,3	1,3	15,8
3,75	6	1,5	1,5	17,3
3,80	1	,3	,3	17,5
3,83	1	,3	,3	17,8
3,86	2	,5	,5	18,3
4,00	9	2,3	2,3	20,5
4,17	2	,5	,5	21,0
4,20	2	,5	,5	21,5
4,25	5	1,3	1,3	22,8
4,29	2	,5	,5	23,3
4,33	9	2,3	2,3	25,5
4,38	1	,3	,3	25,8
4,40	3	,8	,8	26,5
4,43	1	,3	,3	26,8
4,50	5	1,3	1,3	28,0
4,60	2	,5	,5	28,5
4,67	4	1,0	1,0	29,5
4,75	3	,8	,8	30,3
4,80	2	,5	,5	30,8
4,88	1	,3	,3	31,0
5,00	17	4,3	4,3	35,3
5,25	3	,8	,8	36,0
5,29	1	,3	,3	36,3
5,33	5	1,3	1,3	37,5
5,38	1	,3	,3	37,8
5,40	3	,8	,8	38,5
5,43	1	,3	,3	38,8
5,50	10	2,5	2,5	41,3
5,57	1	,3	,3	41,5
5,60	2	,5	,5	42,0
5,63	1	,3	,3	42,3
5,67	5	1,3	1,3	43,5

5,71	1	,3	,3	43,8
5,75	5	1,3	1,3	45,0
5,80- 14	219	54,7	54,7	94,7
15,00	1	,3	,3	100,0
Total	400	100,0	100,0	

Tabel 5.2. Penentuan Cutting point untuk variable Jumlah anak lahir hidup dalam rumah tangga.

p58. Jumlah Anak Lahir Hidup (cutting point : p58 = 3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	66	16,5	17,8	17,8
2	78	19,5	21,1	38,9
3	70	17,5	18,9	57,8
4	60	15,0	16,2	74,1
5	41	10,3	11,1	85,1
6	26	6,5	7,0	92,2
7	12	3,0	3,2	95,4
8	7	1,8	1,9	97,3
9	6	1,5	1,6	98,9
10	3	,8	,8	99,7
11	1	,3	,3	100,0
Total	370	92,5	100,0	
Missing System	30	7,5		
Total	400	100,0		

Tabel 5.3. Penentuan Cutting Point untuk variabel Jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun (balita) dalam rumah tangga.

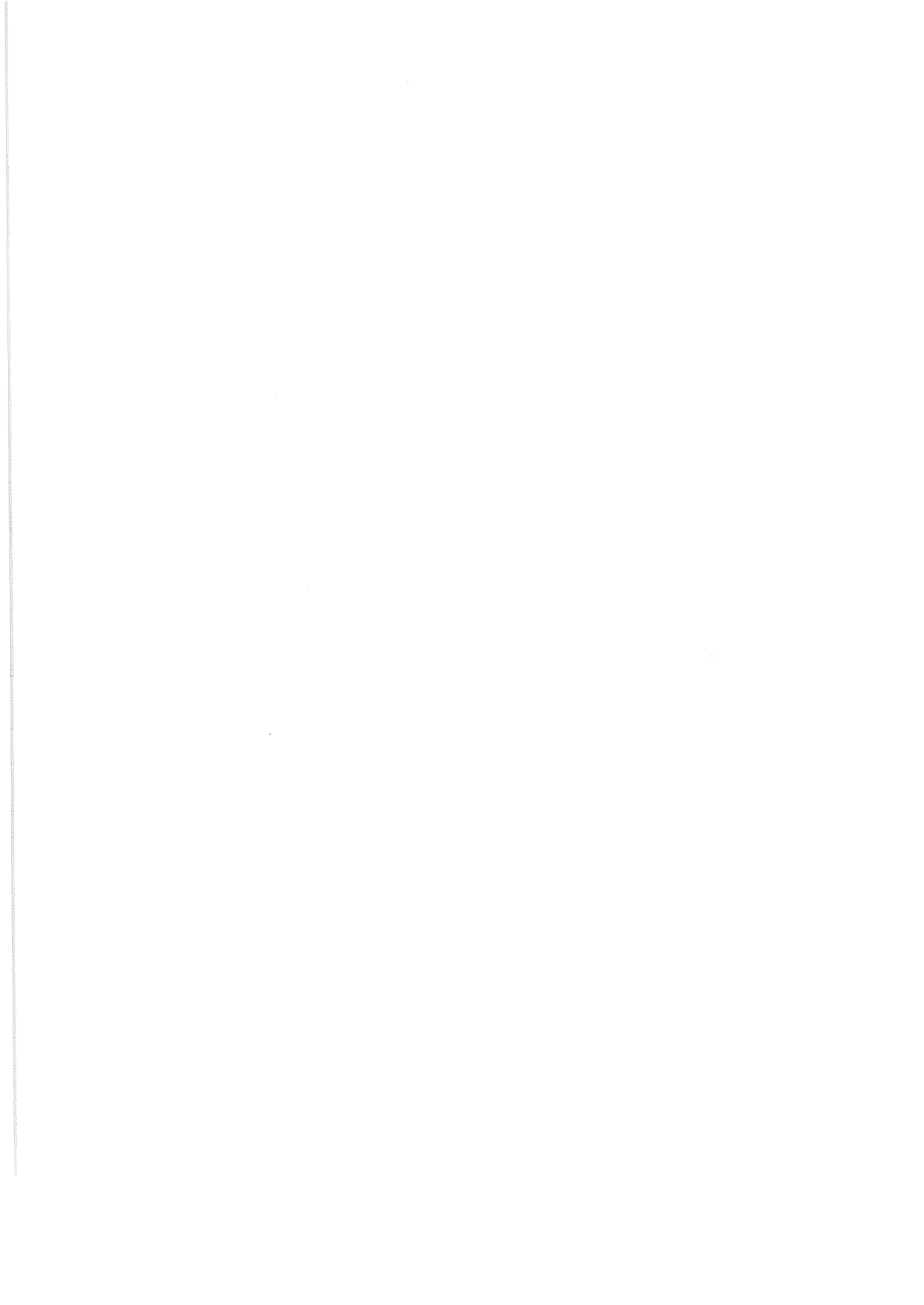
32. Jika ya, berapa orang (cutting point : p32 = 0)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	336	84,0	84,0	84,0
1	47	11,8	11,8	95,8
2	12	3,0	3,0	98,8
3	4	1,0	1,0	99,8
5	1	,3	,3	100,0
Total	400	100,0	100,0	

Tabel 5.4. Penentuan Cutting Point untuk Variabel Jumlah anggota rumah tangga dewasa (usia 15+) yang pernah/sedang bepergian keluar Kabupaten Nunukan dalam waktu satu tahun terakhir.

18. ART dewasa (15 th +) yang pernah/sedang bepergian keluar kabupaten Sangihe/Nunukan dlm waktu 1 th terakhir (cutting point : p18 = 0)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	270	67,5	67,5	67,5
1	100	25,0	25,0	92,5
2	23	5,8	5,8	98,3
3	2	,5	,5	98,8
4	4	1,0	1,0	99,8
5	1	,3	,3	100,0
Total	400	100,0	100,0	



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson et al. *A Sociodemographic Risk Index*. taken from (<http://cat.insist.fr/?aModel=afficheN&cpsid=17462033>).
- Anonymous. *Addressing Child Labour in South Asia* taken from (<http://www.worldbank.org/sar>) html
- Anonymous. (www.ilo-jakarta.or.id) html
- Anonymous. Policy on Education. <http://www.adb.org/Document/Policies/Education/preface.asp>
- Anonymous. *Bosnia and Herzegovina: Poverty Profile* http://intra.rbec.undp.org/mdg_forum/Session3_Bosnia_Bosnia_Summary.htm. 2006
- Anonymous. **Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2005-2006**. Berita Resmi Statistik No.47/IX/ 1 September 2006.
- Aswatini dkk. 2004. **Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Sosial Demografi Rumah Tangga**. Seri Penelitian PPK-LIPI No.56/2004. Jakarta: LIPI.
- Aswatini dkk. 2005. **Ketahanan Pangan dalam Konteks Demografi: Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Lampung** (Laporan penelitian).
- Asian Development Bank. 2006. Policy on Education.* <http://www.adb.org/Document/Policies/Education/preface.asp>
- Bandiyono, Suko dkk. 2004. **Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG**. Jakarta: Bridge Publishing bekerja sama dengan PPK-LIPI.
- Bandiyono, Suko (penyunting). 1995. **Mobilitas Penduduk Daerah Perbatasan: Timor Timur**. Seri Penelitian PPT-LIPI No.6/1999. Jakarta: LIPI.

- Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe. **Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2004.**
- Bappeda Kabupaten Nunukan dan BPS Kabupaten Nunukan. 2005. **Kabupaten Nunukan Dalam Angka.**
- Bappenas. 2004. **Rencana Kegiatan Pembangunan Wilayah Tertinggal Tahun 2005.** Deputi Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Regional Bappenas. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2004. **Kawasan Perbatasan: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia.** Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. 1982. **Penduduk Indonesia Hasil Sub-Sampel Sensus Penduduk 1980.** Seri S2 No. 1. Jakarta: BPS.
- , 1992. **Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1990.** Seri S2. Jakarta: BPS.
- , 2004. **Peta Penduduk Miskin Indonesia 2000.** Jakarta: BPS.
- Baulch, B dan McCulloch, N 1998. "Being poor and becoming poor: poverty status and poverty transition in rural Pakistan". **IDS Working paper** No 79. http://66.102.9.104/search?q=cache:4W9BaKBOs_4J:www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp
- Bernstein, Stan. 2002. 'Population and Poverty: Some Perspectives on Asia and the Pacific', dalam **Asia-Pacific Population Journal**. Vol 17, No. 14, December, hal 31-48.
- BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. **Sangihe Dalam Angka 2004/2005.**
- Cross, Toni G. & Lewis, George F. 1998. Early Manifestation of The Impact of Poverty on Education: The Expectants Parents' Hopes and Fears. Paper dipresentasikan pada the Australian*

Association for Research in Education Annual Conference, University of Adelaide, 29 November-3 Desember 1998.
<http://www.aare.edu.au/98pap/cro98255.htm>.

- Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Daliyo et al. 1999. **Child Labour and Education Planning in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur**. Jakarta: PPT-LIPI and ANU assisted by AusAID.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. **Profil Kesehatan Tahun 2005**.
- Direktori Peacebuilding Indonesia. 2005. **Paradigma Baru Studi Kemiskinan**. <http://www.direktori-perdamaian.org/ina/berita2.php?id=22>
- Djalal, H.Mochtar. 1997. "Pengembangan Anak Usia Dini sebagai Bagian dari Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia" dalam Prosiding Lokakarya Nasional: **Masalah Pengukuran Pencapaian Intervensi Terfokus terhadap Kesejahteraan Ibu dan Tumbuh Kembang Anak dalam Konteks Pembangunan Sumberdaya Manusia di Indonesia**, Jakarta 21-24 Oktober 1996. Jakarta: PPT-LIPI dengan Unicef dan BPS.
- Djajanegara & Anto Achadiyat. 1997. "Penerapan Alat Ilmiah sebagai Suatu Pemikiran Dasar untuk Mengidentifikasi Keadaan Kemiskinan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia" dalam **Widjojo Nitisastro 70 tahun (Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan)**, Buku II. Jakarta: FEUI.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2005. **Kemiskinan dan Otonomi Daerah**. Jakarta: LIPI Press.
- Ennals, Paul. 2006. *Child Poverty and Education. Briefing Paper*. National Children's Bureau and National Grid Transco.

http://pegassus.xssl.net/~admin315/assets/files/reports/Education_and_Child_Poverty.pdf

Government of Indonesia. 2004. **Indonesia Progress Report on the Millennium Development Goals.**

Guruswamy, Mohan. 2003. "Population is not our real problem". *Rediff.com*. <http://in.rediff.com/news/2003/aug/11guru.htm>

Ilahi, Nadeem. 2001. **Children's Work and Schooling: Does Gender Matter? Evidence from Peru LSMS Panel Data.** LAC-PREM, The world Bank.

Indra Darmawan. 2006. *Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.
<http://indradarmawanusd.wordpress.com/2006/12/02/pembangunan-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin/>

Institute of Race and Poverty-University of Minnesota. 2005. "Preparing for Investments Along the University Corridor: Income, race and Family Structure in the university Corridor".
http://www.irpumn.org/website/projects/index.php?strWebAction:projects_folder&intDoc

Irawan, Puguh B. dan Haning Romdiati. 2000. "Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan" dalam **Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII**. Jakarta: LIPI.

Irawan, Puguh B. 2000. "Analisis Sensitivitas pada Pengukuran Kemiskinan: Fenomena Kemiskinan Sementara selama Krisis Ekonomi di Indonesia" dalam **Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII**. Jakarta: LIPI.

Irawan, Puguh B. 2005. "Dampak krisis ekonomi terhadap kemiskinan dan pembangunan manusia" dalam **Kemiskinan dan Otonomi Daerah**. Jakarta: LIPI Press.

- Irwanto, et al. 1995. **Child Labor in Three Metropolitan Cities: Jakarta, Surabaya, Medan**. Atma jaya Research Centre Series No.001. Jakarta: Atma Jaya & Unicef.
- Jamasy, Owin. 2004. **Keadilan, Pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan**. Jakarta: Blantika.
- Jones, Gavin W. 2003. 'The Changing Indonesian Household', dalam Nancy Birdsall, Allen C. Kelley dan Steven W. Sinding (eds), **Population Matters. Demographic Change, Economic Growth, and poverty in the Developing World**. Oxford: oxford University Press.
- Lustig, Nora; N. Birdsall dan M. Das Gupta. 1988. "Extract From A Report From The Explanatory Mission on Poptation and Poverty". International Union for the Scientific Study of Population. <http://www.iussp.org/Activities/scc-pov/pov-outline.php>
- Merrick, Thomas. 2003. 'Population and Poverty in Household: A review of Reviews' dalam Nancy Birdsall, Allen C. Kelley dan Steven W. Sinding (eds), **Population Matters. Demographic Change, Economic Growth, and poverty in the Developing World**. Oxford: oxford University Press.
- Mehrota, Santosh and Biggeri, Mario. 2002. *Subterranean Child Labour Force : Subcontracted Home Based Manufacturing in Asia*. Innocenti Working Paper. UNICEF Italy.
- Morrison, Christian, 2002. *Health, Education and Poverty Reduction. Policy Brief No. 19. OECD Development Centre*. <http://www.oecd.org/dataoecd/59/57/1851366.pdf>.
- Nachrowi, Nachrowi. D dan Usman, Hardius. 2004. **Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi**. Grasindo. Jakarta.
- Naila Kabeer. "Gender equality, poverty eradication and the MDG's: Promoting women's capabilities and participation.

- Navaneetham, K dan Sunny Jose. 2005. **"Poverty, Malnutrition and Mortality in South Asia: A Review of Issue and Option"**. CICRED Seminar on Mortality as Both a Determinant and a Consequence of Poverty and Hunger, Thiruvananthapuram, India, February 23-25, 2005, pp.1-21.
- Obaid, Thoraya Ahmed. 2002. 'Population and Poverty: Challenges for Asia and the Pacific', dalam **Asia-Pacific Population Journal**. Vol 17, No. 14, December, hal 7-12.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025**.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2004. **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2001-2006**.
- Pena, MD, Rodolfo, Stig Wall, PhD, and Lars-Ake Persson, MD, PhD. 2000. **The Effect of Poverty, Social Inequity and Maternal Education on Infant Mortality in Nicaragua, 1988-1993**. American Journal of Public Health, Vol.90, No.1, January 2000.
- Quibria, M.G. 1991. "Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues", dalam **Asian Development Review**, Vol. 9, No. 2: 91-112.
- Raharto, A; S. Bandiyono, B Setiawan, E Djohan, H Yogaswara. 1988. **Mobilitas Penduduk Wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Timur**. Jakarta: PPT-LIPI
- Raharto, Aswatini dkk. 2000. **Mobilitas Penduduk di Kawasan Kerjasama Regional**. Jakarta: LIPI.
- Raharto, Aswatini dan Eniarti Djohan. 2000. **Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan**

- Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan.** Seri Penelitian PPT-LIPI No.36/1999. Jakarta: LIPI.
- Raharto, Aswatini dan Haning Romdiati. 2000. "Identifikasi Rumah Tangga Miskin" dalam **Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII**. Jakarta: LIPI.
- Republik Indonesia. 2004. **Indonesia. Progress Report on the Millennium Development Goals**. Jakarta: Ministry of Development Planning/National Development Planning Agency.
- Republika Online. 2006. *KB Regional Wapres*. http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=237859&kat_id=13&kat_id1=&kat_id2=
- Schoumaker, Bruno. 2004. **Poverty and Fertility in Sub-Saharan Africa (Evidence from 25 countries)**. Population Association of America Meeting, Boston, April 1-3, 2004. Draft.
- Sianturi, Eddy dan Nafsiah,. 2002. "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI". **Buletin Litbang Pertahanan Indonesia**. No 2 Tahun 2002. <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnurutisi=9>
- Skeldon, Ronald. 2002. 'Migration and Poverty' dalam **Asia-Pacific Population Journal**. Vol 17, No. 14, December, hal: 67-82.
- Smeru. 2004. **Peta Kemiskinan Indonesia 2000**. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Smeru. 2004. "Angka Kemiskinan dalam Kajian Kemiskinan Partisipatoris" dalam **Smeru** No.11:Jul-Sep 2004. Jakarta: Smeru.
- Sricharoen, M.Sc. Thitiwan & PD Dr. Gertrud Buchenrieder. 2005. *Principal component analysis of poverty in northern Thailand taken from* (http://www.tropentag.de/2005/abstract/full/228.pdf).

- Sudarmadi, Lalu. 2006. "Waspadai Lonjakan Penduduk !"
(**Republika Online**: <http://www.republika.co.id>)
- Sumarto, Sudarno et al. 2004. **Assessing the Impact of Indonesia Sosial Safety Net Programs on Household Welfare and Poverty Dynamics**. Smeru working paper, August 2004. Jakarta: Smeru.
- Tiwari, B.N. 2005. "Myth and reality on poverty". *eKantipur.com*.
<http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=43239>
- TIMSS, 2003. Poverty and Education. More Money, Better Grades. University of Michigan.*
http://sitemaker.umich.edu/salas.356/more_money_better_grades.
- Tim Peneliti PPK-LIPI. 2006. **Penduduk dan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur**. Jakarta: PPK-LIPI.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1997. "Pertumbuhan dengan Pemerataan: Pengalaman Indonesia" dalam **Widjojo Nitisastro 70 tahun (Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan)**, Buku II. Jakarta: FEUI.
- Toersilaningsih, Rani & Tuhirman, Hendratno. (2004) "Socio-Economic Characteristics of Indonesian Families" dalam Sri Harijati Hatmadji & Iwu Dwisetiyani Utomo (editor) Empowerment of Indonesian Women: Family, Reproductive Health, Employment and Migration. Jakarta: Demographic Institute, Faculty of Economics University of Indonesia*
- Uddi, A.J. Mahbub. 2004. "Socio-Demographic Correlates of Rural Poverty in Bangladesh. A Case Study of Gaibandha Sadar and Tanore Upazilas" dalam **Bangladesh e-Journal of Sociology**, vol.1. No. 2, July 2004.
- Ulaen, Alex J. **Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

UNICEF UK. 2005. One in Twelve of the World's Children Are Forced into Child Labour. <http://www.globalpolicy.org/socecon/inequal/labor/2005/0218unicef.htm>.

United Nations Development Programme (UNDP). 1997. **Human Development Report 1997**. New York: Oxford University Press.

Visaria, Leela. 2002. "Education and Health in South Asia: What Do We Know" dalam **Asia-Pacific Population Journal** Vol.17, no 4. ESCAP

Webb, Anthony. 2005. "The Dependency Ratio: What Is It, Why Is It Increasing, and What Are the Implications?". **Issue Brief**, Vol 2 (1). Alliance for Health and the Future.

Widayatun dkk. 1999. **Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sangihe Talaud: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan**. Seri Penelitian PPT-LIPI No.37/1999. Jakarta: LIPI.

www.sarpn.org.za/documents/d0002046/Malawi_Household_survei_Oct2005_13.pdf. 2005.

